

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. DASAR HUKUM	2
1.2. VISI MISI KEPALA DAERAH	3
1.2.1. Visi Pembangunan	3
1.2.2. Misi Pembangunan	5
1.3. DATA DAERAH	6
1.3.1. Data Geografis Wilayah	8
1.3.2 Jumlah Penduduk	13
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk	13
1.3.4. Jumlah PNS	14
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	18
1.1.1. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	19
1.1.2. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	20
BAB II - PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	21
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	21
2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah	21
2.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	25
2.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian	30
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah	31
2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah	32
2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	34
2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah	38
2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah	38
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah	39
BAB III - HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	41
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	43
PENDIDIKAN - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	43
KESEHATAN - DINAS KESEHATAN	56
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	80

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
SATPOL PP	89
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	93
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	98
SOSIAL - DINAS SOSIAL.....	110
TENAGA KERJA - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	118
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	123
PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	127
PERTANAHAN - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKINAN DAN PERTANAHAN	131
LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	132
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	143
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	145
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	147
PERHUBUNGAN - DINAS PERHUBUNGAN	151
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	161
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	166
PENANAMAN MODAL - DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	171
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	177
STATISTIK - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	182
PERSANDIAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	183
KEBUDAYAAN - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	185
PERPUSTAKAAN - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	187
KEARSIPAN - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	195
KELAUTAN DAN PERIKANAN - DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	198
PARIWISATA - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	203
PERTANIAN - DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN.....	204
PERDAGANGAN - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	210
PERINDUSTRIAN - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	214
PERENCANAAN - BADAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN DAERAH	218
KEUANGAN - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	223

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	231
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	235
SEKRETARIAT DAERAH	237
BAGIAN UMUM.....	237
BAGIAN ORGANISASI	242
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	248
BAGIAN PEMERINTAHAN	249
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA.....	251
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	254
BAGIAN HUKUM	256
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	259
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	261
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	263
INSPEKTORAT KOTA	266
KECAMATAN	285
KECAMATAN BAJENIS	285
KECAMATAN PADANG HILIR.....	288
KECAMATAN PADANG HULU	290
KECAMATAN RAMBUTAN	293
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA.....	296
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	299
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	494
BAB V PENUTUP.....	495

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ketinggian Wilayah Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kecamatan	8
Tabel 1.2 Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	9
Tabel Struktur Penggunaan Lahan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2019.....	10
Tabel Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	11
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Tebing Tinggi.....	13
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kota Tebing Tinggi Per Kecamatan.....	14
Tabel 1.4 Jumlah PNS Pemerintah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Golongan Ruang...	15
Tabel 1.5 Jumlah PNS Pemerintah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan	17
Tabel 1.6 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Tebing Tinggi.....	18
Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	19
Tabel 1.8 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH.....	20
Tabel 1.9 Tabel Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	20
Tabel 2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024	26
Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024..	27
Tabel 2.3. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	35
Tabel 2.4. Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 .	40
Tabel 3.1.1 Urusan Pemerintahan Daerah.....	41
Tabel 3.1.2 Indikator Urusan Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi	44
Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	56
Tabel 3.1.4 Indikator Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.....	72
Tabel 3.1.5 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.....	83
Tabel 3.1.6.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	89
Tabel 3.1.6.2 Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.....	93
Tabel 3.1.6.3 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	98
Tabel 3.1.6.3.1 Jumlah Aparatur Dan Masyarakat Yang Ikut Pelatihan.....	99
Tabel 3.1.6.3.2 REKAP DATA BENCANA TAHUN 2024	101
Tabel 3.1.6.3.3 Orang Hanyut.....	101
Tabel 3.1.6.3.4 Data Banjir	102

Tabel 3.1.6.3.5	106
Tabel 3.1.7 Tabel Realisasi IKU Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	111
Tabel 3.1.8 Capaian Indikator Sasaran sesuai Target Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.....	119
Tabel 3.1.9 Capaian Indikator Sasaran terhadap Target dari Bidang Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	121
Tabel 3.1.10 Capaian Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	124
Tabel 3.1.11 Capaian Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja Bidang Pangan	128
Tabel 3.1.12 Capaian Indikator dan Sasaran sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	132
Tabel 3.1.12.1 Nilai IKA Kota Tebing Tinggi.....	132
Tabel 3.1.13 Capaian Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	143
Tabel 3.1.14 Capaian Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	146
Tabel 3.1.15 Indikator Urusan Dinas PPKB Kota Tebing Tinggi	147
Tabel 3.1.16 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	153
Tabel 3.1.16.1 Kendaraan Yang Wajib Uji dan Yang Lulus Uji Dari Dalam Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	155
Tabel 3.1.16.2 Kendaraan Yang Wajib Uji dan Yang Lulus Uji Dari Luar Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	155
Tabel 3.1.17 Capaian Indikator Sasaran dengan Target sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	162
Tabel 3.1.18 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	166
Tabel 3.1.19 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	173
Tabel 3.1.20 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024	178
Tabel 3.1.21 Capaian Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi.....	182
Tabel 3.1.22 Capaian Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi	184
Tabel 3.1.23 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan.....	188
Tabel 3.1.23.1 LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN Periode 2023 dan 2024	189
Tabel 3.1.23.2 JUMLAH KOLEKSI BAHAN PUSTAKA.....	190
Tabel 3.1.24 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan	195
Tabel 3.1.25 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	196
Tabel 3.1.26 Capaian Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan	198

Tabel 3.1.27 - Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2024.....	203
Tabel 3.1.28 Capaian Indikator Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bidang Pertanian	205
Tabel 3.1.29 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024	210
Tabel 3.1.30 Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Urusan Industri pada Tahun 2023 – 2026.....	215
Tabel 3.1.31 PERSENTASE JUMLAH IKM SAMPAI DENGAN TAHUN 2024	216
Tabel 3.1.32 Capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2024.....	215
Tabel 3.1.33 Capaian Kinerja 2024 BPKPD	224
Tabel 3.1.33.1 Capaian Pajak Daerah 2023 & 2024	225
Tabel 3.1.33.2 Realisasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan 2023 & 2024.....	226
Tabel 3.1.34 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	232
Tabel 3.1.35 Capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2024.....	236
Tabel 3.1.36 Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024	239
Tabel 3.1.37 Indikator Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2024	243
Tabel 3.1.38 Capaian Kinerja Bagian Protokol Kota Tahun 2024	248
Tabel 3.1.39 Indikator Sasaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.....	250
Tabel 3.1.40 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi..	252
Tabel 3.1.41 Indikator Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024	254
Tabel 3.1.41.1 Capaian Kinerja Keluaran.....	254
Tabel 3.1.42 Capaian Indikator Sasaran Sesuai Target Perjanjian Kinerja Bagian Hukum	256
Tabel 3.1.43 Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024	259
Tabel 3.1.44 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024	260
Tabel 3.1.45 Capaian Indikator sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Bagian pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024.....	261
Tabel 3.1.46 Indikator Urusan Bidang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.....	263
Tabel 3.1.47 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	269
Tabel 3.1.48 Capaian Kinerja Kecamatan Bajenis Tahun 2024.....	285
Tabel 3.1.49 Capaian Kinerja Kecamatan Padang Hilir Tahun 2024.....	288
Tabel 3.1.50 Capaian Kinerja Kecamatan Padang Hulu Tahun 2024.....	291
Tabel 3.1.51 Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024.....	294
Tabel 3.1.52 Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024.....	296

Tabel 3.1.53 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024.....	299
Tabel 3.2.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	305
Tabel 3.2.3 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	346
Tabel 3.2.3 URUSAN PILIHAN.....	407
Tabel 3.2.4 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	420
Tabel 3.2.5 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN.....	437
Tabel 3.2.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	454
Tabel 3.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN.....	457
Tabel 3.2.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	477
Tabel 3.3.1 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024	485
Tabel 3.3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Dprd Tahun Anggaran Sebelumnya	489

DAFTAR GAMBAR

Gambar Peta Penggunaan Lahan Kota Tebing Tinggi.....	7
Gambar 3.1. Grafik Jumlah Pengunjung	189
Gambar 3.2. Grafik Jumlah Buku	191

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah yang secara konstitusional telah diatur di dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban meliputi :

1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 14 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara rinci menjelaskan bahwa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan

- c. tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.

Sementara itu untuk hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan merupakan capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat dan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi.

1.1. DASAR HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD mengacu kepada :

1. Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 9 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Utara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2. VISI MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. Visi Pembangunan

Visi merupakan sebuah kondisi atau gambaran umum yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang atau pada akhir periode perencanaan (what we believe we can be), atau gambaran umum masa depan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Secara politis, eksistensi Visi suatu daerah melekat pada periodisasi atau masa jabatan kepemimpinan seorang Bupati/Walikota.

Visi hendaknya merupakan sebuah pemikiran jauh ke depan mengenai suatu daerah, bukan bertolak dari hal-hal yang telah secara eksis tersedia,

namun mendasarkan nilai-nilai filosofi yang penting, kreatif, dengan mengedepankan penghargaan kepada masyarakat. Sebagai sebuah gambaran umum, Visi dirumuskan tanpa menspesifikan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Visi yang baik hendaknya dapat mendorong terciptanya dedikasi dan tingginya kinerja pemerintah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pengalokasian sumber daya yang ada untuk terciptanya kebermanfaatan. Secara kontekstual yang berlangsung di daerah, dikembangkan Visi pembangunan jangka panjang dan Visi pembangunan jangka menengah. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan gambaran umum sebagai arah pembangunan ke depan yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Eksistensi Visi jangka menengah ini berkedudukan seiring dengan masa jabatan kepala daerah.

Permasalahan pembangunan Kota Tebing Tinggi dan/atau isu-isu strategis dalam jangka menengah yang tertuang dalam Visi pembangunan jangka menengah diharapkan juga sejalan dengan Visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Adapun Visi jangka panjang dalam RPJPD Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025, adalah “Kota Jasa dan Perdagangan dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Dengan berdasarkan pada Visi jangka panjang tersebut, maka Visi jangka menengah penting untuk didefinisikan dalam bentuk yang lebih rinci dan spesifik. Konsentrasi terhadap terbentuknya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan menjadi sebuah tujuan yang sangat rasional.

Didasarkan pada potensi sumber daya daerah, karakteristik, peluang, kondisi masyarakat dan tantangan permasalahan yang dihadapi pada masa yang akan datang, dan keterkaitan dengan Visi Jangka Panjang (2006-2025) maka dalam periode pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 merujuk pada **Asta Cita** adalah 8 misi yang diusung Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

1.2.2. Misi Pembangunan

Misi merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan/ditempuh yang berbentuk langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan Visi atau gambaran umum yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang yang telah dipaparkan di atas. Rumusan Misi merupakan penjabaran Visi dengan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi disusun sebagai pedoman atau kerangka bagitujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalanyang akan ditempuh untuk mencapai Visi.

Penyusunan rumusan Misi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada dalam pembangunan daerah. Dengan gambaran Misi yang demikian, tim menelaah Misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya dalam pernyataan Misi sesuai dengan kriteria pernyataan Misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam mewujudkan Asta Cita tersebut di atas, maka kedelapan Misi yang diemban adalah sebagai berikut :

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
- 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**
- 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.**
- 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**
- 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

1.3. DATA DAERAH

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Luas Wilayah Kota Tebing Tinggi adalah 39,17 km² berdasarkan pemendagri tahun 2022 tentang batas wilayah serdang bedagai dengan tebing tinggi. Kota Tebing Tinggi yang berjarak sekitar 78 km dari Kota Medan (Ibukota Provinsi Sumatera Utara) serta terletak pada jalur lintas utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera Utara melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Balige - Siborongborong. Kota Tebing Tinggi terletak diantara 3⁰19'00"- 3⁰21'00" Lintang Utara dan 98⁰11'-98⁰21" Bujur Timurdengan batas – batas :

1. Sebelah Utara dengan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Sebelah Selatan dengan PTPN III Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Sebelah Timur dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Sebelah Barat dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai. Ketinggian di atas permukaan laut: 18-34 m.

[illegible]

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) WALI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024

1.3.1. Data Geografis Wilayah

1. Topografi

Kota Tebing Tinggi memiliki ketinggian rata-rata 18-34 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah yang memiliki titik tertinggi adalah Tebing Tinggi Kota dengan ketinggian 34 m dpl, dan wilayah dengan titik terendah adalah Bajenis dengan ketinggian 18 m dpl.

Tabel 1.1 Ketinggian Wilayah Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tinggi (meter)
.		
1	Padang Hulu	33
2	Tebing Tinggi Kota	34
3	Rambutan	30
4	Bajenis	18
5	Padang Hilir	33

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi

2. Hidrologi

Kota Tebing Tinggi dilintasi oleh 4 (empat) aliran sungai besar dan kecil, yaitu Sungai Padang, Bahilang, Kalembah dan Sibarau.

3. Klimatologi

Kota Tebing Tinggi beriklim tropis maka temperatur udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar $25^{\circ} - 27^{\circ}$ C. Selama tahun 2024, Kota Tebing Tinggi mengalami hujan sebanyak 131 hari dengan curah hujan berkisar 14-448 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan curah hujan 448 mm. Hari Hujan terbanyak bulan Oktober yaitu selama 18 hari.

Tabel 1.2
Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
JANUARI	12	97
FEBRUARI	5	14
MARET	10	86
APRIL	4	60
MEI	8	213
JUNI	8	90
JULI	6	69
AGUSTUS	16	314
SEPTEMBER	15	344
OKTOBER	18	448
NOVEMBER	16	339
DESEMBER	13	107
RATA-RATA	11	182

Sumber: BPS, Kota Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

4. Penggunaan Lahan

- a. **Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Tebing Tinggi terdiri dari :
 - Kawasan perlindungan setempat;
 - RTH kota;
 - Kawasan cagar budaya; dan
 - Kawasan rawan bencana alam.
- b. **Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasanbudidaya di Kota Tebing Tinggi terdiri dari:
 - Kawasan peruntukan perumahan;
 - Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;

- Kawasan peruntukan perkantoran;
- Kawasan peruntukan industri;
- Kawasan peruntukan pariwisata;
- Kawasan peruntukan pertanian;
- Kawasan ruang terbuka non hijau kota;
- Kawasan ruang evakuasi bencana;
- Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal;
- Kawasan peruntukan pendidikan; dan
- Kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Secara lebih detail, struktur penggunaan lahan di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel Struktur Penggunaan Lahan di Kota Tebing Tinggi
Tahun 2019**

KECAMATAN	LUAS LAHAN	
	Ha	%
Permukiman	1.589	40,04
Sarana Sosekbud	139,90	3,54
Perhubungan (Jalan Umum & Kereta Api)	-	-
Pertanian (sawah, tegalan/kebun)	234,45	5,94
Industri	42,53	1,05
Semak Belukar	150,18	4,03
Lain-lain (termasuk rawa-rawa)	-	-
Jumlah	2.146,06	54,60

Sumber: BPS, Kota Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

5. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033, Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota jasa dan perdagangan dalam konstelasi pengembangan wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang berhierarki dan terintegrasi yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan wilayah;
- b. peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien;
- c. peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perkotaan ke seluruh wilayah kota;
- d. pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota;
- e. peningkatan kualitas lingkungan yang seimbang dengan perkembangan kota; dan
- f. pengembangan kawasan strategis kota.

Secara lebih rinci, berikut merupakan uraian dari masing-masing kebijakan di atas.

Tabel Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No.	Kebijakan	Uraian
1.	Sistem pusat pelayanan kota	a. Mengembangkan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan sinergis; b. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa secara tersebar dan berhierarki; dan c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru di kawasan pinggiran kota.
2.	Peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal	a. Mengembangkan sistem jalan lingkaran utara - barat dan lingkaran timur - selatan untuk memfasilitasi pergerakan regional; b. Mengembangkan pola pergerakan internal dan eksternal yang efektif dan efisien; c. Mengembangkan keterpaduan stasiun kereta api dengan sistem transportasi darat lainnya; dan d. Menata kembali sistem angkutan umum perkotaan dan angkutan barang yang handal dan aman.

No.	Kebijakan	Uraian
3.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi dan air minum; b. Mengembangkan sistem jaringan energi/kelistrikan sampai merata; c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan dan air limbah; d. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan; dan e. Mengembangkan infrastruktur pengendali banjir dan mengurangi luasan genangan banjir.
4.	Pengembangan kawasan Budidaya	a. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional di pusat kota; b. Mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan permukiman padat dan kawasan rawan banjir; c. Mengembangkan kawasan industri di sekitar jalan lingkar luar kota; d. Memberikan alokasi ruang bagi sektor informal yang memadai dan nyaman; dan e. Mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
5.	Peningkatan kualitas lingkungan yang seimbang dengan perkembangan kota	a. Mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; b. Mengembangkan kawasan sempadan sungai dan sempadan rel kereta api sebagai kawasan lindung; c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah beralih fungsi; dan d. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya.
6.	Pengembangan kawasan strategis kota	a. Mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. Mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan c. Mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
7.	Peningkatan fungsi kawasan pertahanan Negara	a. Mendukung penetapan kawasan peningkatan fungsi kawasan dan keamanan; b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan

No.	Kebijakan	Uraian
		d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Sumber: RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033

1.3.2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2023, Penduduk Kota Tebing Tinggi sebanyak 180.977 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,97.

Sesuai hasil Sensus Penduduk, Kepadatan penduduk di Tebing Tinggi Tahun 2024 sebesar 4.708,04 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 5 orang. Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebesar 6.830.55 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Padang Hilir sebesar 3.677,97 jiwa/ km².

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Tebing Tinggi

KECAMATAN	2024		TOTAL	SEX RATIO	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN				
PADANG HULU	17.109	17.204	34.313	99.45	8.51	4032.08
TEBING TINGGI KOTA	11.623	12.079	23.702	96.22	3.47	6830.55
RAMBUTAN	20.025	20.329	40.354	98.50	5.94	6793.60
BAJENIS	20.209	20.323	40.532	99.44	9.08	4463.88
PADANG HILIR	21.052	21.024	42.076	100.13	11.44	3677.97
TOTAL	90.018	90.959	180.977	98.97	38.44	4708.04

Sumber : BPS, Kota Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Data DKB Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi sebanyak 182.226 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,84% per tahun pada tahun 2024.

Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rambutan (2,73%), disusul Kecamatan Padang Hulu (2%), Kecamatan Tebing Tinggi Kota (1,94%), dan Kecamatan Bajenis (1,28%). Sementara itu Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan yang terendah laju pertumbuhan penduduknya (0,89%). Kecenderungan meningkatnya pertumbuhan

penduduk pada kecamatan yang secara geografis di luar pusat kota (Kecamatan Tebing Tinggi Kota) berkaitan dengan keterbatasan lahan permukiman dan tingginya harga tanah pada wilayah pusat kota, sementara pada kondisi berbeda lahan permukiman di kecamatan lain masih cukup tersediadengan harga yang relatif terjangkau.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kota Tebing Tinggi Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
	DKB Tahun 2023	DKB Tahun 2024	
Padang Hulu	34.049	34.392	2,00
Tebing Tinggi Kota	25.067	25.179	1,94
Rambutan	40.716	41.113	2,73
Bajenis	39.671	39.926	1,28
Padang Hilir	41.051	41.616	0,89
Jumlah	180.554	182.226	1,84

Sumber: DISDUKCAPIL Tahun 2024

Konsekuensi atas meningkatnya laju pertumbuhan penduduk pada wilayah kecamatan dimaksud, mengharuskan Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai baik jalan, drainase, air bersih, persampahan, lampu penerangan jalan, serta utilitas lainnya, sehingga kecamatan-kecamatan dimaksud memiliki daya dukung yang sesuai untuk mendukung perkembangan dan peningkatan aspek demografis wilayah.

1.3.4. Jumlah PNS

Seiring dinamika di bidang pemerintahan, jumlah PNS pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mengalami peningkatan. Tata kelola pemerintahan yang berorientasi untuk tercapainya pelayanan yang cepat, tanggap, transparan, dan akuntabel, tidak bisa semata-mata hanya dilakukan dengan meningkatkan etos kerja dan tanggungjawab. Perubahan atas meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik, juga harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kebutuhan, Untuk mendukung kebutuhan sumber daya aparatur dalam rangka terpenuhinya pelayanan publik, pelayanan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kota Tebing Tinggi tetap melakukan kebijakan

penyesuaian kebutuhan PNS secara cermat dan selektif. Penyesuaian kebutuhan PNS difokuskan pada terpenuhinya kebutuhan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis tertentu. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah, yang memprioritaskan penerimaan PNS baru untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang prioritas dibutuhkan.

Pada Tahun 2023 PNS pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi berjumlah 2.677 orang dari yang sebelumnya berjumlah 2.841. Dari jumlah 2.677 orang, jumlah PNS laki-laki sebanyak 893 orang dari sebelumnya 950 orang, dan PNS perempuan sebanyak 1.784 orang dari sebelumnya 1.864 orang. Sementara itu, jika dikelompokkan berdasarkan golongan ruang, jumlah PNS Golongan Ruang I sebanyak 20 orang dari sebelumnya 23 orang, PNS Golongan Ruang II sebanyak 330 orang dari sebelumnya 399 orang, PNS Golongan Ruang III sebanyak 1.842 orang dari sebelumnya 1.873 orang, dan PNS Golongan Ruang IV sebanyak 485 orang dari sebelumnya 519 orang.

Tabel 1.4 Jumlah PNS Pemerintah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Golongan Ruang

PNS				
NO	GOLONGAN/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	IV/a	76	175	251
2	IV/b	61	138	199
3	IV/c	21	14	35
4	IV/d	0	0	0
5	IV/e	0	0	0
Golongan IV		158	327	485
6	III/a	162	396	558
7	III/b	91	218	309
8	III/c	130	208	338
9	III/d	192	445	637
Golongan III		575	1267	1842
10	II/a	9	0	9
11	II/b	16	5	21
12	II/c	69	131	200
13	II/d	54	46	100

Golongan II		148	182	330
14	I/a	0	0	0
15	I/b	0	0	0
16	I/c	6	0	6
17	I/d	9	5	14
Golongan I		15	5	20
Jumlah PNS		896	1781	2677
PPPK				
18	Golongan V	4	0	4
19	Golongan IX	42	229	271
Jumlah PPPK		46	229	275
JUMLAH KESELURUHAN		942	2010	2952

*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Tebing Tinggi*

Jumlah PNS sebanyak 2.677 orang tersebut tersebar pada SKPD-SKPD, baik Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane, maupun pada Sekretariat KPU.

Mengingat sumber daya aparatur merupakan salah satu pilar penting upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara intens dan berkelanjutan melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan PNS, baik melalui mekanisme penerimaan CPNS baru, memberikan status tugas belajar, maupun ijin belajar bagi PNS yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan jenjang pendidikannya. Secara bertahap, proporsi PNS dengan kualifikasi jenjang Sarjana dan Pasca-Sarjana (S-2 dan S-3) terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan ini, kompetensi dan profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan semakin meningkat, yang tentunya membawa dampak terhadap kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 1.5 Jumlah PNS Pemerintah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan
Golongan Ruang dan Pendidikan
TAHUN 2023**

NO	PENDIDIKAN	PNS			PPPK			TOTAL		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	10	4	14	0	0	0	10	4	14
2	SLTP	10	2	12	0	0	0	10	2	12
3	SLTA	165	85	250	4	0	4	169	85	254
4	D-1,D-2,D-3	101	371	472	0	0	0	101	371	472
5	D-4/S-1	512	1212	1724	42	229	271	554	1441	1995
6	S-2	97	107	204	0	0	0	97	107	204
7	S-3	1	0	1	0	0	0	1	0	1
JUMLAH		896	1781	2677	46	229	275	942	2010	2952

TAHUN 2024

NO	PENDIDIKAN	PNS			PPPK			TOTAL		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	8	4	12	0	0	0	8	4	12
2	SLTP	6	2	8	0	0	0	6	2	8
3	SLTA	148	70	218	1	0	1	149	70	219
4	D-1,D-2,D-3	94	360	454	6	8	14	100	368	468
5	D-4/S-1	505	1160	1665	104	390	494	609	1550	2159
6	S-2	103	111	214	0	0	0	103	111	214
7	S-3	1	1	2	0	0	0	1	1	2
JUMLAH		865	1708	2573	111	398	509	976	2106	3082

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi

Selain meningkatkan kualifikasi/jenjang pendidikan formal, Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga berupaya meningkatkan kompetensi PNS Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), yang meliputi diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat kompetensi teknis untuk pejabat fungsional, maupun diklat teknis lain untuk pejabat pelaksana atau aparatur yang melaksanakan tugas tertentu. Untuk mengikuti perkembangan dan dinamika lingkungan tugas yang terus meningkat, Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bilamana pengetahuanteknis dimaksud bersifat menyeluruh untuk seluruh SKPD, atau dengan mengirimkan PNS untuk mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lain

bilamana pengetahuan teknis dimaksud hanya untuk pelaksanaan tugas pada SKPD tertentu.

**Tabel 1.6 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah
Kota Tebing Tinggi**

NO	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ESELON II	23	3	26
2	ESELON III	66	40	106
3	ESELON IV	109	138	247
4	ESELON V	0	3	3
5	FUNGSIONAL PNS	349	1105	1454
6	FUNGSIONAL PPPK	46	229	275
7	PELAKSANA	349	492	841
JUMLAH		942	2010	2952

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.711.291.305.562,00 direalisasikan sebesar Rp.650.856.063.699,00, terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.93.063.298.612,00 atau 84,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 110.684.002.014,00.
- Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp 549.428.253.185,00 atau 92,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 592.594.622.548,00.
- Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 8.364.511.902,00 atau 104,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.012.681.000,00. Rincian target dan realisasi per jenis pendapatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	PENDAPATAN	711.291.305.562,00	650.856.063.699,00
1.	Pendapatan Asli Daerah	110.684.002.014,00	93.063.298.612,00
	- Pendapatan Pajak Daerah	40.970.740.000,00	38.344.123.228,00
	- Hasil Retribusi Daerah	43.578.674.970,00	37.261.716.387,00
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.741.232.544,00	12.741.232.544,00
	- Lain –Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.393.354.500,00	4.716.226.453,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	592.594.622.548,00	549.428.253.185,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	534.834.695.961,00	517.004.550.330,00
	Dana Perimbangan	534.834.695.961,00	517.004.550.330,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.759.926.587,00	32.423.702.855,00
	Pendapatan Bagi Hasil	52.759.926.587,00	32.423.702.855,00
	Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemko Tebing Tinggi Tahun 2024

1.1.1. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023, adalah sebesar Rp.660.305.828.331,38 atau 89,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.739.061.013.474,00. Terdiri dari:

- Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp.604.522.574.046,38 atau 91,47% dari target sebesar Rp.660.865.761.364,00.
- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.55.656.116.165,00 atau 71,87% dari target sebesar Rp.77.445.252.110,00.
- Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp.127.138.120,00 atau 16,95% dari target sebesar Rp.750.000.000,00.

Rincian target anggaran dan realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada table 1.8 di bawah ini:

Tabel 1.8 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	BELANJA DAERAH	739.061.013.474,00	660.305.828.331,38
1.	BELANJA OPERASI	660.865.761.364,00	604.522.574.046,38
	Belanja Pegawai	332.624.607.143,00	318.673.012.683,00
	Belanja Barang dan Jasa	292.700.533.496,00	255.090.045.513,38
	Belanja Hibah	34.139.620.725,00	29.423.475.850,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.401.000.000,00	1.336.040.000,00
2.	BELANJA MODAL	77.445.252.110,00	55.656.116.165,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.768.075.644,00	17.957.069.026,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.170.843.166,00	9.642.986.118,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.004.890.600,00	24.794.018.381,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.924.371.900,00	2.719.770.540,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	577.070.800,00	542.272.100,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	750.000.000,00	127.138.120,00
	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	127.138.120,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
PemkoTebing Tinggi Tahun 2024

1.1.2. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.27.769.707.911,77 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan yang terdiri dari jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Rincian target anggaran dan realisasi per jenis pembiayaan daerah sebagaimana pada lampiran 1.9 dibawah ini.

Tabel 1.9 Tabel Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	PEMBIAYAAN DAERAH	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemko Tebing Tinggi Tahun 2024

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu yang pertama harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan yang diterima oleh daerah selama satu tahun anggaran. Dengan diketahuinya total pendapatan yang diperkirakan diterima selama satu tahun anggaran, maka setelah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan akan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan belanja atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana pendapatan daerah, maka daerah harus berupaya menutupi kekurangan (defisit) tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 285 menyatakan Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pendapatan transfer meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:
 - Dana perimbangan;
 - Dana Insentif Daerah (DID);
 - Dana Otonomi Khusus;
 - Dana Keistimewaan; dan
 - Dana Desa.

b. Transfer antar daerah, terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil;
- Bantuan Keuangan;

3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi:

- a. Hibah;
- b. Dana Darurat; dan/atau
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih didominasi dari Dana Perimbangan yang tergabung dalam jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus. DTU bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan Dana Transfer Khusus bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik selain DID.

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
2. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
3. Cukai hasil tembakau.

DBH bersumber dari Sumber Daya alam (SDA) terdiri dari:

1. Bagi hasil penerimaan kehutanan yang berasal dari provisi sumber daya hutan;
2. Bagi hasil penerimaan pertambangan mineral dan batubara;
3. Bagi hasil penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi;
4. Bagi hasil penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi;
5. Bagi hasil penerimaan dari panas bumi;
6. Bagi hasil penerimaan perikanan.

DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan netto dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang formula dan penghitungannya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional dan kegiatan khusus yang diusulkan daerah.

DID bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu oleh daerah. Kriteria tertentu DID tahun 2024 terdiri dari kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan perda APBD tepat waktu, penggunaan *e-procurement* dan penggunaan *e-budgeting*. Kategori kinerja terdiri dari kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (belanja modal Kesehatan, belanja modal Pendidikan dan kemandirian daerah), system informasi keuangan daerah, pengendalian inflasi daerah, pencegahan korupsi, pelayanan dasar publik bidang pendidikan (angka partisipasi murni dan peta mutu Pendidikan), pelayanan dasar publik bidang kesehatan (balita mendapatkan imunisasi lengkap, penanganan balita *stunting* dan persalinan di fasilitas kesehatan), pelayanan dasar publik bidang infrastruktur (akses sanitasi layak dan sumber air minum layak), kesejahteraan masyarakat (indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka pengangguran dan penurunan penduduk miskin), pelayanan umum pemerintahan (inovasi pelayanan publik, inovasi pemerintahan daerah, penghargaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), peningkatan ekspor, peningkatan investasi dan pengelolaan sampah.

Jenis pendapatan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dan bantuan keuangan. Bagi hasil pajak dari provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan terdiri dari pendapatan hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari hasil analisa trend sumber-sumber pendapatan daerah, proporsi terbesar pendapatan daerah bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat, PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kondisi ini menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan masih sangat tergantung kepada dana transfer Pemerintah Pusat. Untuk itu strategi yang perlu dioptimalkan adalah meningkatkan koordinasi terhadap sumber-sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari kementerian dan lembaga di tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kota telah melakukan kebijakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi PAD, dilakukan dengan cara:

1. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran.
2. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk pelaksanaan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi secara non tunai melalui kanal pembayaran perbankan (teller, ATM, mobile banking, agen bank), kanal e-commerce (Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Indomaret, Payfazz, dan lain-lain), kanal e-wallet (Gopay, Linkaja dan OVO) dan kanal QRIS (Quick Respon Code Indonesian Standar).

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparaturnya dan pihak ketiga.
4. Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Mengadakan pendekatan persuasif melalui penyuluhan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya.
6. Pendataan objek pajak dan retribusi daerah.
7. Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.
8. Peningkatan kualitas SDM aparaturnya bidang pendapatan.
9. Pembuatan data base potensi sumber PAD dan peningkatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada aplikasi e-SPTPD, Simpatda, Sismiop dan lain-lain.
10. Kegiatan kerja sama dengan kejaksaan negeri Kota Tebing Tinggi dalam hal penagihan piutang pajak (pemberian surat kuasa khusus).
11. Kegiatan pemasangan alat rekam transaksi (tapping box) kepada wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel guna membantu wajib pajak dalam pengenaan pajak pada setiap periode pembayaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi pada APBD Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp.711.291.305.562,00, anggaran belanja sebesar Rp.739.061.013.474,00, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 27.769.707.912,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.0,-.

2.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi pada APBD Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 711.291.305.562,00 anggaran belanja sebesar Rp. 739.061.013.474,00.

Tabel 2. 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
4	PENDAPATAN	711.291.305.562,00
4.1	PAD	110.684.002.014,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	40.970.740.000,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	43.578.674.970,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	12.741.232.544,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	13.393.354.500,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	592.594.622.548,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	534.834.695.961,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	534.834.695.961,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.759.926.587,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.759.926.587,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	8.012.681.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.012.681.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.012.681.000,00

Target Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.711.291.305.562,00 direalisasikan sebesar Rp.650.856.063.699,00 terdiri dari: PAD terealisasi sebesar Rp.93.063.298.612,00 atau 84,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.110.684.002.014,00. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.549.428.253.185,00 atau 92,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.592.594.622.548,00.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp.8.364.511.902,00 atau 104,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.8.012.681.000,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Rek	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
4	PENDAPATAN	711.291.305.562,00	650.856.063.699,00	60.435.241.863,00	91,50
4.1	PAD	110.684.002.014,00	93.063.298.612,00	17.620.703.402,00	84,08
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	40.970.740.000,00	38.344.123.228,00	-2.626.616.772,00	93,59
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	43.578.674.970,00	37.261.716.387,00	-6.316.958.583,00	85,50
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.741.232.544,00	12.741.232.544,00	0	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	13.393.354.500,00	4.716.226.453,00	-8.677.128.047,00	35,21
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	592.594.622.548,00	549.428.253.185,00	43.166.369.363,00	92,72
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	534.834.695.961,00	517.004.550.330,00	17.830.145.631,00	96,67
4.2.01.01	Dana Perimbangan	534.834.695.961,00	517.004.550.330,00	17.830.145.631,00	96,67
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	-	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.759.926.587,00	32.423.702.855,00	25.336.223.732,00	56,14
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.759.926.587,00	32.423.702.855,00	20.336.223.732,00	61,46
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	0,00	-5.000.000.000,00	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00	351.830.902,00	104,39
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00	351.830.902,00	104,39
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00	351.830.902,00	104,39

1. PAD

Realisasi PAD secara keseluruhan berjumlah Rp.93.063.298.612,00 dan apabila dibandingkan dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp.650.856.063.699,00 maka kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada mencapai sebesar 14,29% . Berbagai faktor pendukung turut mempengaruhi tingkat pencapaian target PAD antara lain faktor kebijakan seperti upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah,

faktor kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kewajibannya membayar pungutan daerah serta upaya yang optimal para aparat terkait dalam rangka pengamanan target PAD yang ditetapkan.

a. Pajak Daerah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 seperti tampak pada Tabel 2.2 berjumlah Rp.38.344.123.228,00 atau 93,59% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.40.970.740.000,00 sehingga kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD sekitar 41,20% .

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD, dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi atau badan, baik bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.37.261.716.387,00 atau 85,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.43.578.674.970,00 sehingga bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD, maka kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap PAD mencapai 40,03%.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 realisasinya sebesar Rp.12.741.232.544,00 dari target penerimaan Rp.12.741.232.544,00 atau 100% . Kontribusi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Tahun Anggaran 2024 mencapai 13,69%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi jenis Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.4.716.226.453,00 atau 35,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.13.393.354.500,00. Dengan demikian apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD maka kontribusinya terhadap PAD mencapai 5,06%.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp.549.428.253.185,00 dan apabila dibandingkan dengan total realisasi Pendapatan sebesar Rp.650.856.063.699,00, maka kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah mencapai 84,41% . Pend apatan transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp.517.004.550.330,00 atau sebesar 96,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.534.834.695.961,00.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi terealisasi sebesar Rp.32.423.702.855,00 atau 56,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.57.759.926.587,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan dari kelompok ini secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp.8.364.511.902,00 atau 104,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.8.012.681.000,00 dan apabila dibandingkan dengan total realisasi Pendapatan pada APBD sebesar Rp.650.856.063.699,00 maka kontribusi Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun ini mencapai 1,28% . Lain -Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan kententuan perundang-undangan terealisasi sebesar Rp.8.364.511.902,00 atau sebesar 104,39% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.012.681.000,00.

2.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Menguatnya peran PAD dalam struktur penerimaan daerah akan mencerminkan kemandirian daerah dalam mendanai urusan rumah tangganya sesuai semangat Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun upaya penguatan peran PAD tersebut membutuhkan suatu perencanaan strategis baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang secara sistematis dan terprogram dengan melibatkan segenap instansi terkait, mengingat realisasi pada saat ini kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah masih sangat kecil, hanya 14,29% .

Kondisi demikian disebabkan faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut ini:

1. Potensi PAD Kota Tebing Tinggi perlu dikaji dengan meningkatkan inovasi baru;
2. SDM pengelola PAD masih rendah dan perlu di berdayakan;
3. Perubahan tarif pajak retribusi belum terlaksana secara komprehensif;
4. Kesadaran wajib pajak/retribusi masih rendah untuk membayarkan ke kas daerah/ bank.

Upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Perlu mengakses kembali data base potensi pajak/ retribusi yang sesuaikan kondisi per 31 Desember 2024;
2. SDM yang ada saat ini dilatih sesuai kompetensi yang bersangkutan terhadap pengelolaan PAD;
3. SKPD terkait menyajikan perubahan/ revisi tarif pajak/ retribusi yang disesuaikan dengan kondisi keuangan masyarakat;
4. SKPD pengelola PAD secara rutin tetap melakukan sosialisasi untuk taat pembayaran pajak/ retribusi kepada wajib pajak;
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan online di semua penerimaan daerah/ PAD, pajak dan retribusi dengan mekanisme non tunai.

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga dan pelayanan umum minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat. Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Selain itu bahwa pemerintah daerah juga dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang sekurang-kurangnya mengatur tentang:

1. Persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman.
2. Penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD.
3. Pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.
4. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

5. Persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi.
6. Pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian resiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

Walaupun dimungkinkan pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman, namun bukan satu-satunya solusi terbaik untuk memperoleh sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah, dan pinjaman daerah hanya merupakan alternatif terakhir yang harus dilakukan apabila sudah tidak ada cara lain untuk memperoleh sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.

Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Daerah. Penyertaan modal dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihaklain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bersumber dari: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA).

2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Daerah, telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh, yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk mendanai rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/ objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dasar dalam disiplin anggaran yang perlu diperhitungkan antara lain:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang di anggarakan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

4. Keadilan Anggaran

Pajak Daerah, retribusi Daerah dan pungutan Daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi, berimbang dengan penghasilannya. Mengenai kebijakan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan, agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

5. Efisien dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisien dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan: Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai, Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.660.305.828.331,38 atau 89,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.739.061.013.474,00 terdiri atas:

- Pengeluaran Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp.604.522.574.046,38 atau 91,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.660.865.761.364,00.

- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.55.656.116.165,00 atau 71,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.77.445.252.110,00

- Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp.127.138.120,00 atau 16,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.750.000.000,00.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
5	BELANJA DAERAH	739.061.013.474,00	660.305.828.331,38	-78.755.185.142,62	89,34
5.1	BELANJA OPERASI	660.865.761.364,00	604.522.574.046,38	-56.343.187.317,62	91,47
5.1.01	Belanja Pegawai	332.624.607.143,00	318.673.012.683,00	-13.951.594.460,00	95,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.700.533.496,00	255.090.045.513,38	-37.610.487.982,62	87,15
5.1.05	Belanja Hibah	34.139.620.725,00	29.423.475.850,00	-4.716.144.875,00	86,19
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.401.000.000,00	1.336.040.000,00	-64.960.000,00	95,36
5.2	BELANJA MODAL	77.445.252.110,00	55.656.116.165,00	-21.789.135.945,00	71,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.768.075.644,00	17.957.069.026,00	-17.811.006.618,00	50,20
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.170.843.166,00	9.642.986.118,00	-527.857.048,00	94,81
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.004.890.600,00	24.794.018.381,00	-210.872.219,00	99,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.924.371.900,00	2.719.770.540,00	-3.204.601.360,00	45,91
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	577.070.800,00	542.272.100,00	-34.798.700,00	93,97
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	750.000.000,00	127.138.120,00	-622.861.880,00	16,95
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	127.138.120,00	-622.861.880,00	16,95

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.604.522.574.046,38 bila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran belanja daerah dalam APBD sebesar Rp.660.305.828.331,38 maka penyerapan pengeluaran belanja operasi ini terhadap total belanja daerah mencapai 91,55% yang digunakan untuk pengeluaran:

a. Belanja Pegawai

Realisasi pengeluaran belanja pegawai seperti tampak pada Tabel 3.3 sebesar Rp.318.673.012.683,00 atau 95,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.332.624.607.143,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pengeluaran belanja pegawai terhadap belanja operasi mencapai 52,71%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi pengeluaran belanja barang dan jasa mencapai sebesar Rp.255.090.045.513,38 atau 87,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.292.700.533.496,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2024 penyerapan pengeluaran belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi mencapai 42,19%.

c. Belanja Hibah

Realisasi pengeluaran belanja hibah mencapai sebesar Rp.29.423.475.850,00 atau 86,19% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.34.139.620.725,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2024 penyerapan pengeluaran belanja hibah terhadap belanja operasi mencapai 4,86%.

d. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi pengeluaran Belanja Bantuan Sosial mencapai sebesar Rp.1.336.040.000,00 atau 95,36% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.401.000.000,00 sehingga pada APBD Tahun anggaran 2024 penyerapan belanja bantuan sosial terhadap belanja operasi mencapai 0,22%.

2. Belanja Modal

Realisasi pengeluaran belanja modal sebesar Rp.55.656.116.165,00 atau 71,87% dari target Rp.77.445.252.110,00 maka penyerapan pengeluaran belanja modal ini terhadap total belanja sekitar 8,42% yang dipergunakan untuk pengeluaran:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.17.957.069.026,00 atau 50,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.35.768.075.644,00 bila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran belanja modal maka penyerapan pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin ini terhadap belanja modal mencapai sekitar 32,26%.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan

sebesar Rp.9.642.986.118,00 atau 94,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 10.170.843.166,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2024 penyerapan pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan ini terhadap belanja modal mencapai 17,32%.

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Pengeluaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.24.794.018.381,00 atau 99,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.25.004.890.600,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2024 penyerapan pengeluaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi terhadap belanja modal mencapai 44,54%.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.2.719.770.540,00 atau 45,91% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.5.924.371.900,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2024 penyerapan pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya terhadap belanja modal mencapai 4,88%.

e. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Pengeluaran belanja modal aset lainnya sebesar Rp.542.272.100,00 atau 93,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.577.070.800,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2024 penyerapan pengeluaran belanja modal aset lainnya terhadap belanja modal mencapai 0,97%.

3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi pengeluaran belanja tidak terduga sebesar Rp.127.138.120,00 atau 16,95% dari target Rp.750.000.000,00 maka dalam APBD tahun 2024 penyerapan pengeluaran belanja tidak terduga terhadap total belanja sekitar 0.02%.

2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana ditetapkan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah; dan
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih terdapat beberapa Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran yang masih mengabaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya tentang batas waktu penyampaian laporan, hal tersebut akan berakibat pada Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan. Padahal mekanisme yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah telah secara tegas memberikan petunjuk dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh para Pengguna Anggaran. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara teknis telah menggariskan kebijakan dan pengaturan yang baku tentang teknis dan prosedur pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang pada akhirnya bermuara pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai solusi mengatasi permasalahan diatas antara lain telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan dan sebagainya, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta disiplin dari para pejabat Pengelola dan Penatausahaan Keuangan di Daerah, namun masih perlu menumbuhkembangkan atau membangun kesadaran yang tinggi bagi segenap pejabat pengelola keuangan daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, mengingat hampir semua pengaturan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah mulai Tahun Anggaran 2020 sepenuhnya mengacu pada ketentuan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan daerah harus dimuat di dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD). Adapun regulasi pemerintah tentang pembiayaan ada pada PP 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.27.769.707.911,77 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.27.769.707.911,77 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024 tidak ada target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang dianggarkan pada APBD TA. 2024 sebesar Rp.27.769.707.911,77 yang sebagian besar berasal dari penghematan dan sisa kegiatan yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2023 dan telah diprogramkan kembali dalam bentuk kegiatan

pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pembiayaan berikut:

Tabel 2.4.
Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	-0,23	100
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	-0,23	100
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	-0,23	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	-0,23	100

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah memberikan pedoman klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintahan Kota Tebing Tinggi melaksanakan 38 (tiga puluh delapan) Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari atas 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 5 (lima) Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Kewilayahan, 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum. Rincian Urusan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Urusan Pemerintahan Daerah

	URUSAN PEMERINTAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.1	Pendidikan
1.2	Kesehatan
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.5	Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.6	Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.7	Tenaga Kerja
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.9	Pangan
2.10	Pertanahan
2.11	Lingkungan Hidup
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	Perhubungan

2.16	Komunikasi dan Informatika
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	Penanaman Modal
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga
2.20	Statistik
2.21	Persandian
2.22	Kebudayaan
2.23	Perpustakaan
2.23	Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25	Kelautan dan Perikanan
3.26	Pariwisata
3.27	Pertanian
3.30	Perdagangan
3.31	Perindustrian
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.1	Sekretariat Daerah
4.2	Sekretariat Dewan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.1	Perencanaan
5.2	Keuangan
5.3	Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
5.5	Penelitian dan Pengembangan
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.1	Inspektorat Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN
7.1	Kecamatan
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

❖ PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.1 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6. Program Pembinaan Sejarah
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8. Program Pengelolaan Permuseuman

Realisasi Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

1) Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Tabel 3.1.2
Indikator Urusan Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan	Capaian 2023	Target 2023	Capaian 2024	Target 2024
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	75,66	100,00	75,66	100,00
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99,68	100,00	99,68	100,00
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	9,54	100,00	9,54	100,00
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	62,28	56,26	62,28	58,94
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	48,22	41,46	48,22	43,06
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	71,08	67,00	68,33	70,19
7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	63,29	66,36	52,22	68,91
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	34,74	35,59	34,74	35,62
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	79,12	79,18	79,12	80,38
10	Indeks Iklim Keamanan SD	73,81	73,30	69,76	76,84
11	Indeks Iklim Kebhinekaan SD	74,23	71,61	69,12	74,10
12	Indeks Inklusivitas SD	55,48	58,86	55,76	61,96
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	69,94	75,77	72,43	79,11
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	72,19	69,96	67,75	72,17
15	Indeks Inklusivitas SMP	56,70	58,68	55,58	61,78

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Pemerintahan bidang pendidikan Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah:

- A. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Realisasi Anggaran 40,06% Capaian sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah
- B. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP; Realisasi Anggaran 97,78%
Capaian sub kegiatan ini adalah dokumen RKA-SKPD
- C. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD; Realisasi Anggaran 95,65%
Capaian sub kegiatan ini adalah dokumen DPA-SKPD
- D. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD; Realisasi Anggaran 96,64% Capaian sub kegiatan ini adalah dokumen Perubahan DPA-SKPD
- E. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Realisasi Anggaran 69,96%
Capaian sub kegiatan ini adalah Laporan capaian kinerja
- F. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Realisasi Anggaran 70,52% Capaian sub kegiatan ini adalah dokumen evaluasi kinerja

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, adapun Sub Kegiatan adalah:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 96,32%
Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN dan tambahan penghasilan
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Realisasi Anggaran 0%
Capaian sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Realisasi Anggaran 83,59%
Capaian sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Realisasi Anggaran 72,72%
Capaian sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Realisasi Anggaran 80,18%
Capaian sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Realisasi Anggaran 42,42%
Capaian sub kegiatan ini adalah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD; Realisasi Anggaran 86,39%
Capaian sub kegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis; Realisasi Anggaran 97,03%
Capaian sub kegiatan ini adalah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adapun sub kegiatan adalah:

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 79,75%
Capaian sub kegiatan ini adalah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 92,76%
Capaian sub kegiatan ini adalah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 79,98% Capaian sub kegiatan ini adalah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD; Realisasi Anggaran 59,78%
Capaian sub kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; Realisasi Anggaran 50,36%
Capaian sub kegiatan ini adalah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; Realisasi Anggaran 93,8%
Capaian sub kegiatan ini adalah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 52,56%
Capaian sub kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adapun sub kegiatan adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai; Realisasi Anggaran 0
Capaian sub kegiatan ini adalah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Realisasi Anggaran 0 Capaian sub kegiatan ini adalah pakaian dinas
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; Realisasi Anggaran 0
Capaian sub kegiatan ini adalah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian; Realisasi Anggaran 0 Capaian sub kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Realisasi Anggaran 0
Capaian sub kegiatan ini adalah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; Realisasi Anggaran 0
Capaian sub kegiatan ini adalah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan
- g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; Realisasi Anggaran 100%
Capaian sub kegiatan ini adalah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adapun sub kegiatan adalah:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Realisasi Anggaran 58,79%
Sub kegiatan bertujuan untuk ketersediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor selama satu tahun.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Realisasi Anggaran 68,66%
Capaian sub kegiatan ini adalah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Realisasi Anggaran 65,72%
Capaian sub kegiatan ini adalah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Realisasi Anggaran 70,32%
Capaian sub kegiatan ini adalah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Realisasi Anggaran 82,66%
Capaian sub kegiatan ini adalah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Realisasi Anggaran 65,04%

Capaian sub kegiatan ini adalah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang Disediakan

- g. Fasilitas Kunjungan Tamu; Realisasi Anggaran 52,71%

Capaian sub kegiatan ini adalah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 99,96% Capaian sub kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD; Realisasi Anggaran 94,75

Capaian sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pengadaan Mebel; Realisasi Anggaran 86,52%

Sub kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya pengadaan mebel gedung kantor Dinas.

- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Realisasi Anggaran 87,09%

Sub kegiatan ini bertujuan terpenuhi keperluan alat atau mesin lainnya selama satu tahun. terdiri atas Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor, Pengadaan Plank Parkir dan Titik Kumpul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengadaan Rak Besi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengadaan Mesin Pompa Air dan Mesin Pemotong Rumput Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Realisasi Anggaran 78,44%

Sub kegiatan ini bertujuan terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Realisasi Anggaran 98,79

Sub kegiatan ini bertujuan Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adapun sub kegiatan adalah:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Realisasi Anggaran 72,61
Realisasi Sub kegiatan ini ; Realisasi Anggaran 98,10 % terdiri atas jasa surat menyurat selama satu tahun.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 79,82% Sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi jasa komunikasi, listrik , air satu tahun terdiri atas belanja listrik, air dan telepon, belanja modal peralatan jaringan, belanja kawat/faksmilie/internet/TV berlangganan.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 86,76%
Sub kegiatan ini bertujuan menyediakan Jasa pelayanan Umum Kantor satu tahun terdiri atas Jasa Kebersihan, tenaga layanan Administrasi dan Premi Asuransi Kesehatan, Kecelakaan Kerja Non PNSD.

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

- A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Realisasi Anggaran 83,05%
Sub kegiatan ini bertujuan menyediakan jasa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- B. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Realisasi Anggaran 73,59%
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya
- C. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini bertujuan untuk ketersediaan biaya pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya satu tahun, Realisasi Anggaran 99,55%

terdiri atas Biaya Service AC, genset pergantian suku cadang Komputer kantor.

D. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor., Realisasi Anggaran 99,55% terdiri atas pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor lainnya.

E. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor., Realisasi Anggaran 99,55% terdiri atas pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.

2. Pembangunan Ruang UKS

2.1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.

Sub Kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar (SD);

A. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah; Realisasi Anggaran 99,66%

- Pembangunan Ruang UKS (DAK) SD Negeri 164517, SD Swasta Plus An-Nur Mulia

B. Pembangunan Perpustakaan Sekolah; Realisasi Anggaran 98,01%

- Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK) SD Swasta Ma'Arif, SD Swasta Plus An-Nur Mulia

C. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Realisasi Anggaran 97,78%:

- Pembangunan Kamar Mandi Siswa SDN 164523
- Pemasangan Paving Block SDN 165729, SDN 165736, SDN 163080, SDN 163081, SDN 163091, SDN 165725, SDN 166323, SDN 166492, SDN 167648, SDN 167649
- Pembangunan pagar SDN 163082, SDN 165733, 163081, 163082, 163084, 163089, 163092, 164330, 164518, 164525, 165736, 166322, 166324, 168061.
- Pembangunan drainase SDN 163091, 165729

D. Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Guru, Kepala Sekolah, TU; Realisasi Anggaran 99.60%:

- Rehabilitasi ruang guru SDN 163081,164517 (DAK)
- E. Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang UKS; Realisasi Anggaran 99,25%:
- Rehabilitasi Ruang UKS SDN 163081 (DAK)
- F. Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Perpustakaan; Realisasi Anggaran 99,51%:
- Rehabilitasi Ruang perpustakaan SDN 165728 (DAK)
- G. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga; Realisasi Anggaran 99,45%
- Pengadaan papan tulis interaktif SD Negeri (DAU)
 - Pengadaan peralatan TIK SDN 163087, 163092, 164517, 157644, SD Swasta Katolik Asisi, SD Swasta Ma'Arif, Swasta Ostrom Methodist, Swasta Plus An Nur Mulia (DAK)
- H. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Realisasi Anggaran 46,44%
- I. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD; Realisasi Anggaran 67,53%
- J. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Realisasi Anggaran 64,77%
- K. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; Realisasi Anggaran
- L. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; Realisasi Anggaran 82,67%
- M. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar; Realisasi Anggaran 97,88%
- Pembangunan Ruang Laboratorium SDN 164517, SDN 167644 (DAK)
- N. Pembinaan Penggunaan TIK untuk Pendidikan; Realisasi Anggaran 52,25%
- O. Koordinasi, perencanaan, supervise dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan; Realisasi Anggaran 0
- P. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan; Realisasi Anggaran 69,86%
- Q. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Realisasi Anggaran 97,71%
- R. Rehabilitasi sedang/berta sarana, prasarana dan utilitas sekolah; Realisasi Anggaran 98,15%
- Rehabilitasi kamar mandi SDN 163082, 163092, 164521
 - Rehabilitasi ruang agama SDN 163089, 164518
 - Rehabilitasi ruang aula SDN 163084
- S. Bimbingan teknis, pelatihan dan /atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan; Realisasi Anggaran 67,18%

T. Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik; Realisasi Anggaran 36,07%

U. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah; Realisasi Anggaran 97,09%

- Rehabilitasi ruang kelas SDN 163081, 163082, 163084, 163085, 163088, 163091, 163092, 164330, 164518, 164523, 165719, 165720, 165722, 165726, 165730, 165736, 167645, 167648 (DAU)
- Rehabilitasi ruang kelas SDN 164517, 165728 (DAK)

2.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Adapun Sub Kejadiatannya sebagai berikut:

A. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah ; Realisasi Anggaran 98,85%

- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK) SMP Swasta IT Ar Rahman

B. Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah ; Realisasi Anggaran 99,50%

- Pembangunan ruang perpustakaan SMP Swasta IT Ar Rahman (DAK)

C. Pembangunan Laboratorium Sekolah; Realisasi Anggaran 99,04%:

- Pembangunan Ruang Lab IPA SMP Swasta IT Ar Rahman (DAK)

D. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Realisasi Anggaran 98,29%:

- Pembangunan Pagar SMP N 6

E. Rehabilitasi Sedang, Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Realisasi Anggaran 99,24%:

- Rehabilitasi Kamar Mandi SMP N 4 (DAK)
- Rehabilitasi Ruang BK SMP N 6 (DAU)

F. Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Realisasi Anggaran 12,45%

G. Penambahan daya listrik dan jasa instalasi SMP N 5, SMPN 6, dan SMPN 8

- Pemasangan jerjak besi ruang kelas SMPN 5, SMPN 7, SMPN 9

H. Perlengkapan Belajar Peserta Didik; Realisasi Anggaran 98,69%

- Perlengkapan dasar siswa

I. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga; Realisasi Anggaran 2,06%

- Pengadaan papan tulis interaktif SMP Negeri (DAU)

- Pengadaan Perlatan Laboratorium IPA SMPN 10, SMPN 1 (DAK)
- Pengadaan peralatan TIK SMP Swasta Budi Dharma, SMP Swasta Islam Terpadu Ar Rahman, SMP Swasta Katolik Cinta Kasih (HIBAH)
- J. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ; Realisasi Anggaran 38,29%
- K. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan SMP; Realisasi Anggaran 35,30%
- L. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah; Realisasi Anggaran 43,43%
- M. Pengelolaan dana BOS SMP;
- N. Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP; Realisasi Anggaran 45,42%
- O. Pembinaan penggunaan TIK untuk Pendidikan; Realisasi Anggaran 18,16%
- P. Koordinasi, perencanaan, siupervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan; Realisasi Anggaran 0%
- Q. Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan; Realisasi Anggaran 50,77%
- R. Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik; Realisasi Anggaran 31,87%
- S. Pengadaan perlengkapan peserta didik; Realisasi Anggaran 95,67%

2.3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan sub kegiatan

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Realisasi Anggaran 99,57%
 - Pembangunan Area Bermain TK Swasta Qurrata Ayun (DAK)
 - Pembangunan Ruang UKSTK Swasta Ameera Naufal (DAK), TK Swasta Qurrata Ayun (DAK)
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD; Realisasi Anggaran 98,52%
 - Rehab Kolam Renang di TKN Pembina Kota
3. Pengadaan Mebel PAUD; Realisasi Anggaran 97,58%
 - Pengadaan perbot ruang UKS TK Swasta ameera naufal, TIKS Qurrata ayun (DAK)
 - Pengadaan Mebel untuk ruang digital TK Pembina Kota, TK Bajenis

4. Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD; Realisasi Anggaran 52,62%
5. Pengadaan Perlengkapan PAUD; Realisasi Anggaran 97,91%
6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD; Realisasi Anggaran 97,14%
 - Pengadaan APE TKS Qurrata Ayun (DAK)
 - Pengadaan APE Luar pada TK Swasta Qurrata Ayun (DAK)
 - Alat peraga untuk ruang digital di TKN Pembina Kota
7. Penyelenggaraan proses belajar PAUD; Realisasi Anggaran 0%
8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD; Realisasi Anggaran 76,68%
9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD; Realisasi Anggaran 44,90%
10. Pengelolaan Dana BOP PAUD; Realisasi Anggaran 99,69%
11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD; Realisasi Anggaran 55,77%
12. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan; Realisasi Anggaran 82,37%
13. Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan; Realisasi Anggaran 57,16%
14. Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/pkl untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan; Realisasi Anggaran 58,00%
15. Pengadaan perlengkapan peserta didik; Realisasi Anggaran 94,87%

2.4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan adapun sub kegiatan terdiri dari:

1. Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan; Realisasi Anggaran 58,25%
2. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan nonformal; Realisasi Anggaran 0%
3. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal; Realisasi Anggaran 0%;
4. Pengelolaan dana BOP Sekolah nonformal; Realisasi Anggaran 0%;
5. Pembinaan penggunaan TIK untuk pendidikan; Realisasi Anggaran 0%;

6. Koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan dibidang pendidikan; Realisasi Anggaran 0%;
7. Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/pkl untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan; Realisasi Anggaran 0%
8. Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik; Realisasi Anggaran 0%

2. Pengendalian Perizinan Pendidikan

1. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; Realisasi Anggaran 0%

❖ KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kota Tebing Tinggi kepada Walikota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian terhadap target (%)
			2024	2024	2024
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Prevalensi Stunting	2%	1.52%	131%
	2	Jumlah Kematian Ibu	3 orang	5 orang	60%
	3	Angka Kematian Bayi	8/1000 KH	6,7/1.000	119%
	4	Persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta/ Universal Health Coverage (UHC)	100 %	99,34%	99.34%
Meningkatnya angka kesembuhan terhadap penyakit	5	Persentase pencapaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular	85%	77,5%	91%
	6	Persentase pencapaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	80%	64%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari tabel 3.2 menunjukkan prevalensi balita stunting tahun 2024 ditargetkan sebesar 2 % dan terealisasi sebesar 1,52 % dengan capaian kinerja sebesar 131 %, hal ini menunjukkan keberhasilan dinas kesehatan dalam penanganan balita stunting. seyogya jumlah balita stunting ini semakin kecil semakin bagus capaian kinerja. Menurut UNICEF Balita Stunting adalah persentase anak – anak usia 0-59 bulan, dengan tinggi dibawah minus (stunting sedang dan berat) dan minustiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak. Cakupan ini diperoleh dari balita yang diukur ditemukan pada tahun 2024, yang datanya di peroleh oleh petugas gizi Puskesmas melalui pelacakan kasus ataupun pendataan pada saat Posyandu yang hasilnya disampaikan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan

Jumlah kematian ibu pada tahun 2024 sebanyak 5 orang dengan target yang ditetapkan sebanyak 3 orang, hal ini menunjukkan kegagalan Dinas Kesehatan dalam menekan jumlah kematian ibu. karena seyogyanya semakin tinggi jumlah ibu yang meninggal maka semakin jelek kinerja yang dicapai.

Pada Tahun 2024, indikator Angka kematian bayi ditargetkan sebanyak 8/1000 KH dan terealisasi sebesar 6,7/1000 KH ,hal ini menunjukkan bertambahnya jumlah bayi yang meninggal, Seyogya nya untuk indicator ini semakin rendah angka yang didapatkan maka menunjukkan keberhasilan capaian kinerja. Adapun bayi yang meninggal disini yaitu bayi yang meninggal pada saat melahirkan maupun bayi yang meninggal setelah melahirkan.

Persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta (UHC) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 99,34% dengan cakupan sebesar 99,34%. Dikarenakan kota Tebing Tinggi Tahun 2023 sudah UHC.

Persentase pencapaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 77,5 %. Hal ini menunjukkan kurangnya dinas kesehatan dalam penurunan penyakit menular (9TB, DBD, HIV, dll).

Persentase pencapaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 64%, hal ini menunjukkan rendahnya capaian penurunan penyakit tidak menular. adapun salah satu faktornya adalah Tidak semua masyarakat mau dilakukan skrining PTM, Beberapa yang diperiksa tidak membawa KTP sehingga tidak dapat diinput di aplikasi ASIK dan Kurangnya

petugas puskesmas dalam melakukan penginputan data di aplikasi ASIK.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Digunakan untuk belanja ATK, belanja kertas dan cover , belanja cetak, dan belanja makan minum kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.

Capaian: Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Bealisasi Kinerja SKPD

Digunakan untuk biaya belanja perjalanan dinas monitoring dan evaluasi JKN ke 9 Puskesmas setiap triwulan dan digunakan untuk belanja lembur pegawai subbag perencanaan dan keuangan dan subbag umum dan kepegawaian

Capaian : Terlaksanakan Bimtek BOK dan JKN di Puskesmas.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian kegiatan ini: Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Kesehatan, Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum selama 12 bulan

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Digunakan untuk belanja kertas, bahan cetak laporan keuangan, belanja makanan dan minuman rapat dalam penyusunan laporan keuangan

Capaian: laporan keuangan dapat tersusun tepat waktu dan dapat digunakan

1.3. Administrasi Umum perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Capaian : Tersedianya komponen bahan elektronik/listrik gedung seperti (baterai, bola lampu, cok, kabel, dll) untuk dinas kesehatan dan Instalasi Farmasi Kota.

1.3.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Capaian: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yaitu ATK dinas kesehatan, kertas, benda pos, tinta printer, belanja laptop, perabot kantor dan belanja kegiatan kantor lainnya.

1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Capaian : Terpenuhinya penyediaan alat perabot kantor Dinas Kesehatan dan IFK dan retribusi sampah dinas kesehatan selama 12 bulan

1.3.4. Penyediaan bahan logistic kantor

Capaian : Terpenuhinya makan minum rapat – rapat selama 12 bulan

1.3.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan seperti cetak stempel paraf, stempel disposisi, spanduk dan penggandaan laporan-laporan selama 12 bulan

1.3.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Capaian : Meningkatnya kapasitas aparatur serta terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Kesehatan

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kesehatan

Capaian kegiatan ini adalah Terbayarnya tagihan listrik dinas kesehatan, IFK dan Puskesmas dan belanja tagihan air dinas kesehatan dan Puskesmas

1.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan administrasi di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Digunakan untuk belanja jasa tenaga kesehatan medis 4 orang, petugas fisioterapi 2 orang, belanja jasa pengadministrasian kantor 20 orang, belanja jasa tenaga operator komputer 16 orang, instalasi farmasi kota IFK Operator komputer 2 orang, belanja jasa petugas kebersihan Dinkes 3 orang, jasa petugas kebersihan IFK 1 orang, jasa petugas kebersihan puskesmas 9 orang, belanja jasa petugas keamanan IFK 1 orang , jasa petugas keamanan dinas kesehatan 3 orang , jasa petugas keamanan puskesmas 9 orang , belanja jasa supir ambulans puskesmas 9 orang, jasa supir kadis dan kendaraan ambulance 2 orang dan jasa petugas medis 2 mal pelayanan publik, belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN premi BPJS Kesehatan 83 orang selama 12 bulan, belanja iuran

jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Premi BPJS ketenagakerjaan 83 orang kali 12 bulan

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusasn Pemerintahan Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Capaian : Tersedianya belanja suku cadang kendaraan dinas sebanyak 12 mobil dinas kesehatan, belanja pembayaran pajak sebanyak 16 mobil Dinas Kesehatan dan Puskesmas, belanja iuran jaminan/asuransi sebanyak 16 mobil Dinas Kesehatan dan puskesmas, belanja pemeliharaan /perbaikan kendaraan dinas sebanyak mobil milik Dinas Kesehatan

1.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya

Capaian : Digunakan untuk Asuransi gedung kantor

1.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Capaian Kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan AC split 32 unit, Biaya pemeliharaan service Komputer/notebook/laptop, biaya service peralatan kantor IFK dan biaya pemeliharaan printer Dinas Kesehatan selama 1 tahun

2. Program Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1. Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi pustu karya jaya

2.1.2. Pengadaan obat dan vaksin

Capaian kegiatan ini adalah terpenuhinya obat-obatan di Puskesmas dan jaringannya selama 12 bulan

2.1.3. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Capaian : Tersedianya Bahan Habis Pakai di fasilitas kesehatan selama 12 bulan

2.2. Penyediaan layanan kesehatan Untuk UKM Dan UKT Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota

2.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Digunakan untuk belanja bahan cetak, belanja makan minum rapat, honor narasumber dan biaya perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan penguatan pelayanan kesehatan ibu hamil, sosialisasi optimalisasi pelaksanaan IMD dan ASI eksklusif bagi masyarakat, workshop bagi pendamping ASI eksklusif, pendampingan ASI Eksklusif, belanja perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan rapat pembentukan, evaluasi jejaring skrining layak hamil, ANC dan stunting dan belanja sewa gedung kegiatan sosialisasi optimalisasi pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif bagi masyarakat

Capaian : ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebanyak 2.846 orang

2.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian : ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebanyak 2.554 orang

2.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir

Digunakan untuk belanja cetak, makan minum rapat, honor narasumber, biaya perjalanan dinas dalam kota kegiatan workshop skrining bayi baru lahir, belanja perjalanan dinas biasa pembelajaran pelayanan skrining kesehatan bayi baru lahir

Capaian : Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebanyak 2.559 orang (99,05%)

2.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian : Anak Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebanyak 9.125 orang

2.2.5. Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Digunakan untuk belanja alcohol swab, belanja reagensia golongan darah, dan hb meter untuk pelayanan kesehatan calon pengantin

Capaian : Masyarakat pada usia produktif medapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 35.475 orang (31%)

2.2.6. Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Kegiatan tidak dilaksanakan

Capaian : Masyarakat usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 1570 orang (67%)

2.2.7. Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Digunakan untuk biaya ATK, kertas, cetak, honor dan narasumber, alat kantor lainnya, makan minum rapat untuk kegiatan sosialisasi hipertensi bagi Masyarakat dan transport peserta non PNSD sebanyak 100 orang

Capaian : Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 8.424 orang (21%)

2.2.8. Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Digunakan untuk belanja alkohol swab, blood lancet dan glucosa test strip dan belanja ATK, kertas, cetak, alat kantor lainnya, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan seminar pengelolaan pre- diabetes di FKTP

Capaian : Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 2.282 (65%)

2.2.9. Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis

Digunakan untuk belanja ATK, kertas dan cover, belnja flasdish dan tinta, plakat dan tas, belanja natura dan pakan natura, honor narasumber, belanja perjalanan dinas biasa , biaya perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan monitoring dan evaluasi penyakit TBC dan kegiatan sosialisasi penyakit TBC bagi masyarakat dan belanja pembelian susu pasien TB

Capaian: Penderita terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebanyak 2.282 orang (68,61%)

2.2.10. Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Digunakan untuk belanja ATK, cetak, tinta printer, alat kantor lainnya, honor narasumber, belanja makan minum rapat dan honor narasumber pada kegiatan sosialisasi penyakit HIV-AIDS bagi anak SMP dan SMA

Capaian : Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebanyak 5.641 orang

2.2.11. Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Digunakan untuk belanja makan minum rapat pada kegiatan pertemuan intervensi spesifik stunting dan rapat pelayanan gizi masyarakat, honor

narasumber dan biaya perjalanan dinas biasa kegiatan intervensi spesifik stunting, dan biaya perjalanan dinas dalam kota kegiatan bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi di Puskesmas

Capaian: Balita kurus/stunting mendapatkan makanan tambahan terlaksananya pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil

2.2.12. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan

Digunakan untuk belanja ATK, cetak, makan minum rapat, honor narasumber, belanja perjalanan dinas biasa kegiatan pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes.

2.2.13. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Digunakan untuk belanja cetak, belanja makan minum rapat, honor narasumber, sewa sound system, sewa kursi kegiatan pelaksanaan gerakan cegah stunting, aksi bergizi, bumil sehat, jambora kader, aktivitas posyandu, vaksinasi bersama mitra dan kegiatan pelaksanaan gerakan pengendalian penyakit prioritas.

2.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMKJ)

Digunakan untuk belanja ATK, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja benda pos, bahan kantor lainnya, belanja natura dan pakan natura, honor narasumber dan belanja perjalanan dinas pada kegiatan pada kegiatan orientasi upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa bagi petugas puskesmas dan kegiatan pertemuan monitoring dan evaluasi program kesehatan jiwa

Capaian : Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMKJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 238 orang (98,76%)

2.2.15. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Digunakan untuk belanja bahan bakar kegiatan P3K, belanja fasilitas siaga P3K belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota kegiatan P3K dan pelayanan kesehatan sunat massal

Capaian : Terlaksananya P3K hari natal dan tahun baru, hari raya idul fitri

2.2.16. Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Digunakan untuk biaya bahan bakar minyak untuk fogging, belanja ATK kegiatan, belanja cetak, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak,

belanja bahan komputer, belanja makan minum rapat, honor narasumber pada kegiatan pelatihan petugas TB, Pertemuan monitoring dan evaluasi program PTM, Sosialisasi kesehatan haji, validasi data hasil cakupan imunisasi, belanja jasa tenaga kesehatan pemeriksaan kesehatan haji, belanja jasa petga fogging sebanyak 3 orang selama 12 bulan, pembayaran premi BPJS Kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan petugas fogging, belanja jasa pemeriksaan sampel SHK dan biaya pengiriman sampel SHK

Capaian : Terlaksananya pemberantasan penyakit menular dan tidak menular DBD, TBC, Hepatitis, Diare dan Tifoid, Ispa/Pneumonia,

2.2.17. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Digunakan untuk pembayaran Premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan untuk belanja kapitasi JKN Puskesmas

Capaian : Terbayarnya premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat dan untuk belanja kapitasi JKN Puskesmas selama 12 bulan

2.2.18. Penyelenggaraan kabupaten/Kota Sehat

Digunakan untuk belanja bahan cetak dan belanja makan minum dan biaya perjalanan dinas kegiatan rapat forum kota sehat, belanja honor narasumber dan sewa gedung kegiatan rapat penguatan tim Pembina dan Lembaga forum Kota Sehat honor timpelaksana kegiatan kota sehat, biaya jasa tenaga administrasi kota sehat sebanyak 2 orang selama 12 bulan, pe,bayaran premi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan jasa tenaga administasi kota sehat, biaya perjalanan dinas biasa dalam rangka mengikuti kegiatan summit kota sehat

Capaian : 35 Kelurahan di Kota Tebing Tinggi Telah melaksanakan program kota Sehat

2.2.19. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah

Digunakan untuk belanja ATK kegiatan, belanja kertas dan cover, belnja bahan belnja tinta untuk kegiatan Penyelidikan Epidemiology, honor moderator dan narasumber ,sewa gedung kegiatan pertemuan kewaspadaan dini penyakit emerging dan penyakit berpotensi KLB, biaya pejalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota

2.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

2.3.1. Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan

Digunakan untuk belanja kertas dan cetak cover, belanja bahan cetak, belanja natura dan pakan natura, , dan belanja jasa input data profil kesehatan sebanyak 6 orang Capaian : Tersedianya data dan informasi Kesehatan (profil kesehatan tahun 2024 data tahun 2023)

2.3.2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Digunakan untuk belanja kertas, belanja bahan cetak, belanja tas, belanja natura dan pakan natura kegiatan rapat koordinasi persiapan pembentukan BLUD Puskesmas se kota Tebing Tinggi, belanja paket fullday kegiatan workshop tata kelola BLUD puskesmas, honor narasumber, honor moderator, uang transport kegiatan workshop tata kelola BLUD puskesmas

Capaian : Meningkatkan manajemen sistem informasi kesehatan

2.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.4.1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Digunakan untuk belanja kertas dan cover, cetak dan belanja pakan dan pakan natura kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.1. Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota

3.1.1. Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Digunakan untuk belanja ATK kegiatan, belanja cetak, belanja amplop dan map kancing, belanja makan minum kegiatan, honor narasumber/moderator, belanja petugas pencatatan dan pelaporan, belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota kegiatan pengelolaan data SDMK dan kegiatan perencanaan SDMK

Capaian : Meningkatnya kapasitas aparatur serta terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Kesehatan

3.2. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Dsumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Digunakan untuk belanja ATK, belanja kertas dan cover, belanja cetak,

belanja materai, , belanja pakan natura, honor narasumber, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan bimtek penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu pengangkatan pertama

Capaian : Terpilihnya tenaga kesehatan teladan

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

4.1.1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, belanja map jepit plastik, belanja natura dan pakan natura, honor narasumber, belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan efektifitas pengawasan obat difasilitas kefarmasian dan sarana produksi UMOT melalui pengkajian izin fasilitas pelayanan kefarmasia oleh kabupaten/kota

4.2. Penerbitan Sertifikat produksi pangan Industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4.2.1. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Dan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga

Digunakan untuk belanja ATK, belanja cetak, belanja bahan kantor lainnya, belanja makan minum rapat dan honor narasumber

Capaian: Meningkatnya keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga yang beredar

4.3. Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga

4.3.1. Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan

Digunakan untuk belanja ATK, belanja bahan cetak, belanja pakan natura untuk kegiatan bimbingan teknis kader keamanan pangan, biaya pengujian kualitas air sungai dan biaya perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota

Capaian : Meningkatnya efektivitas sistem pengawasan post market IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

5.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Digunakan untuk belanja ATK, cetak, map jepit plastik, belanja pakan natura, honor narasumber, Biaya perjalanan dinas dalam kota

Capaian : Terselenggaranya promosi kesehatan dalam rangka upaya meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat

5.2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Digunakan untuk belanja belanja cetak, belanja makan minum rapat (paket halfday kegiatan workshop kader posyandu dalam penyelenggaraan penimbngan,posyandu dan kunjungan rumah, honor narasumber, pembayaran jasa tenaga kesehatan (bidan magang) sebanyak 35 Orang selama 12 bulan, dan iuran jaminan kesehatan dan jaminan kematian bagi Non ASN sebanyak 35 orang dan biaya perjalanan dinas dalam kota

Capaian : Meningkatnya pengetahuan bidan kelurahan sebanyak 35 orang dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan disetiap kelurahan

5.3. Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Digunakan untuk belanja ATK kegiatan, belanja cetak, belanja bahan kegiatan kantor lainnya, belanja makan minum rapat, belanja jasa honorarium narasumber honor pembawa doa sebanyak 1 orang, belanja sewa soundsystem, sewa kursi dan biaya perjalanan biasa dan biaya perjalanan dinas dalam kota

Capaian: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

❖ PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebagai berikut :

- 2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Normalisasi/Restorasi Sungai
 - b. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai berikut :

- 3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - b. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebagai berikut :

- 4.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

- b. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala permukiman
- c. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- e. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- f. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagai berikut :

- 5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - c. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - d. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penataan Bangunan Gedung sebagai berikut :

- 6.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebagai berikut :

7.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

8. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebagai berikut :

8.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- a. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- b. Rehabilitasi Jalan
- c. Pemeliharaan Berkala Jalan
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai berikut :

9.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut :

10.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang

10.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Target dan Realisasi Kinerja yang disesuaikan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.4
Indikator Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	85%	59,92%	70,49%
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	90%	77.19%	85.77%
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) aman	11%	14%	140%
4	Drainase dalam kondisi baik	60%	63%	105%
5	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan	32%	23,43%	73,22%
6	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	38%	38%	100%
7	Persentase luasan daerah persawahan yang terlayani irigasi	100%	100%	100%
8	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	80%	80%	100%

Sumber: Dinas PUPR

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan - laporan perencanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian sub kegiatan ini tersedianya laporan - laporan rutin perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban aset dan keuangan, Renja, RKA, RKPA, DPA, DPPA sebagai kajian evaluasi kinerja.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian sub kegiatan ini tersedianya gaji dan tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara pada Dinas PUPR sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja premi asuransi gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Mesjid Agung Kota Tebing Tinggi, Asuransi Mobil Kepala Dinas sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya baju batik untuk Aparatur Sipil Negara dan tenaga kontrak pada Dinas PUPR sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian sub kegiatan ini tersedianya alat tulis kantor, materai, makanan dan minuman untuk kegiatan rapat agar terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini tersedianya barang cetakan/dokumen yang digandakan sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah untuk meningkatkan koordinasi didalam dan luar daerah.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian sub kegiatan ini terpenuhi kebutuhan air, telepon, listrik dan internet sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja alat kebersihan dan bahan pembersih kantor, pembiayaan gaji, iuran BPJS kesehatan serta BPJS ketenagakerjaan tenaga kontrak sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja bahan bakar minyak, service dan penggantian suku cadang serta perpanjangan pajak kendaraan dinas, dum truk, becak pembersih dan kapal pemungut sampah agar tersedia kendaraan yang layak sebagai sarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan alat-alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dimana selama Tahun 2023 jumlah alat berat yang dipelihara sebanyak 3 unit, yaitu: excavator, dozer, dan vibro

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor seperti AC, Komputer, Laptop dan Printer yang berfungsi sebagai sarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah

a. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Capaian sub Kegiatan ini adalah lanjutan Pembangunan dinding penahan tanah di jalan bukit bandung kelurahan Lantau Laban di kota Tebing Tinggi.

b. Normalisasi/Restorasi Sungai

Capaian sub Kegiatan ini adalah Normalisasi Sungai Program Karya Bhakti Kodim 0204/DS

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota adalah :

a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Capaian sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IPA Tandean dan IPA Kutilang.

b. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Capaian sub kegiatan ini adalah Pengembangan Jaringan Perpipaan pada 14 Kelurahan: Rantau Laban, Sri Padang, Karya Jaya, Lalang, Tanjung Marulak, Tanjung Marulak Hilir, Mekar Sentosa, Bulian, Pelita, Pinang Mancung, Berohol, Tebing Tinggi, Tambangan, dan Tambangan Hulu.

IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah :

a. Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Capaian Sub kegiatan ini adalah Pembangunan Tangki Septik Individual Skala Perkotaan pada 8 Kelurahan : Rambung, Bandar Utama, Bulian, Teluk Karang, Berohol, Tebing Tinggi, Tambangan, dan Tambangan Hulu. Serta Peningkatan Halaman IPLT dan Lanjutan Peningkatan Pagar di IPLT.

b. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Capaian Sub Kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemeliharaan IPAL Kawasan di Kelurahan Badak Bejuang dan Mandailing.

c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Capaian Sub kegiatan ini adalah belanja rutin UPTD dan IPLT seperti belanja alat tulis kantor, belanja jasa tenaga administrasi pelayanan, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa pelayanan umum, tagihan listrik, perjalanan dinas dan sebagainya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD dan IPLT.

d. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji Jasa Petugas Tenaga Kontrak IPLT dan Iuran Jaminan/Asuransi Tenaga Kontrak IPLT.

e. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

Capaian Sub kegiatan ini adalah tersedianya Pakaian Dinas Petugas IPLT dan IPAL Kawasan beserta kelengkapannya.

f. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Capaian sub kegiatan ini adalah belanja Jasa Konsultansi Studi/Kajian untuk Kajian Teknis/Survei/Pengumpulan Data Strategi Sanitasi Kota Tebing Tinggi.

V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah

a. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

Capaian sub kegiatan ini adalah peningkatan saluran drainase jalan bukit tempurung kel. rantau laban dan Lanjutan Peningkatan Saluran Drainase Jalan Baja menuju Pembuangan Saluran Primer.

b. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Capaian sub kegiatan ini adalah Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin saluran drainase dan gorong-gorong se-Kota Tebing Tinggi.

c. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Capaian sub kegiatan ini adalah pembangunan saluran primer jalan syech beringin menuju saluran primer jalan baja dan lanjutan pembangunan saluran drainase jalan danau sentani di kelurahan lubuk baru.

d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Capaian Sub kegiatan ini adalah belanja rutin seperti gaji petugas pembersih saluran dan sungai Terampil dan Tak Terampil, peralatan kerja dan pakaian dinas petugas pembersih saluran dan sungai.

VI. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penataan Bangunan Gedung sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah :

a. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah Rehabilitasi Gedung Sawiyah, Gedung Balai Kartini, Gedung Balai Kota, Lanjutan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor BPKPD, Dinas PUPR dan Satpol PP, Pemeliharaan Gedung Olahraga (GOR) Asber Kota Tebing Tinggi dan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor se-Kota Tebing Tinggi.

b. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Sub Kegiatan ini adalah Lanjutan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mesjid Agung Kota Tebing Tinggi, Pembangunan Kantor Lurah Pinang Mancung Kec. Bajenis, Rehabilitasi Ruang Kerja Kantor Polres Tebing Tinggi, dan Lanjutan Pembangunan Aula Terbuka Kantor Camat Padang Hulu.

VII. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota adalah :

a. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja Honorarium Tim Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Alat Tulis Kantor, serta Perjalanan Dinas pada Kegiatan Bidang Tata Bangunan.

VIII. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

a. Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dan Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu.

b. Rehabilitasi Jalan

Capaian sub kegiatan ini adalah Rehabilitasi Jalan LKMD Kecamatan Bajenis.

c. Pemeliharaan Berkala Jalan

Capaian sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan Jalan dengan Perbaikan Base Setempat (Leveling) pada beberapa jalan Kota.

d. Pemeliharaan Rutin Jalan

Capaian sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan Rutin Jalan Sekota Tebing Tinggi Dengan Pelapisan Kembali (Overlay).

e. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Capaian sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota.

IX. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai berikut

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi adalah :

a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

Capaian sub kegiatan ini adalah terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk Lembaga di bidang Jasa Konstruksi.

X. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota adalah :

a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Capaian sub kegiatan ini adalah kegiatan Rapat Penetapan RTRW dan RTRR Kota Tebing Tinggi.

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang

Capaian sub kegiatan ini adalah Sosialisasi Peraturan terbaru di Bidang Penataan Ruang Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota adalah :

a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Capaian sub kegiatan ini adalah dilaksanakan nya Rapat Forum Penataan Ruang.

❖ PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan pada urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.1.2.** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1.** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2.** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3.** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1.** Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1.** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2.** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3.** Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4.** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5.** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1.** Pengadaan Mebel
 - 1.6.2.** Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1.** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2.** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1.** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan

2.1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

2.1.1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

2.2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

2.2.1. Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

3. Program Kawasan Permukiman

3.1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3.1.1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

3.1.2. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

3.2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3.2.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

4.1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan

5.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

5.1.2. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Menjadi Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,78%	97,10%	99,30%
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Menjadi Layak Huni	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	6,77%	7,20%	94,02%
3	Meningkatnya Cakupan Lingkungan yang sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	90%	65,18%	72,42%

Sumber: Dinas Perkimtah

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor seperti Kertas dan Cover, Bahan Cetak, belanja makanan dan minuman rapat,

honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, honorarium rohaniawan, belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan, belanja jasa tenaga operator komputer, serta belanja perjalanan dinas.

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor seperti Kertas dan Cover, Bahan Cetak, dan Bahan Komputer serta Belanja Lembur PNS.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan, serta insentif retribusi ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 32 orang untuk meningkatkan kinerja aparatur.

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor seperti Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Belanja Lembur pegawai.

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor seperti Kertas dan Cover, dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya.

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor seperti kertas dan cover, Bahan Cetak, Belanja Bahan untuk kegiatan kantor lainnya serta Belanja Lembur pegawai.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja pakaian batik traditional.

1.4. Kegiatan Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor seperti baterai jam, bola lampu, cok cabang, cok sambung dll supaya penerangan bangunan kantor tetap terjaga dengan baik.

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan alat untuk kebersihan kantor seperti cangkul, kain pel, pembersih kaca dan kamar mandi, tong sampah, retribusi sampah, dll supaya kebersihan kantor tetap terjaga dengan baik.

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja ATK, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer dan belanja paket/pengiriman.

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan bahan cetak seperti buku, fotocopy hvs, cetak karcis retribusi, surat tanda setoran, cetak spanduk banner dan juga spanduk biasa.

1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk pembiayaan transportasi dan akomodasi bagi PNS yang melaksanakan konsultasi/koordinasi kedalam atau keluar daerah supaya meningkatkan kapasitas aparatur serta terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi.

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Mebel

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk Belanja Modal lemari arsip besi dan kursi pejabat.

1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk Belanja Modal peralatan komputer seperti mouse dan komputer Pc.

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja bahan bakar dan pelumas, belanja tagihan air, tagihan listrik dan belanja kawat/ faksimili/ internet/ tv berlangganan guna mendukung kelancaran aktivitas/pekerjaan aparatur sehari-hari.

1.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja ATK, kertas dan cover, bahan komputer dan kegiatan kantor lainnya, belanja jasa administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN, belanja lembur dan belanja modal mesin hitung, guna meningkatkan kinerja pegawai Non PNS.

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan, belanja asuransi barang milik daerah dan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan adalah untuk belanja pengisian ulang tabung apar, belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja pemeliharaan alat pendingin, belanja pemeliharaan komputer, sehingga peralatan dan mesin dapat digunakan dalam kondisi baik.

2. Program Pengembangan Perumahan

1.1. Kegiatan Pendataan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1.1.1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk Belanja ATK, belanja makan dan minum dan belanja konsultasi non konstruksi sehingga menunjang tersedianya data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.

1.2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

1.2.1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja bahan bangunan dan konstruksi, belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja suku cadang angkutan, belanja suku cadang alat pertanian, belanja suku cadang alat bengkel, belanja suku cadang lainnya, belanja ATK, belanja kertas dan cover, belanja bahan computer, belanja perabot kantor, belanja alat listrik, belanja perlengkapan dinas, belanja untuk kegiatan kantor lainnya, belanja pipa-pipa plastic PVC, belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja tenaga administrasi, belanja tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, belanja tagihan listrik, jasa listrik kantor, gaji honor kantor, belanja lembur, belanja pemeliharaan alat kantor-rumah tangga, belanja pemeliharaan computer, belanja modal pompa, belanja modal peralatan tukang kayu, belanja modal alat ukur universal, belanja modal alat kantor lainnya, belanja modal mebel, belanja modal alat pendingin, belanja modal alat rumah tangga lainnya, belanja modal personal computer, belanja modal peralatan personal computer, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS sebanyak 37 orang sehingga menunjang tersedianya biaya pengelolaan Rusunawa.

3. Program Kawasan Permukiman

3.1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

3.1.1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja ATK, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja makan dan minum belanja jasa konsultasi konstruksi.

3.1.2. Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, dan belanja jasa konsultasi non konstruksi sehingga menunjang jumlah laporan survey penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh.

3.2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

3.2.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, Belanja Jasa untuk

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 2 org Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Belanja Bantuan Sosial perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 24 unit.

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

4.1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja konsultasi jasa survey dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan, dan Belanja Bantuan Sosial perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 15 unit.

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 5.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja bahan bakar dan pelumas, belanja bahan/bibit tanaman, alat listrik, alat kedokteran, alat bengkel, belanja perabot kantor, belanja perlengkapan dinas, Suku Cadang LPJU, Upah THL LPJU 6 orang, THL pemakaman 9 orang, tagihan listrik, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS 16 orang untuk menunjang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

- 5.2.1. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dan Pengembangan

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk Belanja ATK, bahan cetak, makan dan minum rapat, dan honorarium tim sebanyak 7 orang.

❖ **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SATPOL PP**

**1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan
Dalam Perjanjian Kinerja**

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.6.1
**Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi Tahun
2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	80%	83,7	104,62%
	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP

- Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 104,62% dari target 80% dan tersealisasi 83,7% ini menunjukkan kepuasan masyarakat atas kinerja Satpol. PP Kota Tebing Tinggi sangatlah baik.

- Capaian Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebesar 100% dari target 100% dan teralisasi 100% ini menunjukkan bahwa setiap aduan masyarakat tentang gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diselesaikan dengan baik.
Jumlah kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun 2024 adalah sebanyak 322 kasus yang terbagi dari 65 kasus pengaduan masyarakat dan 257 kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Trantibum dan semua terselesaikan dengan baik.
- Capaian Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda sebesar 100% dari target 100% dan teralisasi 100% ini menunjukkan bahwa setiap aduan masyarakat tentang pelanggaran Perda dapat diselesaikan dengan baik. Jumlah kasus pelanggaran Perda pada tahun 2024 adalah sebanyak 37 kasus dan semua terselesaikan dengan baik.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan urusan wajib bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota.

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS.

Capaian subkegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk 26 orang PNS.

1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.2.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya PDH dan PDL beserta atributnya untuk 26 orang PNS dan 76 orang tenaga honorer.

1.3 Administrasi umum perangkat daerah.

1.3.1 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

1.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa kelengkapan kebersihan.

1.3.3 Penyediaan bahan logistik kantor;

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik kantor berupa Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan.

1.3.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa spanduk dan baliho.

1.3.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa buku.

1.3.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya SPPD dalam dan luar daerah.

1.4 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

1.4.1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa Lemari Arsip Kayu sebanyak 3 unit, Komputer PC sebanyak 1 unit, Laptop sebanyak 2 unit, Printer sebanyak 2 unit.

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

1.4.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Capaian subkegiatan ini adalah terbayarkannya Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik.

1.4.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Capaian subkegiatan ini adalah terbayarkannya gaji dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tenaga honorer dengan rincian THL Satpol sebanyak 76 orang, Linmas 80 Orang.

1.5 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

1.5.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

Capaian subkegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas untuk kegiatan operasional dari BBM, Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Suku Cadang untuk 1 unit roda 6 (enam), 6 unit roda 4 (empat) dan 6 unit roda 2 (dua).

1.5.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

Capaian subkegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan labtop, printer, AC dan peralatan mesin lainnya.

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.1 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten / Kota.

2.1.1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;

Capaian subkegiatan ini adalah terselenggaranya patroli lapangan disekitaran Kota Tebing Tinggi setiap harinya.

2.1.2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

Capaian sub kegiatan ini adalah terselenggaranya Razia penertiban Perda berupa razia plank yang belum bayar pajak serta razia izin usaha, razia PSK di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan terbayarkannya uang lembur untuk 26 orang PNS.

2.2 Penegakan peraturan daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / Walikota.

2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota

Capaian sub kegiatan ini adalah terselenggaranya Sosilaisasi tentang Perda kepada para pelaku usaha di sekitar Kota Tebing Tinggi sebanyak 4 kali selama TA. 2024.

2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota;

Capaian sub kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan panwal2 penting dan pendataan usaha sebanyak 4 kegiatan pada TA. 2024..

2.2.3 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota.

Capaian subkegiatan ini adalah terselenggaranya razia rokok tanpa pita cukai (Illegal) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 kegiatan pada TA. 2024.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi memuat 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja. 1 sasaran strategis tersebut yaitu Meningkatkan Pencegahan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Proteksi Kebakaran, membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan dan peduli dalam Memberikan Pelayanan yang Prima. Kemudian untuk 3 indikator kinerja yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota dengan target 90%, Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan target 90% dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan target 90%. Dari indikator pertama Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota tercapai 100%. Selanjutnya sejalan dengan indikator pertama, indikator kedua tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran terealisasi 100% dan indikator ketiga Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran terealisasi 100%. Selanjutnya untuk mendukung tercapainya target, terdapat dua program yang diperjanjikan yaitu program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota dan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Jadi, untuk capaian program sudah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.6.2

Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.1.1. Penyediaan Gaji dan TunjanganASN.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 18 orang selama 12 bulan.

1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya bagi personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa sepatu dinas lapangan (PDL), baret dan dahrim untuk 56 orang dan 2 stel seragam PDU Damkar untuk Kepala Daerah dan Kepala Dinas lengkap dengan emblem, simbol, topi dan sepatu.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa alat-alat listrik yaitu Baterai Um-3 Ebs (R 6 S) 1,5V, Baterai Um-44 N (R03) 1,5V, Baterai Um-Zu (R 14 S) 1,5V, Bola Lampu, Bola Lampu Led Emergency, Cok Cabang, Cok Jantan, Cok Lubang, Cok Sambung, Double Stekker + Cok, Isolasi, Kabel Listrik, Lampu Ceiling Downlight Hld, Lampu Downlight, Lampu Emergency, Mcb 630 A, Paku Klem No.8, Saklar Double Tanam, Saklar Tunggal Timbul dan Test Pen.

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu Alat Pembersih Cuci Piring, Brus Kamar Mandi, Bulu Ayam (Kemoceng), Kain Pel, Keranjang Sampah Uk. Sedang, Keset Kain, Pembersih Cuci Piring Uk Besar, Pembersih Kaca, Pembersih Lantai, Pewangi Ruangan Elektrik (Set), Pewangi Ruangan Gantung, Pewangi Ruangan Spray, Sapu Lidi Pakai Gagang, Sapu Plastik, Serbet, Serok Sampah dan Tisu.

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Logistik Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu alat tulis kantor, kertas dan cover,

benda pos, bahan komputer, alat listrik, alat dan bahan kegiatan kantor lainnya, natura dan pakan natura, makan minum rapat serta makan dan minum aktivitas lapangan. Alat tulis kantor berupa amplop putih panjang, amplop putih pendek, anak heker no. 10, anak heker no. 3, binder klip no. 111, binder klip no. 155, binder klip no. 260, box arsip, buku agenda surat masuk/keluar isi 500 lembar, buku ekspedisi bergaris, cutter besi, gunting, heker no. 10, isi pulpen signo, kertas HVS A4, kertas HVS F4, kertas jeruk, kwitansi, lakban bening besar, lakban bening sedang, lakban hitam besar, lakban hitam kecil, lakban hitam sedang, lem povidol, map biasa, map jepit plastik, map kancing, map odner, map plastik lubang, mata pisau cutter, pelubang kertas besar, pelubang kertas sedang, pencabut heker, penghapus papan tulis, penghapus pensil, pensil 2B, post it, pulpen balliner, pulpen faster, pulpen signo, rautan, rol besi, spidol permanent, spidol white board, stabilo, tinta epson, tinta stempel, tipex dan plastik jilid. Natura dan pakan natura berupa air mineral, gula putih, kopi, teh celup, beras, minyak goreng dan susu kental manis. Makan dan minum rapat berupa snack. Makanan dan minuman aktivitas lapangan berupa nasi bungkus dan snack.

1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan yaitu Cetak Disposisi, Cetak Stop Map Bahan Ukuran Folio+Acco, Foto Copy Hvs, Spanduk Banner, Stempel, Stempel Legalisir dan Stempel Paraf Koordinasi.

1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah terselenggaranya perjalanan dinas guna melakukan Koordinasi dan Konsultasi baik di dalam daerah maupun keluar daerah.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Pengadaan Mebel

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya mebel untuk mendukung kinerja personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa lemari arsip sebanyak 3 unit.

1.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya untuk mendukung pekerjaan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa Nozzpro Pistol Grip Nozzle sebanyak 1 unit, Selang Pemadam Polyester Spesifikasi: 1,5”X20 Mtr sebanyak 4 unit, Selang Pemadam Polyester

Spesifikasi: 2,5”X20 Mtr sebanyak 2 unit.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk mendukung kelancaran pekerjaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa belanja tagihan air selama 12 bulan dan belanja tagihan listrik selama 12 bulan.

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor untuk mendukung pekerjaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa jasa tenaga pemadam kebakaran sebanyak 61 orang selama 12 bulan beserta premi BPJS Kesehatan dan premi BPJS Ketenagakerjaan.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 selama 1 tahun, asuransi kendaraan dinas selama 1 tahun, biaya pemeliharaan dan BBM kendaraan bermotor operasional roda 4 sebanyak 1 unit selama 1 tahun, biaya pemeliharaan dan BBM kendaraan bermotor Pejabat Eselon II selama selama 12 bulan, biaya pemeliharaan, BBM kendaraan bermotor operasional roda 6 sebanyak 6 unit selama 12 bulan dan BBM kendaraan Roda 3 sebanyak 1 unit.

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk mendukung pekerjaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa service dan perbaikan genset sebanyak 1 unit, service dan perbaikan AC split sebanyak 15 unit, service komputer/notebook/ laptop sebanyak 15 unit dan service printer sebanyak 10 unit.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah uang lembur untuk PNS golongan II, III dan IV.

2.1.2 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Capaian sub kegiatan ini adalah pembayaran diklat inspektur (200 JP) sebanyak 1 orang.

2.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

2.2.1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran di Kota Tebing Tinggi. Anggaran di sub kegiatan ini berisi transport pemeriksaan APAR untuk PNS dan non PNS sebanyak 6 orang selama 11 bulan sebanyak 2 grup.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

2.2.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Sosialisasi di sub kegiatan ini dilakukan sebanyak 35 kali dan difokuskan untuk masyarakat, pelajar, dharmawanita dan pedagang. Anggaran di sub kegiatan ini diperuntukkan untuk belanja bahan bakar dan pelumas berupa bio solar sebanyak 160 liter dan pertalite sebanyak 160 liter, pengisian ulang tabung APAR ukuran 3 kg sebanyak 60 tabung, cetak spanduk ukuran 1 x 6 sebanyak 1 buah, handuk besar ukuran 70 x 135 sebanyak 4 buah, kualu ukuran 38 cm sebanyak 1 buah, belanja makan dan minum rapat terdiri dari minuman rapat ukuran 600ml sebanyak 600 botol dan snack sebanyak 300 kotak, belanja honorarium yang terdiri dari honorarium narasumber sebanyak 2 orang di 35 kelurahan, drum air ukuran 120 liter sebanyak 3 unit, kompor gas 1 tungku sebanyak 1 unit, regulator gas sebanyak 1 set, tabung gas 3 kg sebanyak 2 tabung.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target pada Perjanjian Kinerja sebesar 150 orang untuk sasaran meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, sebesar 85 % untuk target sasaran meningkatnya responsibilitas penanganan darurat bencana, dan sebesar 75 % untuk target sasaran meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana Capaian kinerja program sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat diuraikan pada tabel dibawah:

Tabel 3.1.6.3

Capaian Kinerja Program sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI	TARGET 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (%)	TARGET 2025
1	Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan masyarakat yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150 ORANG	176 ORANG	117,33	180 orang
2	Meningkatnya responsibilitas penanganan darurat bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	Jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah warga yang terdampak kejadian bencana x 100 %	85%	96,16%	113,13	96,50%
3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana	Jumlah laporan kejadian bencana yang dipulihkan / target laporan kejadian bencana yang diidentifikasi X 100%	75%	78,57%	104,76%	82%

Sumber: BPBD Kota Tebing Tinggi

Capaian sebesar 117,33 dengan realisasi sebanyak 176 orang pada sasaran pertama yaitu meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan indikator Jumlah aparatur dan masyarakat yang ikut pelatihan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.6.3.1
Jumlah Aparatur Dan Masyarakat Yang Ikut Pelatihan

No	Uraian	Jumlah Peserta
	Kegiatan pelatihan dan penguatan kelembagaan anggota forum pengurangan risiko bencana kelurahan tangguh bencana	150
1	KELURAHAN TAMBANGAN HULU	37
2	KELURAHAN BANDAR UTAMA	38
3	KELURAHAN SRI PADANG	38
4	KELURAHAN TEBING TINGGI LAMA	37
5	PELATIHAN UNTUK APARATUR BPBD	26
6	PELATIHAN DALAM RANGKA BULAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI BANDA ACEH	14
7	PELATIHAN TERKAIT PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA	10
8	PELATIHAN TEKNIS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI KETINGGIAN BAGI POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A MEDAN TAHUN 2024	2
Jumlah		176

Sedangkan capaian sebesar 113,13, realisasi 96,16 % untuk sasaran yang kedua yaitu meningkatnya responsibilitas penanganan darurat bencana dengan indikator Persentase korban bencana yang ditangani dapat dihitung dari data jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah warga yang terdampak kejadian bencana x 100 %. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat 3 jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Sejak BPBD berdiri bencana yang sering dihadapi yaitu bencana alam (banjir), kemudian bencana alam ini bukan hanya sekedar karena alam tetapi dapat disebabkan oleh manusia juga, dimana bencana ini berpotensi dapat menimbulkan kerugian manusia, material, ekonomi atau lingkungan dengan

dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap masyarakat dan manusia inilah baik secara perorangan maupun sekelompok masyarakat disebut korban bencana alam. Dengan begitu akan muncul pertanyaan “apa yang dapat dilakukan terhadap korban bencana alam?” Untuk inilah BPBD hadir di kabupaten/kota diseluruh Indonesia, melalui fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Sedangkan penanganan terhadap korban bencana dan ini sudah dilakukan oleh BPBD sejak berdiri di Kota Tebing Tinggi, beberapa diantaranya dapat berupa memberikan informasi/laporan terkait bencana kepada masyarakat maupun pimpinan baik melalui grup wa ataupun sosial media sehingga masyarakat tetap waspada karena telah mengetahui titik-titik terjadi bencana dimana saja, datang ke tempat kejadian, mencari dan melakukan evakuasi atau menempatkan korban bencana ke tenda atau pos pengungsian, mendirikan tenda dan pos pengungsian di setiap titik Kawasan kejadian bencana, mendirikan dapur umum, mendistribusikan peralatan penanggulangan bencana, mendistribusikan logistik berupa bahan pokok makanan, bila diperlukan mendistribusikan makanan dan minuman yang telah siap, membagi kelompok satgas bencana untuk menangani bencana, mencari tau dan melakukan cek terhadap ketinggian air sungai. Data korban bencana diperoleh dari bidang kedaruratan dan logistik, Dimana data yang diperoleh atas kerjasama BPBD dengan kepala lingkungan, kelurahan maupun kecamatan karna BPBD sendiri belum memiliki Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana), rencana aksi standar pelayanan minimal bahkan dokumen kebencanaan lainnya juga belum disahkan secara legal. Sedangkan jumlah warga yang terdampak banjir didapat dari jumlah penduduk dikawasan rawan bencana dibagi 2 karena kejadian bencana Tahun 2024 tidak semua lingkungan pada satu kelurahan yang terdampak. Lebih jelasnya dapat kita lihat data dibawah ini:

Tabel 3.1.6.3.2
REKAP DATA BENCANA TAHUN 2024

URAIAN BENCANA	JIWA												TOTAL
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
BANJIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.967	-	-	14.967
PUTTING BELIUNG													-
LONGSOR													-
KEBAKARAN													-
ORANG HANYUT									1	1			2
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.968	-	-	14.969

Tabel 3.1.6.3.3
Orang Hanyut

September									
No	Tanggal	Bencana	Lokasi			Korban Jiwa			Nama Korban
			Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	KK	Jiwa	Rumah	
1	13-Sep-24	Orang Hanyut	Bajenis	Bandar Sakti			1		Dendi Chaniago

Oktober									
No	Tanggal	Bencana	Lokasi			Korban Jiwa			Nama Korban
			Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	KK	Jiwa	Rumah	
1	11 Oktober 2024	Orang Hanyut	Padang Hulu	Persiakan			1		Irfan Ardiansyah Kasim Nasution

Tabel 3.1.6.3.4

Data Banjir

No	Tanggal	Bencana	Lokasi			Korban Jiwa			Ketinggian Air
			Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Rumah	KK	Jiwa	
1	09 Oktober 2024	Banjir	Tebing Tinggi Kota	Tebing Tinggi Lama	III	17	17	55	1 meter
				Badak Bejuang	IV, VI, VII	98	139	389	1 meter
				Bandar Utama	I	200	200	750	80 cm - 1 meter
					III	120	150	580	40-50 cm
				Pasar Baru	I, V	64	69	207	80 cm
				Pasar Gambir	VII	15	20	70	40-50 cm
			Rambutan	Sri Padang	I	40	50	200	30-60 cm
					II	35	45	120	
					III	45	45	120	30-50 cm
					VII	50	50	130	40-50 cm
				Karya Jaya	II	9	9	38	60 cm
				Lalang	IV	20	33	85	20-30 cm
			Bajenis	Berohol	I, II	80	105	185	20-40 cm
				Bandar Sakti	II, III, V, VI	104	109	309	5 - 100 cm
				Bulian	II, III, IV, VI dll	302	318	1097	30 cm - 120 cm
				Teluk Karang	I, II	118	125	430	30 - 100 cm
			Padang Hilir	Pinang Mancung	I	24	24	99	10 - 50 cm
				Tambangan Hulu	I, II	17	50	100	
			Padang Hulu	Pabatu	I	9	9	36	50 cm
					II	40	40	175	70 cm
					III	9	9	36	50 cm
				Tualang	VI	31	35	112	40 cm
			Persiakan	V	20	20	80	40-50 cm	
TOTAL						1467	1671	5403	

No	Tanggal	Bencana	Lokasi			Korban Jiwa			Ketinggian Air
			Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Rumah	KK	Jiwa	
	11 Oktober 2024	Banjir	Rambutan	Sri Padang	I, II, III, IV, V	450	620	1655	50-100 cm
				Karya Jaya	II	8	8	47	50-70 cm
					IV	100	100	360	40-50 cm
				Tanjung Marulak	I	11	11	50	50 cm
				Tanjung Marulak Hilir	II	12	12	52	30 cm
			Tebing Tinggi Kota	Badak Bejuang	II, IV, V, VI, VII	209	260	780	120 cm
				Bandar Utama	I, II, III	328	358	1365	200 cm
				Tebing Tinggi Lama	III	92	105	340	100 cm
			Bajenis	Bandar Sakti	III	40	40	135	50 cm
					V	6	6	26	30-80 cm
					VI	100	120	500	50-120 cm
				Berohol	I	100	100	200	50-70 cm
					II	275	275	987	30-150 cm
					III	30	30	100	50-70 cm
					V	15	15	57	40-50 cm
				Pinang Mancung	I	7	7	28	35-50 cm
					Jl. Gelatik	43	43	165	
					Jl. Gelatik Perumahan	120	120	360	
					Jl. Pramuka	20	20	80	
				Bulian	I, II, III, IV, V, VI	346	353	1300	30-85 cm
				Teluk Karang	I	145	145	490	100-200 cm
			Padang Hulu	Pabatu	I, II, III	58	58	247	30-85 cm
			Padang Hilir	Tambangan Hulu	I, II	60	65	130	50-150 cm
				Satria	VI	50	56	110	100 cm
TOTAL						2625	2927	9564	

No	Tanggal	Bencana	Lokasi			Korban Jiwa			Ketinggian Air	
			Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Rumah	KK	Jiwa		
	11 Oktober 2024 (17.00 Wib)	Banjir	Rambutan	Sri Padang	I, II, III, IV, V	450	620	1655	50-100 cm	
				Karya Jaya	II	8	8	47		
					IV	100	100	360		
					Tanjung Marulak	I	11	11	50	50 cm
				Tanjung Marulak Hilir	II	12	12	52	30 cm	
			Tebing Tinggi Kota	Badak Bejuang	II, IV, V, VI, VII	209	260	780	120 cm	
				Bandar Utama	I, II, III	328	358	1365	200	
				Tebing Tinggi Lama	III	92	105	340	100 cm	
				Pasar Gambir	V	20	20	70	50 cm	
			Bajenis	Bandar Sakti	III	40	40	135	50 cm	
					V	6	6	26		
					VI	100	120	500	50-120 cm	
				Berohol	I	100	100	200	50-70 cm	
					II	275	275	987	30-150 cm	
					III	30	30	100	50-70 cm	
					V	15	15	57	40-50 cm	
					Pinang Mancung	I	7	7	28	35-50 cm
				Jl. Gelatik		43	43	165		
				Jl. Gelatik Perumahan		120	120	360		
				Jl. Pramuka		20	20	80		
				Bulian	I, II, III, IV, V, VI	346	353	1300		
				Teluk Karang	I	145	145	490	100-200 cm	
				Padang Hulu	Pabatu	I, II, III	58	58	247	30-85 cm
				Padang Hilir	Tambangan Hulu	I, II	60	65	130	50-150 cm
			Satria		VI	50	56	110	100 cm	
TOTAL						2645	2947	9634		

Sedangkan capaian sebesar 106,67, realisasi 80 % untuk sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana dengan indikator Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana. Fokus sasaran ketiga ini adalah setelah bencana (pasca bencana), biasanya setelah kejadian bencana diperlukan pemulihan yang menjadi bagian dari siklus penanggulangan bencana. Pemulihan (recovery) yaitu mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Beberapa upaya pemulihan seperti inventarisasi kerusakan, evaluasi kerusakan, rehabilitasi, rekonstruksi, melanjutkan pemantauan terhadap lingkungan yang terdampak bencana sehingga genangan air cepat surut. Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah Dimana sub kegiatan penanganan pasca bencana dimutakhirkan ke beberapa sub kegiatan yang baru sehingga indikator kinerja bukan lagi mengacu kepada fisik (pembangunan infrastruktur) tetapi lebih kepada laporan, koordinasi, dokumen, bimtek pasca bencana, maupun peningkatan kapasitas, kajian kerusakan pasca bencana maupun kajian rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tahun 2024 terjadi bencana banjir dan laporan kejadian orang hanyut, kejadian bencana banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dari hulu sungai sehingga air sungai melebihi sungai, jebolnya tanggul sungai, atau bendungan terhalang sampah dan bencana banjir pada tahun 2024 tidak ada korban jiwa, tetapi laporan untuk orang hanyut tidak dapat diselamatkan karena kejadian sudah beberapa hari baru diketahui atau diterima laporan dan dengan curah hujan yang tinggi membuat pencarian dan evakuasi korban ditemukan 3-6 hari. Terkait dengan sasaran yang ketiga ini dapat dihitung dari Jumlah laporan kejadian bencana yang dipulihkan / target laporan kejadian bencana yang diidentifikasi x 100%. Berdasarkan data bencana Tahun 2024 terdapat 22 lingkungan (kelurahan) yang dilapor dari 28 kejadian bencana yang ditargetkan merupakan lingkungan yang terkena bencana. Bila dibandingkan dengan jumlah seluruh kelurahan di Kota Tebing Tinggi sebanyak 35 kelurahan terdapat selisih sebanyak 7 kelurahan yang paling aman

kawasannya dari dampak banjir. Adapun data pendukung dari capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.1.6.3.5

KOTA TEBING TINGGI					
No	Kecamatan	Kejadian Bencana Tahun 2024			
	PADANG HULU	9 oktober	11 oktober	11 oktober sore	ORANG HANYUT
1	PABATU	Pabatu	Pabatu	Pabatu	PERSIAKAN
2	LUBUK BARU	Tualang		Persiapan	
3	PERSIAKAN	Persiapan		Bandar Sono	
4	BANDAR SONO			Tualang	
5	TUALANG				
6	PADANG MERBAU				
7	LUBUK RAYA				
	RAMBUTAN	9 oktober	11 oktober	11 oktober sore	
1	RANTAU LABAN	Sri Padang	Sri Padang	Sri Padang	
2	KARYA JAYA	Karya Jaya	Karya Jaya	Karya Jaya	
3	LALANG	Lalang			
4	TANJUNG MARULAK		Tanjung Marulak	Tanjung Marulak	
5	SRI PADANG		Tanjung Marulak Hilir	Tanjung Marulak Hilir	
6	TANJUNG MARULAK HILIR				
7	MEKAR SENTOSA				
	PADANG HILIR	9 oktober	11 oktober	11 oktober sore	
1	BAGELEN	Tambangan Hulu	Tambangan Hulu	Tambangan Hulu	
2	TAMBANGAN		Satria	Satria	
3	TEBING TINGGI				
4	SATRIA				
5	DAMAR SARI				
6	TAMBANGAN HULU				
7	DEBLOD SUNDORO				
	BAJENIS	9 oktober	11 oktober	11 oktober sore	ORANG HANYUT
1	DURIAN	Berohol	Bandar sakti	Nihil	BANDAR SAKTI
2	PELITA	Bandar Sakti	Berohol		
3	BULIAN	Bulian	Pinang mancung		
4	BEROHOL	Teluk Karang	Bulian		
5	BANDAR SAKTI	Pinang Mancung	Teluk karang		
6	PINANG MANCUNG				
7	TELUK KARANG				
	TEBING TINGGI KOTA	9 oktober	11 oktober	11 oktober sore	
1	MANDAILING	Tebing Tinggi Lama	Badak Bejuang	Badak Bejuang	
2	PASAR BARU	Badak Bejuang	Bandar Utama	Bandar Utama	
3	PASAR GAMBIR	Bandar Utama	Tebing Tinggi Lama	Tebing Tinggi Lama	
4	BADAK BEJUANG	Pasar Baru		Pasar Gambir	
5	BANDAR UTAMA	Pasar Gambir		Pasar Baru	
6	RAMBUNG			Mandailing	
7	TEBING TINGGI LAMA				
JUMLAH KELURAHAN			35		
JUMLAH LAPORAN KEJADIAN BENCANA			22		
TARGET KEJADIAN BENCANA YANG DIIDENTIFIKASI			28		

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi pada TA. 2024 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 2 dokumen.

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi sebanyak 2 laporan

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian sub kegiatan ini merupakan Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 19 orang

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPBD sebanyak 3 dokumen.

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya sebanyak 1 paket

1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 30 orang

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah paket logistic kantor yang

disediakan sebanyak 1 paket.

1.5.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket.

1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Capaian sub kegiatan ini jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 1 dokumen

1.5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 12 laporan.

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan yaitu sebanyak 28 unit.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan.

1.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 8 unit.

1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 20 unit.

1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit.

2. Program Penanggulangan Bencana

2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

2.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Capaian sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya sebanyak 800 orang.

2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.2.1 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 150 orang

2.2.2 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Capaian sub kegiatan ini adalah Penyelamatan diri bagi Individu warga negara, Keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman Bencana dikawasan tempat tinggalnya sebanyak 50 unit.

2.2.3 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sebanyak 4 kawasan.

2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.3.1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat Bencana Dan Skpdb Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat sebanyak 1 dokumen.

2.3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2.4 Penataan Sistem Dasar PenanggulanganBencana

2.4.1 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitupasna) Dan Rencana Rehabilitasi

Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (r3p) kab/kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling

lama dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 dokumen.

❖ **SOSIAL**

DINAS SOSIAL

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Sosial Tebing Tinggi dalam penanganan PMKS (dalam hal ini bersumber APBD) adalah meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi PMKS hampir 100% walaupun belum mencapai hasil yang baik dan signifikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan anggaran yang ada Dinas Sosial lebih memprioritaskan kepada penanganan PMKS berupa bantuan dan dari pada Penguatan Kapasitas PSKS. Kondisi PSKS di kota Tebing Tinggi cukup memadai sehingga Dinas Sosial hanya memberikan kontribusi untuk menunjang kegiatan mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk Ke depannya SDM bagi PSKS akan lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sebagai mitra kerja untuk mendorong penanggulangan PMKS.

Namun Dinas Sosial Tebing Tinggi menyadari bahwa tidak semua PMKS yang bisa ditampung. Selain dengan keterbatasan Anggaran, masih ada komponen PMKS yang memiliki data yang belum jelas dan tumpang tindih untuk sebagai pembanding capaian kinerja. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial lebih fokus kepada Data DTKS untuk mendukung program Kementerian Sosial sehingga secara keseluruhan penanganan PMKS khususnya di Kota Tebing Tinggi sebagian besar ditangani Kementerian Sosial. Maka dari itu Dinas Sosial akan berencana mendata kembali beberapa komponen PMKS yang belum dibenahi datanya, seperti penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Orang Terlantar, dan lain-lain untuk mendukung perencanaan yang bersumber dari APBD.

Tabel 3.1.7**Tabel Realisasi IKU Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	2024	
					TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	Jumlah PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS yang ada X 100	80 %	100 %

Sumber: Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

Untuk mencapai PMKS yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, Dinas Sosial Kota Tebing melakukan pemberian berbagai bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut dilakukan melalui program rehabilitasi ,perlindungan dan jaminan sosial.

Beda dengan tahun sebelumnya bahwa data PMKS di kota Tebing Tinggi sudah mulai dibenahi dengan sasaran bantuan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) DTKS yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, adapun program prioritas Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yang mendukung target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

- Bantuan pangan berupa bantuan beras yang bersumber dari APBD kota Tebing Tinggi yang disebut Program Beras MADANI. Program Beras MADANI diberikan kepada Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 3 kali berupa beras bulog 10 kg sebanyak 2.400 KK untuk tahap 1 dan masing-masing sebanyak 10.000 KK untuk tahap 2 dan 3;
- Program BLT dari sumber anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berupa bantuan sosial uang senilai Rp. 200.000 sebanyak 1 kali kepada 394 orang;
- Program perlindungan sosial berupa bantuan pangan kepada lansia terlantar sebanyak 15 orang, anak terlantar sebanyak 15 orang dan disabilitas terlantar sebanyak 15 orang sebanyak 2 tahap;
- Pemberian alat bantu berupa alat bantu dengar 12 unit, kursi roda 8 unit, serta pemberian layanan penjangkauan, asesmen atau pendampingan;
- Bantuan pangan kepada korban bencana kebakaran sebanyak 5 KK, puting beliung sebanyak 6 KK, banjir 7.212 Jiwa, serta penyediaan dapur umum.

Realisasi target kinerja Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi mencapai 100% berdasarkan pada target kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan APBD yang ada pada Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Evaluasi dan analisis dalam hal pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 menjalankan 1 urusan, yakni Urusan Wajib Sosial, sebagai berikut :

1.6.1	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
1.6.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.6.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kegiatan dilaksanakan untuk makan dan minum rapat dan transport peserta forum OPD, sehingga tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik.
1.6.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kegiatan dilaksanakan untuk biaya lembur persiapan dan/ atau penyelesaian penyusunan laporan pertanggungjawaban; Penginputan Rincian Belanja P-APBD; pengisian Kertas Kerja mengumpulkan Bukti Dukung Struktur (SPIP);Persiapan Penatausahaan Keuangan Akhir Tahun 2024,Analisis Resiko Tahun 2025, Penyusunan Laporan- Laporan Pertanggung-jawaban sebanyak 4 kali, sehingga tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan tepat waktu.
1.6.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.6.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan dilaksanakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 23 orang selama 12 bulan, sehingga tersedianya gaji dan tunjangan ASN.

1.6.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.6.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD kegiatan dilaksanakan untuk biaya lembur pelaksanaan administrasi BMD sebanyak 3 kali, asuransi kendaraan sebanyak 3 unit dan asuransi bangunan/gedung, sehingga terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD yang terjamin dari segala resiko dengan asuransi.
1.6.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.6.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya kegiatan belum terlaksana karena belum ada penetapan motif batik Kota Tebing Tinggi.
1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.6.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kegiatan dilaksanakan untuk penyediaan komponen listrik/penerangan kantor selama 4 TW, sehingga jaringan listrik baik untuk alat elektronik kantor dan penerangan yang baik untuk proses kegiatan kantor.
1.6.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor kegiatan dilaksanakan untuk penyediaan ATK selama 4 TW, alat/bahan pembersih selama 4 TW, makan minum rapat pegawai sebanyak 16 kali dan pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) tahun 2024, sehingga tersedianya kebutuhan operasional kantor berjalan dengan baik.
1.6.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kegiatan dilaksanakan untuk penyediaan barang cetakan/penggandaan selama 4 TW, sehingga tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk operasional kantor.
1.6.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kegiatan dilaksanakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 44 kali, sehingga terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd dalam daerah dan luar daerah dengan baik.
1.6.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1.2.07.5	Pengadaan Mebel
	kegiatan dilaksanakan untuk pengadaan kursi sebanyak 30 unit, sehingga tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional berupa mebel kantor.
1.6.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	kegiatan dilaksanakan untuk pengadaan AC sebanyak 2 unit, printer sebanyak 1 unit, Mic Wireless 1 unit, Stand Mic 1 unit, Access Point 3 unit, sehingga tersedia sarana dan prasarana penunjang operasional berupa peralatan kantor.
1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	kegiatan dilaksanakan untuk biaya lembur sebanyak 8 kali dan penyediaan materai, sehingga kegiatan arsiparis dan kegiatan di luar jam kerja dapat terlaksana dengan baik.
1.6.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	kegiatan dilaksanakan untuk pembayaran tagihan air, listrik, internet kantor selama 11 bulan, sehingga lancarnya fasilitas telepon, air, listrik dan internet kantor.
1.6.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	kegiatan dilaksanakan untuk pembayaran gaji, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai THL sebanyak 17 orang selama 12 bulan, sehingga pelayanan umum kantor yang optimal.
1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	kegiatan dilaksanakan untuk BBM dan pemeliharaan kendaraan sebanyak 6 unit, BBM perahu karet untuk 12 bulan dan pembayaran STNK kendaraan sebanyak 6 unit, sehingga kendaraan dinas jabatan beroperasi dengan baik dan optimal.
1.6.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	kegiatan dilaksanakan untuk servis/perbaikan perahu karet sebanyak 2 unit, , sehingga kendaraan dinas lapangan beroperasi

dengan baik dan optimal.

1.6.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	kegiatan dilaksanakan untuk penyediaan bahan pemeliharaan selama 1 tw, upah buruh tak trampil, pemeliharaan/ perbaikan ac sebanyak 12 unit, komputer 7 unit, laptop 18 unit, printer 10 unit dan cctv 9 unit, sehingga peralatan kantor yang beroperasi dengan baik dan optimal.

1.6.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1.6.2.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.6.2.2.03.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

kegiatan dilaksanakan untuk bantuan transport tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk 5 orang selama 12 bulan, pelaksanaan koordinasi luar daerah sebanyak 3 kali, sehingga pemberdayaan TKSK dapat dilaksanakan dengan baik dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

1.6.2.2.03.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

kegiatan dilaksanakan untuk bantuan transport pekerja sosial untuk 1 orang selama 12 bulan, sehingga pemberdayaan pekerja sosial dapat dilaksanakan dengan baik dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

1.6.2.2.03.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

kegiatan tidak terlaksana dikarenakan kepengurusan Karang Taruna belum terbentuk.

1.6.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1.6.4.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1.6.4.2.01.1 Penyediaan Permakanan

kegiatan dilaksanakan untuk penyediaan Permakanan PMKS terlantar kepada 3 orang, sehingga SPM terpenuhi terhadap kebutuhan dasar permakanan PMKS terlantar sehingga kembali

	fungsi sosialnya.
1.6.4.2.01.2	Penyediaan Sandang
	kegiatan tidak terlaksana
1.6.4.2.01.3	Penyediaan Alat Bantu
	kegiatan dilaksanakan untuk pemberial alat bantu berupa alat bantu dengar 12 unit, kursi roda 8 unit, sehingga SPM terpenuhi terhadap kebutuhan alat bantu penyandang disabilitas terlantar sehingga kembali fungsi sosialnya.
1.6.4.2.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	kegiatan dilaksanakan untuk pemulangan orang terlantar sebanyak 7 orang dan pengantaran warga yang akan di rehabilitasi sebanyak 6 orang, sehingga pmks terlantar dapat kembali ke keluarganya atau mendapatkan rujukan ke panti untuk direhabilitasi.
1.6.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.6.4.2.02.2	Pemberian Layanan Kedaruratan
	kegiatan dilaksanakan untuk BBM kegiatan home visit / penjangkauan sebanyak 6 kali, sehingga penjangkauan, asesmen atau pendampingan kepada pmks dapat dilaksanakan.
1.6.4.2.02.3	Penyediaan Permakanan
	kegiatan dilaksanakan untuk pemberian bantuan paket sembako kepada panti sosial Amaliyah sebanyak 2 tahap, sehingga terpenuhi terhadap kebutuhan dasar permakanan PMKS terlantar lainnya sehingga kembali fungsi sosialnya.
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.6.5.2.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	kegiatan dilaksanakan untuk honorarium narasumber, bantuan transport peserta, makan dan minum rapat pendataan sebanyak 1 kali, bantuan transport petugas verivali dan penginput DTKS sebanyak 80 selama 12 bulan, koordinasi luar daerah sebanyak 1 kali, sehingga terlaksananya koordinasi yang baik dengan

stakeholders terkait.

1.6.5.2.02.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan dilaksanakan untuk makan dan minum pelatihan petugas verifikasi dan penginput DTKS sebanyak 1 kali, makan dan minum rapat koordinasi sebanyak 1 kali, honorarium pengelola DTKS Kota Tebing Tinggi sebanyak 5 orang selama 12 bulan, koordinasi luar daerah sebanyak 2 kali, sehingga terjalannya kerja sama tim dalam pengelolaan data guna data yang aktual dan valid untuk program bantuan sosial.

1.6.5.2.02.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kegiatan dilaksanakan untuk operasional PKH selama 12 bulan; untuk operasional pelaksanaan program beras MADANI dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk koordinasi sebanyak 14 kali, BBM Truk pengangkut beras sebanyak 3 kali, upah buruh angkut beras sebanyak 3 kali, makan minum rapat program beras MADANI sebanyak 3 kali dan penyediaan beras bulog 10 kg sebanyak 2.400 KK untuk tahap 1 dan sebanyak 10.000 KK untuk tahap 2 dan 3; untuk program BLT dari DBHCHT berupa makan dan minum rapat teknis penyaluran sebanyak 1 kali dan bantuan sosial uang senilai Rp. 200.000 kepada 394 jiwa; untuk program perlindungan sosial berupa bantuan pangan kepada lansia terlantar sebanyak 15 orang, anak terlantar sebanyak 15 orang dan disabilitas terlantar sebanyak 15 orang selama 2 tahap, sehingga semakin meningkatnya kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

1.6.6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1.6.6.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1.6.6.2.01.1 Penyediaan Makanan

kegiatan dilaksanakan untuk bantuan pangan kepada korban bencana kebakaran sebanyak 5 KK, puting beliung sebanyak 6 KK, banjir 7.212 Jiwa, penyediaan dapur umum, biaya lembur dapur umum dan pencarian orang hanyut, sehingga kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi.

1.6.6.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1.6.6.2.02.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kegiatan dilaksanakan untuk bantuan transport piket posko jaga TAGANA sebanyak 4 orang untuk 12 bulan, bantuan transport operasional tanggap darurat anggota TAGANA untuk 32 orang sebanyak 7 kali, sehingga terlaksananya pemberdayaan TAGANA terhadap kesiapsiagaan bencana.				
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
1.6.7.2.01	Pemeliharaan	Taman	Makam	Pahlawan	Nasional
	Kabupaten/Kota				
1.6.7.2.01.2	Pemeliharaan	Taman	Makam	Pahlawan	Nasional
	Kabupaten/Kota				
	kegiatan dilaksanakan untuk penyediaan, jasa penggalian makan sebanyak 1 makam, pemeliharaan lampu sorot dan lampu taman, jasa kebersihan makam untuk 12 bulan, sehingga Taman Makam Pahlawan selalu dalam keadaan bersih dan terawat.				
1.6.7.2.01.3	Pengamanan	Taman	Makam	Pahlawan	Nasional
	Kabupaten/Kota				
	kegiatan dilaksanakan untuk pembayaran gaji, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai THL keamanan untuk 1 orang selama 12 bulan, sehingga keamanan Taman Makam Pahlawan yang optimal.				

❖ TENAGA KERJA

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.1 Program dan Kegiatan Tenaga Kerja

Program Tenaga Kerja Daerah Kota Tebing Tinggi;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial;
4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Tahun Anggaran 2024 berdasarkan dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2024 dengan Walikota Tebing Tinggi sebagai berikut:

Tabel 3.1.8
Capaian Indikator Sasaran sesuai Target Dinas Ketenagakerjaan Kota
Tebing Tinggi Tahun 2024

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	20 Orang
2.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	80 Persen
		Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	23 Persen
3.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,93 Persen
4.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan/Manufacturing	0,75 Persen

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kota Tebing Tinggi

- Untuk Indikator Kinerja Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Tahun Anggaran 2023 dari target awal 40 orang capaian kinerjanya di Tahun Anggaran 2023 sebanyak 20 orang untuk 2 paket pelatihan yaitu pelatihan tas dan pelatihan ecoprint yang dananya berasal dari dana DBHCHT sedangkan pelatihan komputer sebanyak 1 paket tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran. Dan pada Tahun 2024 dari target awal 20 orang capaian kinerjanya di Tahun Anggaran 2024 sebanyak 10 orang untuk 1 paket pelatihan yaitu pelatihan pembuatan tas yang dananya berasal dari dan DBHCHT.
- Untuk Indikator Kinerja Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/PB di Tahun Anggaran 2023 sebanyak 4 kasus yang masuk yaitu dari Kilang Papan Hasil, Metrocash, Yayasan Sekolah Islam Terpadu, dan Klinik Kecantikan Dokter Rina tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya Mediator di Kota Tebing Tinggi sehingga capaian kinerjanya 0%. Pada Tahun

2024 sebanyak 8 Kasus yang masuk yaitu PT. ADIRA, PT. Anugerah Makmur Jaya (AMJ), PT. SBM, Gereja Methodist Indonesia (GMI), CV. Sungai Mas, CV. Panca Jaya, CV. Panca Jaya, Sekolah KF. Tandean. Terdapat 7 Kasus yang diselesaikan oleh Perjanjian Bersama yaitu PT. ADIRA, PT. Anugerah Makmur Jaya (AMJ), PT. Sinar Bintang Mandiri (SBM), Gereja Methodist Indonesia (GMI), CV. Sungai Mas, CV. Panca Jaya, CV. Panca Jaya, Sekolah KF. Tandean sehingga capaian kinerjanya sebesar 87,5% terdapat kenaikan sebesar 7,5% dari target awal sebesar 80%.

- Untuk Indikator Kinerja Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek pada tahun 2024 peserta program jamsostek 16.118 orang yang artinya mengalami peningkatan sebesar 245 orang dengan jumlah peserta jamsostek sebanyak 83.880 orang yang bekerja berdasarkan sumber dari BPS Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 artinya terdapat 19,21% peserta program jamsostek dari 23% yang ditargetkan. Yang artinya mengalami peningkatan sebesar 0,29% dari tahun 2023 dikarenakan sudah semakin bertambah kesadaran pengusaha yang mengikutsertakan pekerjaanya sebagai peserta program jamsostek.
- Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tahun Anggaran 2024 sebesar 5.527 jiwa mengalami kenaikan sebesar 0,07% dari Tahun 2023 dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 134.484 jiwa berdasarkan data BPS Kota Tebing Tinggi per Agustus Tahun 2024 sehingga capaian kinerjanya menjadi sebesar 6,36% dari target awal 8,93% dikarenakan beberapa perusahaan yang tutup.
- Untuk Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan/Manufacturing di Tahun 2022 dan 2023 capaian kinerjanya sama yaitu sebesar 1,23%. Dan pada Tahun 2024 per januari ini masih berdasarkan data dari Tahun 2023 yaitu sebesar -0,53% dikarenakan belum release.

URUSAN BUKAN WAJIB TENAGA KERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK URUSAN WAJIB TENAGA KERJA:

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.9
Capaian Indikator Sasaran terhadap Target dari Bidang Tenaga Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	200 Org	200 Org	200 Org	200 Org	20 Org	10 Org	-	-
2.	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	75%	80 %	85 %	90 %	0%	87,5 %	-	-
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	21%	23 %	25 %	27 %	22,2 1%	19,2 1%-	-	-
3.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan penciptaan lapangan kerja	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT)	9,12 %	8,93 %	8,77 %	8,66 %	6,24 %	6,36 %	-	-

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kota Tebing Tinggi

- Indikator kinerja Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat pada Tahun 2023 terdapat 2 paket pelatihan yaitu pelatihan pembuatan tas dan pelatihan ecoprint yang berasal dari dana DBHCHT masing-masing pesertanya sebanyak 10 orang sehingga jumlah peserta untuk 2 paket pelatihan sebanyak 20 orang. Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat 1 paket pelatihan yaitu pelatihan pembuatan tas dengan peserta sebanyak 10 orang.
- Indikator kinerja Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB pada Tahun 2022 dan 2023 dari 4 kasus yang masuk tetapi tidak ada pelaksanaan Perjanjian Bersama dikarenakan tidak adanya mediator di Kota Tebing Tinggi sehingga capaian kinerjanya 0 kasus (0%). Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 8 kasus yang masuk dengan 7 kasus yang diselesaikan dengan cara Perjanjian Bersama sehingga capaian kinerja 7 Kasus sebesar 87,5%.

- Indikator kinerja besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek pada Tahun 2022 sebanyak 15.170 orang yang berdasarkan sumber dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi per bulan Juli Tahun 2022. Pada Tahun 2023 peserta program jamsostek mengalami peningkatan sebesar 703 orang sehingga menjadi 15.873 orang dari 81.546 orang yang bekerja berdasarkan sumber dari BPS Kota Tebing Tinggi per bulan Desember Tahun 2023 artinya terdapat 19,46% peserta program jamsostek dari 21% yang ditargetkan. Yang artinya mengalami peningkatan sebesar 0,86% dikarenakan sudah semakin bertambah kesadaran pengusaha yang mengikutsertakan pekerjaanya sebagai peserta program jamsostek. Dan pada tahun 2024 peserta program jamsostek 16.118 orang yang artinya mengalami peningkatan sebesar 245 orang dengan jumlah peserta jamsostek sebanyak 83.880 orang yang bekerja berdasarkan sumber dari BPS Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 artinya terdapat 19,21% peserta program jamsostek dari 23% yang ditargetkan. Yang artinya mengalami peningkatan sebesar 0,29% dikarenakan sudah semakin bertambah kesadaran pengusaha yang mengikutsertakan pekerjaanya sebagai peserta program jamsostek. Indikator kinerja Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2022 sebesar 6,33% dan mengalami penurunan sebesar 0,9% sehingga di Tahun 2023 menjadi sebesar 6,24% dikarenakan iklim perekonomian sudah mulai membaik setelah terkena dampak pandemi COVID19. Dan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,07% dari Tahun 2023 sehingga menjadi sebesar 6,36% dikarenakan beberapa perusahaan yang tutup.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Pemerintahan bidang Pangan Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
 - I. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
 - II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.

- III. Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor; Realisasi Anggaran 100%.
 - c. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan; Realisasi Anggaran 100%.
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Realisasi Anggaran 100%.
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
- V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 100%.

**❖ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- 1. **Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**
- 1.1 **Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
 - a. Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
 - 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 3. Program Perlindungan Perempuan
 - 4. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Realisasi Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Adapun Capaian Kinerja Program dari Dinas P3APM sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P3APM Kota Tebing Tinggi kepada Walikota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.10

Capaian Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian terhadap target (%)
			2024	2024	2024
Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender yang ditandai dengan persentase ARG	1	Persentase Anggaran yang responsive Gender	60%	29%	48,4 %
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditandai dengan menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	3,6	3,2	113,5 %
	2	Rasio kekerasan terhadap Anak	6,4	9,56	67,0%

Sumber: Dinas P3APM Kota Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Dinas P3APM Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Bealisasi Kinerja SKPD Realisasi Anggaran 100%.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Realisasi Anggaran 100%.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Realisasi Anggaran 100%
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Realisasi Anggaran 100%
- f. Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 100%.

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 100%.

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

2.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Realisasi Anggaran 100%.

2.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 100%.

2.3 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 100%.

2.4 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 100%.

2.5 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 100%.

3. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.

- A. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Realisasi Anggaran 100%.

3.1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Anggaran 100%.

4. Program PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

4.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA; Realisasi Anggaran 100%.

4.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK; Realisasi Anggaran 100%.

4.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten Realisasi Anggaran 100%.

❖ PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Kegiatan:

2.1. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan.

2.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Makanan Kabupaten/Kota

2.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Kegiatan:

3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

Tabel 3.1.11
Capaian Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja Bidang Pangan

No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Nilai)	83	86,1	105
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Nilai)	78,5	86	109,55

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Pada tahun 2024 untuk Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai

berikut:

Kegiatan:

1.1. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan.

Sub kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis

Capaian sub kegiatan ini adalah Terbentuknya Tim Satgas Pangan untuk pemantauan pengendalian inflasi, penyediaan data informasi stok dan ketersediaan mencakup akses pangan, ketersediaan dan distribusi pangan dari tingkat produsen, konsumen, retail, swalayan/ supermarket, grosir, gudang dan distributor/Bulog dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Kota Tebing Tinggi melalui survey pemantauan harga dan stok ketersediaan di 3 (tiga) pasar tradisional bersama dengan unsur Forkompimda dan OPD Teknis.

b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya informasi tentang Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan dengan skor 86,1 dan jumlah pangan yang tersedia pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per gr/kapita/hari, dan lemak per gr/kapita/hari.

1.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Makanan Kabupaten/Kota

a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 ini untuk sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan Masih dalam proses penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dikarenakan proses penandatanganan Perwa tersebut harus mendapatkan ijin dari Kemendagri.

1.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Output kegiatan ini adalah untuk memperoleh data penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian ketahanan pangan pada suatu daerah dan berguna sebagai instrument sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan, pada tahun 2024 nilai/skor PPH adalah 86

b. **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**

Capaian sub kegiatan ini adalah percepatan penurunan stunting dan balita gizi kurang melalui penyaluran bantuan pangan (kacang hijau, biskuit bayi, beras fortifikasi) kepada 145 anak stunting dan 12 balita gizi kurang dan dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan ketersediaan sumber pangan hortikultura kepada masyarakat dan anak stunting sebagai sumber pangan melalui bantuan sarana prasarana pertanian (benih, pot ray, pupuk organik cair) kepada kelompok tani Pekarangan Pangan Lestari.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Kegiatan:

2.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

Sub Kegiatan:

a. **Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi wilayah atau kelurahan yang sangat rentan rawan pangan, rentan rawan pangan, agak rentan rawan pangan, agak tahan pangan, tahan pangan dan sangat tahan pangan melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Dari Peta FSVA ini di dapat kesimpulan wilayah yang berada di skala Prioritas 1 (sangat rentan rawan pangan), Prioritas 2 (rentan rawan pangan), Prioritas 3 (agak rentan rawan pangan), Prioritas 4 (agak tahan pangan), Prioritas 5 (tahan pangan), Prioritas 6 (sangat tahan pangan). Berdasarkan hasil analisis komposit, dari 35 kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi didapatkan hasil bahwa tidak ada kelurahan yang berada di Skala Prioritas 1 (sangat rentan rawan pangan) dan Prioritas 2 (Rentan Rawan Pangan). Kelurahan yang berada di Skala Prioritas 3 (agak rentan rawan pangan) sebanyak 5 (lima) kelurahan yaitu

Kelurahan Bandar Sono, Lubuk Raya, Karya Jaya, Bagelen, dan Tambangan Hulu. Kelurahan yang berada di Skala Prioritas 4 (agak tahan pangan) sebanyak 25 (dua puluh lima) kelurahan yaitu Kelurahan Pabatu, Lubuk Baru, Persiakan, Tualang, Padang Merbau, Mandailing, Bandar Utama, Rantau Laban, Sri Padang, Lalang, Tanjung Marulak, Tanjung Marulak Hilir, Mekar Sentosa, Bulian, Pelita, Durian, Bandar Sakti, Teluk Karang, Pinang Mancung, Berohol, Tebing Tinggi, Tambangan, Satria, Deblod Sundoro, Damar Sari. Kelurahan yang berada di Skala Prioritas 5 (tahan pangan) sebanyak 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Rambung. Kelurahan yang berada di Skala Prioritas 6 (sangat tahan pangan) sebanyak 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Gambir, Tebing Tinggi Lama, Pasar Baru dan Badak Bejuang.

❖ **PERTANAHAN**

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKINAN DAN PERTANAHAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Kota Tebing Tinggi Pada Tahun 2024 tidak melaksanakan Urusan Pertanahan.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Kota Tebing Tinggi Pada Tahun 2024 tidak melaksanakan Urusan Pertanahan.

❖ LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.1.12

Capaian Indikator dan Sasaran sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

N o	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Targ et	Realisa si	Capaian %	Kategor i	Sumb er Data
1	Perilaku Masyarakat Berwawasa n Lingkungan/	Meningkatn ya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Mening katnya Kualitas Lingkun gan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,49	60,25	104,8	Sangat baik	Dinas Lingku ngan Hidup

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Sumber data pencapaian nilai IKLH diperoleh dari perhitungan IKLH sesuai dengan rumus yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

A. IKA Kota Tebing Tinggi 2024

Tabel 3.1.12.1

Nilai IKA Kota Tebing Tinggi

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang Memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	0	0 %	70	0
Ringan	20	100 %	50	50
Sedang	0	0 %	30	0
Berat	0	0 %	10	0
Nilai IKA Kota Tebing Tinggi				50

B. IKU Kota Tebing Tinggi

a. Indeks NO₂

Rata-rata NO₂ untuk Transportasi (dalam satuan µg/m³)

$$\begin{aligned} &= \frac{21.00 + 18.26 + 7.97 + 13.00 + 3.69 + 11.60}{6} \\ &= \mathbf{12.5867 \text{ } \mu\text{g/m}^3} \end{aligned}$$

Rata-rata NO₂ untuk Industri (dalam satuan µg/m³)

$$\begin{aligned} &= \frac{17.90 + 12.48 + 5.22 + 10.26 + 4.26 + 8.55}{6} \\ &= \mathbf{9.7783 \text{ } \mu\text{g/m}^3} \end{aligned}$$

Rata-rata NO₂ untuk Pemukiman (dalam satuan µg/m³)

$$\begin{aligned} &= \frac{5.00 + 4.57 + 2.83 + 3.33 + 1.44 + 4.69}{6} \\ &= \mathbf{3.6433 \text{ } \mu\text{g/m}^3} \end{aligned}$$

Rata-rata NO₂ untuk Komersil/Perkantoran (dalam satuan µg/m³)

$$\begin{aligned} &= \frac{7.08 + 7.47 + 3.49 + 7.82 + 4.32 + 12.52}{6} \\ &= \mathbf{7.1167 \text{ } \mu\text{g/m}^3} \end{aligned}$$

Rata-rata NO₂ Kota (dalam satuan µg/m³)

$$\begin{aligned} &= \frac{12.5867 + 9.7783 + 3.6433 + 7.1167}{4} \\ &= \mathbf{8.2813 \text{ } \mu\text{g/m}^3} \end{aligned}$$

$$\text{Indeks NO}_2 \text{ Kota} = \frac{\text{Rata-rata NO}_2 \text{ Kota}}{\text{Baku Mutu Eu}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{8.28125 \text{ } \mu\text{g/m}^3}{40 \text{ } \mu\text{g/m}^3} \\ &= \mathbf{0.2070} \end{aligned}$$

b. Indeks SO₂

Rata-rata SO₂ untuk Transportasi (dalam satuan µg/m³)

$$\begin{aligned} &= \frac{17.90 + 15.93 + 2.57 + 5.81 + 7.94 + 8.54}{6} \\ &= \mathbf{9.7817 \text{ } \mu\text{g/m}^3} \end{aligned}$$

Rata-rata SO₂ untuk Industri (dalam satuan µg/m³)

$$\begin{aligned} &= \frac{18.60 + 11.27 + 7.52 + 11.87 + 11.37 + 5.77}{6} \end{aligned}$$

$$= 11.0667 \mu\text{g}/\text{m}^3$$

Rata-rata SO₂ untuk Pemukiman (dalam satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

$$= \frac{4.67 + 5.90 + 4.87 + 2.56 + 2.57 + 3.86}{6}$$

$$= 4.0717 \mu\text{g}/\text{m}^3$$

Rata-rata SO₂ untuk Komersil/Perkantoran (dalam satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

$$= \frac{9.03 + 8.12 + 6.27 + 5.00 + 7.25 + 1.64}{6}$$

$$= 6.2183 \mu\text{g}/\text{m}^3$$

Rata-rata SO₂ Kota (dalam satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

$$= \frac{9.7817 + 11.0667 + 4.0717 + 6.2183}{4}$$

$$= 7.7846 \mu\text{g}/\text{m}^3$$

$$\text{Indeks SO}_2 \text{ Kota} = \frac{\text{Rata-rata NO}_2 \text{ Kota}}{\text{Baku Mutu Eu}}$$

$$= \frac{7.7846 \mu\text{g}/\text{m}^3}{20 \mu\text{g}/\text{m}^3}$$

$$= 0.3892$$

c. IKU Kota

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$= \frac{0.2070 + 0.3892}{2}$$

$$= 0.2981$$

Maka dapat dihitung Nilai IKU Kota Tahun 2024

$$\begin{aligned} IKU &= 100 - \left(\frac{50}{0.9} (I_{eu} - 0,1) \right) \\ &= 100 - \left(\frac{50}{0.9} (I_{eu} - 0,1) \right) \\ &= 100 - \left(\frac{50}{0.9} (0.2981 - 0,1) \right) \\ &= 100 - \left(\frac{50}{0.9} (0.1981) \right) \\ &= 100 - (11.0072) \\ \mathbf{IKU} &= \mathbf{88.9928 \approx 88.99} \end{aligned}$$

Maka diperoleh nilai IKU Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah **88.99**.

C. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

UNTUK PERHITUNGAN IKL TAHUN 2024

Luas Wilayah Kota Tebing Tinggi (LW) = 3916,96857111105 ha

Luas RTH (Lrth) = 71,91545299999999 ha

Luas Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya (Lbapl) = 85,83821999999998 ha

Luas RHL = 7,62771206858 ha

a. Luas Tutupan Lahan (LTL)

$$LTL = Lh + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)$$

$$LTL = 0 + ((0 + 85,83821999999998 + 71,91545299999999) \times 0,6) + (7,62771206858 \times 0,6)$$

$$LTL = 0 + 94,65220379999998 + 4,576627241148$$

$$LTL = 99,22883104114787 \text{ ha}$$

b. Tutupan Lahan (TL)

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

$$TL = \frac{99,22883104114787 \text{ ha}}{3916,96857111105 \text{ ha}}$$

$$TL = 0,0253330679681715$$

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

$$IKL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left((84,3 - (0,02533306796817151 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left((84,3 - (2,533306796817151)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left((81,76669320318285) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left((81,652) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - 75,29161436757168$$

$$IKL = 24,70838563242832$$

$$IKL = 24,71$$

$$\begin{aligned} \text{IKLH Kota} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 50) + (0,405 \times 88,99) + (0,219 \times 24,71) \\ &= 19,63472 + 35,478 + 5,43339 \\ &= 60,54611 \\ &= \mathbf{60,55} \end{aligned}$$

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi sehingga dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja bisa dilaksanakan tepat waktu.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah rapat koordinasi, penyediaan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan pembayaran lembur sehingga laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja bisa disampaikan tepat waktu.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup selama 12 Bulan.

1.2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi untuk penyusunan dan pelaksanaan akuntansi, ketersediaan data dan penyusunan laporan tepat waktu.

1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah rapat koordinasi dengan bidang-bidang terkait laporan keuangan bulanan dan triwulan dan semester sehingga penyampaian laporan keuangan bisa dilaksanakan tepat waktu.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah pembayaran premi asuransi untuk 2 gedung dan 2 mobil Dinas Lingkungan Hidup.

1.3.2. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD tepat waktu.

1.4. Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah

1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Capaian sub kegiatan ini adalah telah melakukan pengadaan baju pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 62 (set)

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah pengadaan bahan-bahan instalasi listrik dan penerangan kantor selama 1 tahun.

1.5.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah pengadaan ATK sekretariat dan makanan dan minuman untuk pertemuan bulanan Dinas Lingkungan Hidup.

1.5.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini adalah penyediaan fotokopi dan pencetakan buku serta laporan termasuk pencetakan karcis retribusi.

1.5.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah pembayaran perjalanan dinas baik luar propinsi maupun dalam propinsi.

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah pembelian 1 unit Komputer PC All In One (Core I3). 4 Unit Laptop Cor I5, Hardisk External 2 unit, serta Printer copy scan wifi 1.

1.6.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah pengadaan meja kerja direktur aditech, meja kerja kantor direktur fr 15, meja kerja staff innola, meja receptionist, kursi, kursi direktur fantoni dublin palazzo furniture, kursi direktur wiz w 024 al, kursi direktur fantoni bergamo, kursi direktur fantoni bolzano, serta kursi tamu di ruanan pejabat sebanyak 1 unit.

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian sub kegiatan ini adalah pengadaan materai 6000 dan 10.000

1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian sub kegiatan ini adalah Lancarnya pembayaran rekening listrik air dan telepon

1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah Lancarnya pembayaran gaji THL 5 orang, pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan penyediaan alat kebersihan

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian sub kegiatan ini adalah Lancarnya pembayaran pajak dan bbm kendaraan dinas

1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah pemeliharaan ac, printer, laptop, komputer, mesin penghancur kertas, cctv, dll

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

2.1.1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah pembelian alat tulis kantor, bahan cetak untuk dokumen daya dukung daya tampung air sungai (DDDTAS), daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), indeks pengelolaan kualitas lingkungan hidup (IKPLHD), pembelian materai 10.000, untuk makanan dan minuman rapat, pakan natura, pembayaran honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia, lembur penyusun IKPLHD, sewa gedung dan bangunan untuk acara DDDTLH, pembayaran jasa konsultasi konstruksi, pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri, pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota.

2.1.2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai status lingkungan hidup Kota Tebing Tinggi yang meliputi data dari lintas OPD, dimana di dalamnya untuk pembayaran makan minum rapat, pengadaan ATK, fotokopi bahan, cetak.

3. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) kabupaten/kota

3.1.1. Pembuatan Dan Pelaksanaan KHLS RPJPD/RPJMD

Capaian sub kegiatan ini adalah dokumen KHLS RPJPD/RPJMD telah disusun oleh BAPPEDA.

3.1.2. Penyelenggara KHLS Untuk KRP Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Capaian sub kegiatan ini adalah KHLS telah disusun oleh BAPPEDA.

4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

4.1. Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

4.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Capaian sub kegiatan ini adalah berbagai usaha untuk penghitungan untuk pelaksanaan pencegahan pencemaran, yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut: rehabilitasi sedang gedung laboratorium, pembayaran gaji THL sebanyak 5 orang, pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, pembelian suku cadang alat laboratorium, pengujian air limbah 14 titik, dan air sungai sebanyak 10 titik. Pengujian emisi sebanyak 6 titik yang dilakukan sebanyak 2 semester ke laboratorium terakreditasi. Dan makan minum serta transport untuk pembuatan laporan Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara, serta laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

4.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Capaian sub kegiatan ini adalah pembelian ATK, penggandaan dan makan dan minuman rapat untuk penyusunan laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

4.1.3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah mengenai persentase sampel yang diuji yaitu dengan pembelian bahan-bahan kimia, ATK, alat pendukung laboratorium, pembayaran gaji THL sebanyak 5 orang, alat-alat laboratorium, pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, pembelian alat pendingin.

5 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

5.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

5.1.1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Capaian sub kegiatan ini adalah pemeliharaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tebing Tinggi, untuk menjalankan hal tersebut, diadakan berupa pembayaran gaji THL sebanyak 92 orang, pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, Pembelian bahan baku pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) publik, perbaikan fasilitas RTH di sempadan jalan, pemeliharaan toilet mobile, pembelian bahan bakar dan pelumas mesin babat, mesin chainsaw, pembelian bibit tanaman yaitu pohon sebanyak 1.550 bibit, bunga-bunga sebanyak 12.280 bibit, pembelian suku cadang alat-alat pertanian, pembelian suku cadang alat bengkel, pembelian ATK, bahan cetak, pembelian bahan baku dan peralatan kantor, pembelian alat keselamatan K3, pemeliharaan tiang lampu kota, pembelian bahan kimia dan pupuk, pembelian lapangan dinas lapangan (PDL), pembelian pakaian penyelamat, pembelian pakaian kerja bengkel, pembayaran tagihan air, pembayaran jasa konsultasi konstruksi, pemeliharaan jalan jaringan dan irigasi, pembelian meja dan kursi kerja, pemeliharaan anjungan sri mersing, pemeliharaan sarana dan prasarana bermain anak dan lantai tamankota, rehabilitasi pagar hutan kota, pembangunan taman bermain anak, pembuatan guiding block tuna netra di lapangan merdeka, pembelian perlengkapan hortikultura dan peralatan kebersihan, pupuk dan obat tanaman, pembuatan parit di area hutan kota.

6 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

6.1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Capaian sub kegiatan ini tidak terlaksana karena kekurangan anggaran

untuk kegiatan pengumpulan limbah b3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, maka kegiatan tersebut di alihkan dengan kegiatan lainnya.

7 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

7.1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah kegiatan penilaian dokumen PPLH yang diajukan oleh pelaku izin usaha/kegiatan untuk itu dilakukan pengadaan bahan cetak dan penggandaan, pengadaan ATK, pembelian materai 10.000, pembayaran honorarium narasumber, pembayaran sewa gedung, perjalanan dinas dan pengadaan makanan dan minuman untuk sidang PPLH.

7.1.2. Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Capaian sub kegiatan ini adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke perusahaan- perusahaan yang ada di Kota Tebing Tinggi, untuk mendukung kegiatan tersebut dilaksanakan pengadaan bahan cetak dan penggandaan, pengadaan ATK, perjalanan dinas dan pengadaan makanan dan minuman untuk pengawasan ke lokasi usaha/kegiatan selama 1 tahun, pembayaran gaji THL sebanyak 2 orang, pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

8.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8.1.1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Capaian sub kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui pameran dan penilaian Adipura yaitu berupa pembayaran bahan bakar

dan pelumas, pembelian bibit tanaman, ATK, bahan cetak, pembelian materai 10.000, pembelian makanan dan minuman untuk aktivitas lapangan menyambut Adipura, pembayaran honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, dan panitia, pembayaran sewa peralatan dan mesin, sewa peralatan studio audio, pembayaran perjalanan dinas dalam negeri dan dalam kota.

9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

9.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Capaian sub kegiatan ini adalah Pelaksanaan Lomba Lingkungan Hidup, untuk membiasakan sekaligus sosialisasi membiasakan perilaku berwawasan lingkungan sejak dini, untuk itu dilakukan pengadaan ATK, penggandaan, pembayaran honor juri, pembaca doa, dirjen, narasumber, pembawa acara dan perjalanan dinas.

10 Program Pengelolaan Persampahan

10.1. Pengelolaan Sampah

10.1.1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini tidak terlaksana karena kekurangan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, maka kegiatan tersebut di alihkan dengan kegiatan lainnya.

10.1.2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilihan, pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah Penanganan persampahan di Kota Tebing Tinggi untuk itu diperlukan pengadaan BBM dan suku cadang alat berat, truk, maupun kendaraan pengangkut sampah tidak bermesin, alat-alat kebersihan, pembayaran gaji 194 orang THL, pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, perbaikan timbangan TPA, perbaikan pagar tanag lapang merdeka, pembuatan tembok depan TPA, pembuatan tembok kanan pagar TPA,

rehab pagar pintu masuk TPA, pembuatan 2 unit plat beton, pembayaran tagihan listrik, pemeliharaan tanaman, pembuatan pos, dudukan dan pemindahan timbangan di TPA bawah.

❖ ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Program dan Kegiatan Dinas Dukcapil

Program Dinas Dukcapil Kota Tebing Tinggi;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Realisasi Program Dinas Dukcapil Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Capaian Kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.13
Capaian Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	99.75%	110.83%
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98.68%	98.70%	100.02%

	sipil, dan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	(KTP EI)			
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99.8%	99.8%	100%
		Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Tebing Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sangat baik. Ada 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian diatas 100%, yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP EI)

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan; Realisasi Anggaran 100%.

1.2. Administrasi Umum perangkat Daerah

- a. Penyediaan bahan logistik kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Realisasi Anggaran 100%.
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- a. Pengadaan Mebel; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, Realisasi Anggaran 100%.

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- 1.5. Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

2. Program Pendaftaran Penduduk

2.1 Pelayanan pendaftaran penduduk

- a. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Penerbitan Dokumen atas hasil pelopran peristiwa kependudukan; Realisasi Anggaran 100%.

3. Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan; Realisasi Anggaran 100%.

❖ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Realisasi Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Adapun Capaian Kinerja Program dari Dinas P3APM sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P3APM Kota Tebing Tinggi kepada Walikota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.14
Capaian Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian terhadap target (%)
			2024	2024	2024
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan serta kualitas keluarga	1	Persentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	70%	79,67%	113,8%

Sumber: Dinas P3APM Kota Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Dinas P3APM Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Realisasi Anggaran 100%.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Realisasi Anggaran 100%.
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Realisasi Anggaran 100%.
- c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Realisasi Anggaran 100%.
- d. Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Realisasi Anggaran 100%

❖ **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program Dinas PPKB Kota Tebing Tinggi;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Realisasi Program Dinas PPKB Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Tabel 3.1.15
Indikator Urusan Dinas PPKB Kota Tebing Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	58 (Persen)	58 (Persen)
2	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama	Median Usia Kawin Pertama	24 Tahun	24 Tahun
3	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,07	2,04
4	Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	81

Sumber: Dinas PPKB

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 58% dan berdasarkan data Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK 2024) angka prevalensi kontrasepsi modern Kota Tebing Tinggi sebesar 58 %. Data ini menunjukkan capaian pada indikator tersebut sebesar 100%. Ketercapaian ini karena ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk melaksanakan KB MKJP dengan tersedianya dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan khususnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Median usia kawin pertama ditargetkan pada tahun 2024 adalah 24 tahun dan berdasarkan data pelayanan SP3 yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh angka 24 tahun, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun sedangkan menurut BKKBN umur ideal untuk menikah bagi perempuan yakni 21 tahun atau lebih karena bila dibawah usia tersebut dikhawatirkan berisiko pada kesehatan dan bagi laki-laki 25 tahun karena sudah matang dan dapat berfikir secara dewasa. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja, target untuk indikator kinerja median usia kawin pertama pada Dinas PPKB Kota Tebing Tinggi akhir tahun 2024 sebesar 24 tahun dapat dicapai.

TFR ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 2,07 dan berdasarkan data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024, nilai TFR pada tahun 2024 sebesar 2,04. Data ini menunjukkan target tersebut telah terealisasi. TFR juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Sumut

dengan target pada tahun 2024 sebesar 2.11. Hal ini menunjukkan nilai TFR Kota Tebing Tinggi sudah berada diatas target TFR Sumut.

Dinas PPKB merupakan salah satu OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu pelayanan KB dan pelayanan SP3 (Standar Prosedur Pelayanan Perkawinan) yang rutin dilaksanakan setiap hari selsa dan kamis. Oleh karena itu, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat merupakan tujuan utama. Indikator indeks kepuasan masyarakat mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Adapun target indikator tersebut pada tahun 2024 sebesar 85% dan tercapai sebesar 81%. Meskipun capaian tersebut masih belum mencapai target tetapi Dinas PPKB terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Pemerintahan Dinas PPKB Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; Realisasi Anggaran 250%
- b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan; Realisasi Anggaran 100%

1.2 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

- a. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja; Realisasi Anggaran 100%
- b. Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang Realisasi Anggaran 100%
- c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melaluai Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) Realisasi Anggaran 100%
- d. Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KB Realisasi Anggaran 100%

- e. Pengendalian program KKBPK; Realisasi Anggaran 100%

1.3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- a. Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP); Realisasi Anggaran 100%

1.4. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya; Realisasi Anggaran 100%
- b. Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Realisasi Anggaran 115,66%
- c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB; Realisasi Anggaran 100%
- d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Realisasi Anggaran 100%

1.5 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB

- a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB; Realisasi Anggaran 100%
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB; Realisasi Anggaran 175

1.6 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)); Realisasi Anggaran 128%
- b. Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)); Realisasi Anggaran 100%

- c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)); Realisasi Anggaran 100%
- d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga); Realisasi Anggaran 100%
- e. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS); Realisasi Anggaran 125%
- f. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)); Realisasi Anggaran 71,31%

1.7 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita); Realisasi Anggaran 100%
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita); Realisasi Anggaran 71,31%.

❖ PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan pada urusan pemerintahan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

1.3.1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

2.1.1. Pembangunan prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

2.1.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

2.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2.2.1. Penyusunan Rencana Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C

- 2.3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - 2.3.1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
 - 2.3.2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - 2.3.3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- 2.4. Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
 - 2.4.1. Pengawasan dalam Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.4.2. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
 - 2.4.3. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- 2.5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 2.5.1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

- 2.6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.6.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- 2.7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.7.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.16
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Umum					
1	Sasaran : Terkendalinya ketersediaan layanan angkutan umum	Persentase Angkutan Umum Yang Beroperasi Sesuai Ketetapan	66%	64,4 %	97,58%	Sangat Memuaskan
2	Sasaran : Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan	98,25	48,04 %	48,9%	Kurang
II	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Jalan					
3	Sasaran : Terciptanya lalu lintas yang lancar	Kecepatan Rata-Rata Tempuh Kendaraan di Jalan Protokol Pada Saat Jam Sibuk	30,50 Km/Jam	30,94 Km/Jam	101,44 %	Sangat Memuaskan
4	Sasaran : Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Prasarana dan Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Sesuai Kebutuhan	76	76	100 %	Sangat Memuaskan
III	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani					
5	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,25	91,5	94,09%	Sangat Memuaskan

Sumber: Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan sangat memuaskan, dengan capaian tertinggi yakni Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat jam sibuk capaiannya sebesar 101,44% sedangkan capaian terendah pada indikator Indeks Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan dimana capaiannya hanya sebesar 48,9 %.

1. Sasaran strategis Kedua yaitu Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Yang Aman, dengan indikator kinerja Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan
 - a. Persentase angkutan umum yang laik jalan adalah jumlah angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah angkutan yang wajib uji. Kendaraan angkutan umum yang laik jalan adalah kendaraan yang telah lulus uji kendaraan bermotor yang dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan meliputi ; pengujian casis kendaraan, kaki-kaki, sistem kelistrikan, lampu-lampu,

pengereman dan sebagainya. Khusus untuk kendaraan angkutan umum maka diwajibkan untuk melakukan pengujian kendaraan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

- b. Angkutan umum wajib uji di Kota Tebing Tinggi terdiri dari mobil pick up, mobil penumpang, mobil bus, becak, mobil barang dan tempelan. Berdasarkan data dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, jumlah kendaraan yang wajib uji dan yang lulus uji tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.16.1
Kendaraan Yang Wajib Uji dan Yang Lulus Uji Dari Dalam Kota
Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Wajib Uji	Lulus Uji/ Laik jalan Dalam Kota
1	Mobil pick up, Mobil Barang + Tempelan	2611	1221
2	Mobil penumpang	80	58
3	Mobil Bus	186	103
4	Becak	-	-
Jumlah		2877	1382

(Sumber Data : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi)

Tabel 3.1.16.2
Kendaraan Yang Wajib Uji dan Yang Lulus Uji Dari Luar Kota Tebing Tinggi
Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Wajib Uji	Lulus Uji/ Laik jalan Dalam Kota
1	Mobil pick up, Mobil Barang + Tempelan	4800	7678
2	Mobil penumpang	-	0
3	Mobil Bus	104	247
4	Becak	-	-
Jumlah		4904	7925

(Sumber Data : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi)

- c. Jumlah angkutan umum yang wajib uji dari **dalam kota Tebing Tinggi** pada Tahun 2024 berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi ada sebanyak 2877 unit. Selama kurun waktu tahun 2024 jumlah kendaraan umum yang lulus uji

- (laik jalan) dari **dalam Kota Tebing Tinggi** sebanyak 1382 unit sebesar 48,04%
- d. Jumlah angkutan umum yang wajib uji dari **luar kota Tebing Tinggi** pada Tahun 2024 berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi ada sebanyak 4904 unit. Selama kurun waktu tahun 2024 jumlah kendaraan umum yang lulus uji (laik jalan) dari **Luar Kota Tebing** Tinggi sebanyak 7925 unit sebesar 161,6 %
 - e. Sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja, target untuk indikator persentase angkutan umum yang laik jalan Tahun 2024 adalah sebesar 98,25 % dan terealisasi sebesar 48,04 % Dengan demikian pencapaian kinerja diperoleh sebesar 48,9%
- Secara angka realisasi dan capaian Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan di nomor 6 (Kurang), tetapi pelaksanaannya kendaraan yang melakukan uji melebihi target yang di tentukan karena Pelayanan pengujiannya tidak hanya melayani kendaraan dalam kota saja tetapi kendaraan dari luar kota .
- f. Jumlah keseluruhan kendaraan baik dari dalam kota maupun luar kota berdasarkan Pendataan kendaraan oleh uptd sebanyak 7781 unit. Selama kurun waktu tahun 2024 jumlah kendaraan umum yang lulus uji (laik jalan) di Kota Tebing Tinggi sebanyak 9307 unit sebesar 119,61%.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Perhubungan Tebing Tinggi Tahun 2024 capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja lembur pegawai dan belanja cetak /penggandaan laporan - laporan rutin perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban aset dan keuangan serta kinerja OPD supaya laporan – laporan dapat tersusun tepat waktu dan dapat digunakan

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Perhubungan sebanyak 35 orang untuk meningkatkan kinerja aparatur.

1.3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.3.1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya Id Card Juru Parkir untuk meningkatkan penyebaran kebijakan retribusi daerah.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor seperti alat listrik dan elektronik gedung kantor supaya penerangan dan instalasi gedung kantor tetap terjaga dengan baik.

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yakni Laptop, camera, Printer, Scenner dan Ac Split untuk pelaksanaan tugas - tugas kedinasan/operasional dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan akurat.

1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian sub kegiatan ini untuk penyediaan peralatan kebersihan dan pembersih kantor, alat tulis kantor, benda pos/materai dan penyediaan makanan, minuman dan snack rapat supaya pelayanan administrasi kantor, kebersihan kantor dan rapat-rapat dapat terlaksana dengan lancar.

1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini untuk penyediaan barang cetakan kantor (stopmap, kertas F4 dan blanko disposisi) dan barang cetakan pelayanan bidang perhubungan (Karcis retribusi) agar aparatur dapat melakukan pengutipan retribusi secara legal.

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja bahan bacaan koran/surat kabar agar aparatur dapat memperoleh berita dan informasi melalui media massa.

1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Capaian sub kegiatan ini untuk pembiayaan transportasi dan akomodasi bagi PNS yang melaksanakan konsultasi/koordinasi kedalam atau keluar daerah

supaya meningkatkan kapasitas aparatur serta terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perhubungan.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Capaian sub kegiatan ini untuk pembayaran rekening listrik, rekening air dan biaya internet guna mendukung kelancaran aktivitas/pekerjaan aparatur sehari-hari.

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Capaian sub kegiatan ini pembayaran honorarium/upah, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Non PNS sebanyak 53 orang terdiri dari petugas keamanan kantor 3 orang, Kebersihan kantor 3 orang, pengendali lalu lintas 34 orang, operator komputer 1 orang, tenaga administrasi kantor 7 orang, pengemudi dan pramugara Bus Trans Tebing Tinggi 4 orang dan 1 sopir Kepala Dinas guna meningkatkan kinerja pegawai Non PNS.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Capaian sub kegiatan ini untuk penyediaan suku cadang, BBM, pembayaran asuransi, biaya service, pajak kendaraan dinas operasional kantor sebanyak 7 unit terdiri dari 5 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 Unit Kendaraan roda 2 (dua), supaya kendaraan operasional dapat digunakan dalam kondisi baik.

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Capaian sub kegiatan untuk pembayaran Jasa Instalasi CCTV kantor, jasa perbaikan ip camera CCTV, jasa perbaikan Repeater HT Kantor, service komputer, laptop, AC, , Service dan Perbaikan AC split 2 PK 15 unit, service komputer/notebook/laptop 10 unit, service printer 10 unit.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

2.1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota berupa 14 unit Plank Tarif Parkir dan 14 Unit Plank Perlintasan Sebidang supaya meningkatkan keselamatan dan informasi di jalan Kabupaten/Kota

2.1.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja pemeliharaan CCTV di Persimpangan Jalan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Simpang bandar Sono, Rehabilitasi dan pemeliharaan Simpang Sibulan, Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light agar terciptanya keselamatan berlalu lintas pada persimpangan jalan di jalan kabupaten/kota

2.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2.2.1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

Capaian sub kegiatan ini adalah sebagai penyusunan konsep Rencana Pengembangan Terminal Tipe C yang tersusun agar memperoleh usulan atas penembangan terminal.

2.3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2.3.1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala.

Capaian sub kegiatan ini dilaksanakan untuk biaya cetak bahan perlengkapan pengujian antara lain : (Map kartu Risalah atau Induk, cetak blanko hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan, Blanko Kwitansi, Blanko laporan retribusi. selanjutnya untuk belanja Upgrade Aplikasi BLUE dan RFID untuk mendukung terlaksananya registrasi kendaraan yang akan di Uji.

2.3.2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Capaian sub kegiatan ini dilaksanakan untuk biaya pengadaan bukti lulus pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang berupa Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) sebanyak 6000 set untuk mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

2.3.3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Capaian sub kegiatan ini untuk Jasa Kalibrasi dan service alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 10 unit agar alat uji kendaraan bermotor dapat berfungsi dengan baik dan tepat.

2.4. Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

2.4.1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja kegiatan poskotis mudik lebaran dan nataru terdiri dari sewa tenda poskotis, baliho poskotis, spanduk poskotis, makan dan minum kegiatan posko dan uang lembur kegiatan poskotis untuk personil Dinas Perhubungan, Tni dan Polri yang diperbantukan dalam penjagaan dan pengamanan lalu lintas dan untuk makan minum kegiatan razia dan honararium razia petugas lapangan

2.4.2. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas pada sekolah yang terdiri atas kelengkapan ATK, honorarium narasumber, honorarium pembawa acara dan honorarium moderator.

2.4.3. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota,

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan survey lalu lintas dengan rincian seperti ATK kegiatan survey, belanja makan dan minum kegiatan survey dan honorarium kegiatan survey. Selain itu terlaksananya kegiatan forum lalulintas dan angkutan jalan dengan rincian honorarium pembawa acara, honorarium narasumber, honorarium pembaca doa dan transport peserta forum.

2.5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan

2.5.1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan Kabupaten/Kota.

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pemilihan awak kemudi umum teladan/abdiyasa teladan dengan rincian seperti ATK, cetak spanduk, belanja makan dan minum, honorarium narasumber, honorarium pembawa acara, honorarium rohaniawan, belanja perjalanan dinas peserta dan hadiah untuk pemenang pemilihan awak kemudi umum teladan.

2.6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2.6.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian sub kegiatan ini dilaksanakan untuk belanja BBM dan service bus trans tebing tinggi 2 unit, dan biaya pajak bus trans Tebing Tinggi 2 Unit selama 12 bulan sehingga pelayanan jasa angkutan Kota bagi pelajar pada jam-jam sekolah (pergi– pulang) dapat terlaksana dengan baik.

2.7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2.7.1. Koordinas dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dengan rincian ATK kegiatan, makan dan minum kegiatan, honorarium narasumber, honorarium rohaniawan dan transport peserta kegiatan.

**❖ KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan pada urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1. Penyediaan Gaji dan TunjanganASN.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik.

- 2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
 - 2.1.2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - 2.1.3. Pelayanan Informasi Publik.
 - 2.1.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

3. Program Aplikasi Informatika.

- 3.1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 3.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.17

Capaian Indikator Sasaran dengan Target sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi	1.Meningkatnya tata kelola Pemerintah berbasis E-Government	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan E-Government	SKPD	22	22	100 %
			Jumlah ketersediaan titik layanan fiber optik	titik	44	44	100 %
			Jumlah data dan meta data yang disebarluaskan pada portal SDI	data	7	7	100 %
			Persentase SKPD yang tereduksi tentang tata kelola keamanan informasi	%	25 %	25 %	100 %
		2.Meningkatnya tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi	Persentase penyebaran informasi Pemerintah Daerah	%	95	95	100 %
			Persentase laporan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	86 %	86 %	100 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja lembur pegawai dan belanja cetak /penggandaan laporan - laporan rutin perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban aset dan keuangan serta kinerja OPD supaya laporan – laporan dapat tersusun tepat waktu dan dapat digunakan

- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 32 orang untuk meningkatkan kinerja aparatur.

- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah Terjaminnya pengamanan Barang Milik Daerah, sehingga akan meningkatkan kinerja aparatur.

- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor seperti alat listrik dan elektronik gedung kantor supaya penerangan dan instalasi gedung kantor tetap terjaga dengan baik.

- 1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian sub kegiatan ini untuk penyediaan peralatan kebersihan dan pembersih kantor, alat tulis kantor, benda pos/materai dan penyediaan makanan, minuman dan snack rapat supaya pelayanan administrasi kantor, kebersihan kantor dan rapat-rapat dapat terlaksana dengan lancar

- 1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini untuk penyediaan barang cetakan kantor (stopmap, kertas F4, A4) agar aparatur dapat melakukan pengadministrasian kantor dengan baik.

- 1.4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Capaian sub kegiatan ini untuk pembiayaan transportasi dan akomodasi bagi PNS yang melaksanakan konsultasi/koordinasi kedalam atau keluar daerah supaya meningkatkan kapasitas aparatur serta terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Kominfo.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

Capaian Sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan mesin yang mendukung kinerja Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Capaian sub kegiatan ini untuk pembayaran rekening listrik, rekening air guna mendukung kelancaran aktivitas/pekerjaan aparatur sehari-hari.

1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Capaian sub kegiatan ini pembayaran honorarium/upah, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Non PNS sebanyak 35 orang.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Capaian sub kegiatan ini untuk penyediaan suku cadang, BBM, pembayaran asuransi, biaya service, pajak kendaraan dinas operasional kantor.

1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Capaian sub kegiatan untuk pembayaran Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin agar dapat terjaga dengan baik.

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Capaian Sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik adalah terselenggaranya monitoring opini dan aspirasi publik masyarakat Kota Tebing Tinggi.

2.1.2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Capaian Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah tersedianya kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kota Tebing

Tinggi.

2.1.3. Pelayanan Informasi Publik

Capaian Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah tersebarnya informasi publik kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi.

2.1.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Capaian Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas adalah terselenggaranya hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.

3. Program Aplikasi Informatika

3.1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Capaian Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah adalah terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi.

❖ KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.1.18

Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	85%	51.805.700
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	85%	73.891.500

3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase UMKM Yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	80 %	678.953.860
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.716.031.668
6.	Program Peningkatan sarana distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	75%	1.465.880.020
7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	100%	207.225.800
9.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100%	222.000.560
10.	Program Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	Persentase Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	460.020.808
	TOTAL			7.875.839.916

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian dari Kegiatan ini adalah Dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN selama 27 Orang/Bulan

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Capaian dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah selama 2 Semester

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Capaian dari Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 1 Paket

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket.

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Berupa Makan dan Minum, Alat Pembersih Kantor dan Alat Tulis Kantor sebanyak 4 Paket

1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan untuk

mendukung Laporan-Laporan

1.5.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian dari Kegiatan ini adalah tersedianya jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 100 laporan.

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Laptop 2 Unit, UPS 5 Unit, dan Printer 1 Unit.

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Selama 12 Bulan.

1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan.

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sebanyak 1 Unit.

1.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan Sebanyak 2 Unit.

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Pemeliharaan Inventaris Kantor

Sebanyak 5 Unit.

1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin selama 40 Unit.

2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI.

2.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota

2.1.1. Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian Kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian penghargaan HUT Koperasi yang berprestasi dalam rangka HUT Koperasi Ke-77 yang diikuti oleh 20 Unit Koperasi.

3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN.

3.1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

Sub kegiatan ini terdiri dari 3 kegiatan yang berasal dari sumber dana DAK Non Fisik PK2UKM TA 2024 yang terdiri dari kegiatan :

1. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pengurus/ Pengelola Koperasi
Capaian kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi pengurus/pengelola koperasi sebanyak 30 Koperasi yang ada di kota Tebing Tinggi. Kegiatan pelatihan ini memberikan pengetahuan dan praktik langsung dalam penyusunan laporan keuangan koperasi dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu.

❖ **PENANAMAN MODAL**

DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi di Tahun Anggaran 2024 berdasarkan dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 dengan Walikota Tebing Tinggi sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Pengadaan Mebel

1.5.2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 1.7.5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
 - 2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2.1.1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**
 - 2.2.1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- 3. Program Promosi Penanaman Modal**
 - 3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota**
 - 3.1.1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pelayanan Penanaman Modal**
 - 4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Modal Satu Pintu Dibidang PenanamanModal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**
 - 4.1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 4.1.2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko
 - 4.1.3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
 - 5.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.**

5.1.1. Bimbingan Teknsi Kepada Pelaku Usaha

5.1.2. Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

6.1.1. Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tabel 3.1.19
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelaku usaha yang berinvestasi	Nilai realisasi investasi	Milyar	100	10	1 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	3,63	3,99	109%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Tidak dilaksanakan.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Capaian sub kegiatan ini untuk belanja makan minum rapat pegawai dan belanja cetak /penggandaan terkait penyelesaian laporan-laporan rutin perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta kinerja OPD agar dapat tersusun dan dilaporkan secara baik dan tepat waktu.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 17 orang untuk meningkatkan kinerja aparatur.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Capaian sub kegiatan ini untuk penyediaan komponen bahan elektronik/listrik gedung seperti baterai, bola lampu, cok, kabel, dll dalam rangka menunjang kegiatan rutin kantor.

1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian dari kegiatan ini untuk penyediaan alat tulis kantor, benda pos/materai, perabot kantor dan penyediaan makanan dan minuman rapat supaya pelayanan administrasi kantor dan rapat-rapat dapat terlaksana dengan lancar.

1.3.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini untuk Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan penunjang kebutuhan kantor berupa cetak spanduk, map serta fotocopy dokumen.

1.3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Capaian Sub Capaian sub kegiatan ini berupa pembayaran koran Medan Pos dan koran SIP sampai dengan TW 4.

1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Capaian sub kegiatan ini untuk pembiayaan transportasi dan akomodasi bagi aparatur yang melaksanakan konsultasi/koordinasi kedalam atau keluar daerah supaya meningkatkan kapasitas aparatur serta terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.4.1. Pengadaan Mebel.

Tidak dilaksanakan karena perpindahan kantor sehingga menyesuaikan kebutuhan kantor.

1.4.2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.

Pembelian 2 unit laptop , 2 unit scanner ,dan sebagian Tidak dilaksanakan karena perpindahan kantor sehingga menyesuaikan kebutuhan kantor.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Capaian sub kegiatan ini untuk pembayaran rekening listrik, rekening air, telepon dan biaya internet guna mendukung kelancaran aktivitas/pekerjaan aparatur sehari-hari.

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Capaian sub kegiatan ini pembayaran honorarium/upah BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Non ASN sebagai petugas jaga malam, petugas kebersihan, petugas lapangan, petugas administrasi keuangan, petugas administrasi perizinan sebanyak 21 orang. guna meningkatkan kinerja pegawai Non ASN.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Capaian sub kegiatan ini penyediaan suku cadang, BBM, pembayaran asuransi, biaya service, pajak kendaraan dinas jabatan BK 1226 N agar dapat digunakan dalam kondisi baik.

1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Capaian sub kegiatan ini penyediaan suku cadang, BBM, pembayaran asuransi, biaya service, pajak kendaraan dinas operasional BK 6060 N agar dapat digunakan dalam kondisi baik.

1.6.3. Pemeliharaan Mebel.

Capaian sub kegiatan ini berupa perbaikan sofa kantor.

1.6.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Capaian sub kegiatan untuk pembayaran service komputer, laptop, dan AC hingga peralatan dan mesin dapat digunakan dalam kondisi baik.

1.6.5. Pemeliharaan /Rehabilitasi Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Capaian sub kegiatan ini Pada TW IV Telah dilaksanakan pembuatan meja resepsionis, pembuatan sekat ruangan kantor.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Penetapan kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal.

Capaian sub kegiatan ini berupa Tersedia ATK, dan Makan Minum Rapat pembahasan Ranperda pemberian insentif kemudahan investasi penanaman modal modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan menyelenggarakan rapat internal OPD.

2.1.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

Tidak dilaksanakan dan anggaran sub kegiatan ini dikurangi pada PAPBD.

3. Program Promosi Penanaman Modal.

3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota.

3.1.1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.

Capaian dari Kegiatan ini berupa Pembuatan brosur berupa leaflet tentang strategi promosi investasi sebanyak 1 rim, pada Tw IV terlaksana talk show sebanyak satu kali bersama bapak sekretaris daerah terkait pelayanan publik dan investasi.

3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian dari kegiatan ini juga berupa Terselenggaranya pameran promosi investasi tingkat provinsi pada bulan Mei 2024, Penyediaan sovenir untuk pameran tahun 2025, Terlaksannya podcast 2 kali terkait investasi dengan BNN dan HIPMI.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Modal Satu Pintu Dibidang PenanamanModal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota.

4.1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Capaian dari kegiatan ini berupa sebanyak Terselenggaranya Rapat Koordinasi antar gerai-gerai pada MPP, Penyediaan Makan Minum Rapat, ATK, Alat dan bahan kebersihan MPP, Alat Listrik, Service AC, Service Printer, Service Komputer dan Pembayaran 2 orang jasa kebersihan MPP.

4.1.2. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Capaian dari sub kegiatan adalah berupa pembelian rompi pemantauan sebanyak 24 dan penyelenggaraan pemantauan pelaku usaha.

- 4.1.3. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.

Capaian dari kegiatan ini melaksanakan rapat dan penyediaan biaya transport konsultasi kepada masyarakat.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 5.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- 5.1.1. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha.

Capaian dari Subkegiatan ini berupa bimbingan teknis pelaku usaha sebanyak 55 orang sebanyak 3 kali terkait sosialisasi implementasi perijinan berusaha berbasis risiko Pengawasan Penanaman Modal.

Capaian dari Sub kegiatan ini adalah berupa penyediaan makan minum rapat dan foto copy rapat proses pelaksanaan pengawasan serta pengawasan ke kegiatan pelaku usaha.

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 6.1. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 6.1.1. Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Capaian dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan tenaga IT untuk mengelola kelancaran pada penyediaan aplikasi perizinan serta pengolahan data untuk informasi penanaman modal selama 12 bulan.

❖ KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2024

dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja.

Capaian kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.20
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Capaian 2024
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Muda	81	100
			Persentase Wirausaha Muda	8,1 %	5,95%
			Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan	100 orang	100 orang
			Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	2 orang	15 orang
			Persentase Masyarakat Berolahraga	18%	18,03%

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten Kota.

Capaian sub kegiatan ini terlaksana dengan pemberian dana hibah kepada organisasi pemuda.

- b. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda

Capaian sub kegiatan ini yakni terlaksananya Seleksi dan Pemilihan Anggota Korps Musik Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.

2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaran Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Capaian sub kegiatan ini tercapai dengan pemberian dana Hibah.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja ini adalah terlaksananya penyerahan alat alat olahraga di Kecamatan.

Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman peserta dalam kegiatan POPDASU dan POSPEDASU.

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

Capaian kinerja ini adalah terlaksananya pembinaan atlet berprestasi di Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

Capaian kinerja ini adalah terlaksananya pemberian hibah uang kepada

KONI dan NPC Kota Tebing Tinggi.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Capaian kinerja ini adalah terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian kinerja ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Capaian sub kegiatan ini tidak tercapai karena tidak terlaksana.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Capaian kinerja ini adalah terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor, makan minum rapat dan makan minum tamu pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.

- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan Penggandaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.

- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.

- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.
 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 Capaian kinerja ini adalah terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji tenaga harian lepas (THL) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.
 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024.

❖ STATISTIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan pada Bidang Persandian dari Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

1.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

1.1.1. Membangun Metadata Statistik Sektoral.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.21
Capaian Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tebing Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi	1.Meningkatnya tata kelola Pemerintah berbasis E-Government	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan E-Government	SKPD	22	22	100 %
			Jumlah ketersediaan titik layanan fiber optik	Titik	44	44	100 %
			Jumlah data dan meta data yang disebarluaskan pada portal SDI	data	7	7	100 %
			Persentase SKPD yang tereduksi tentang tata kelola keamanan informasi	%	25 %	25 %	100 %
		2.Meningkatnya tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi	Persentase penyebaran informasi Pemerintah Daerah	%	95	95	100 %
			Persentase laporan pengaduan masyarakat secara online	%	86 %	86 %	100 %

			yang ditindaklanjuti tepat waktu				

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

1.1.1. Membangun Metadata Statistik Sektoral.

Capaian Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah tercapainya metadata statistik sektoral yang akan berguna untuk warga Kota Tebing Tinggi.

❖ PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan pada Bidang Persandian dari Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.22

Capaian Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi	1.Meningkatnya tata kelola Pemerintah berbasis E-Government	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan E-Government	SKPD	22	22	100 %
			Jumlah ketersediaan titik layanan fiber optik	titik	44	44	100 %
			Jumlah data dan meta data yang disebarluaskan pada portal SDI	data	7	7	100 %
			Persentase SKPD yang tereduksi tentang tata kelola keamanan informasi	%	25 %	25 %	100 %
		2.Meningkatnya tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi	Persentase penyebaran informasi Pemerintah Daerah	%	95	95	100 %
			Persentase laporan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	86 %	86 %	100 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Capaian Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah terlaksananya Keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik sehingga data penting tidak akan mudah dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

❖ **KEBUDAYAAN**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota adapun Sub kegiatan adalah:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota; Realisasi anggaran 30,64%
Sub Kegiatan ini bertujuan tersedia biaya untuk perlindungan, pengembangan pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan satu Tahun, terdiri atas Hibah Uang kepada Lembaga
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota; realisasi Anggaran 61,42%
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan Sumber daya manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan satu tahun, terdiri atas Bahan untuk menenun Songket, ATK, Upah Tenaga Terampil menenun, Transport Pelatihan menenun
3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota; Realisasi Anggaran 36,90%

1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota adapun Sub kegiatan adalah;

- b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional; realisasi Anggaran 78,52%

Sub kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesenian Tradisional.

2. Program Pembinaan Sejarah

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adapun sub kegiatan adalah;

- a. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah; Realisasi Anggaran 63,68%

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota; Realisasi Anggaran 0%

4. Program Pengelolaan Permuseuman

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota adapun sub kegiatan adalah;

- a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Tujuan dari Sub Kegiatan ini adalah untuk menyediakan Operasional UPTD Museum Kota Tebing Tinggi, realisasi anggaran 69,54% terdiri atas Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan kapasitas SDM Permuseuman, Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum, dan revitalisasi sarana dan prasarana museum.

❖ PERPUSTAKAAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai **tugas** : membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dan tugas pembantuan. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi yang telah diagendakan seperti yang tertuang dalam APBD TA. 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Kegiatan :
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program : Pembinaan Perpustakaan
- Kegiatan : a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program : Program Pengelolaan Arsip
- Kegiatan : a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
4. Program : Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- Kegiatan : a. Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun

Tabel 3.1.23

Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan	Persen	85,95	86,08	100,15

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

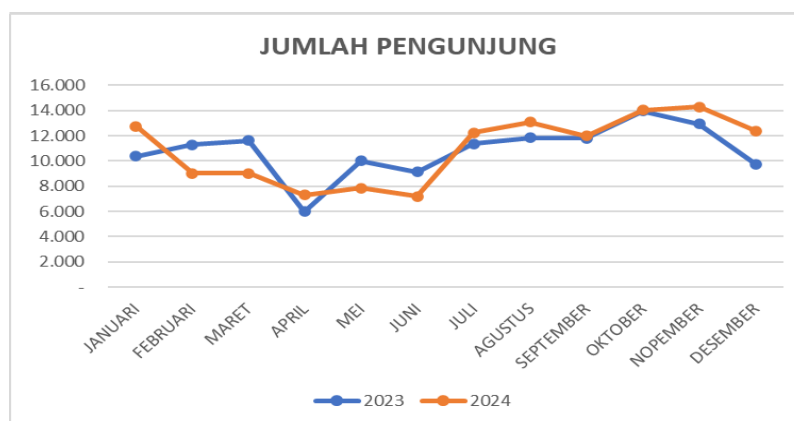
Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2024 adalah sebanyak 131.198 orang yang merupakan pengunjung perpustakaan pada perpustakaan umum, rumah baca, pojok baca digital, pelayanan keliling dan online (website). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menjadi populasi (umur 4 s.d 59 Tahun) Tahun 2024 sejumlah 154.391 orang, maka capaian persentase pengunjung perpustakaan adalah: 86,08% dan hal ini

telah melampaui target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu 85,95% dengan pencapaian 100,15%.

Tabel 3.1.23.1
LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN
Periode 2023 dan 2024

BULAN	Jumlah Pengunjung	
	2023	2024
JANUARI	10363	12.755
FEBRUARI	11304	9.037
MARET	11613	9.031
APRIL	5991	7.304
MEI	10019	7.845
JUNI	9118	7.199
JULI	11359	12.243
AGUSTUS	11833	13.079
SEPTEMBER	11813	11.983
OKTOBER	13966	14.035
NOPEMBER	12925	14.289
DESEMBER	9755	12.398
TOTAL	130.059	132.900
JUMLAH POPULASI	152.409	154.391
PERSENTASE KUNJUNGAN	85,34%	86,08%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



Gambar 3.1. Grafik Jumlah Pengunjung

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan dan kearsipan melalui

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 dapat mencapai capaian kinerja dengan didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

3.1. Program : Pembinaan Perpustakaan

3.1.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Telah terealisasi untuk pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik (server). Kegiatan ini bermanfaat untuk peningkatan layanan berbasis digital kepada masyarakat luas.

3.1.1.2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Telah terealisasi untuk belanja alat tulis kantor, bahan cetak, makan minum rapat untuk pembuatan laporan pengembangan perpustakaan dan untuk biaya lembur pelayanan hari Minggu dan untuk pengumpulan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Kegiatan ini bermanfaat untuk menambah jam kunjungan perpustakaan dan meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan.

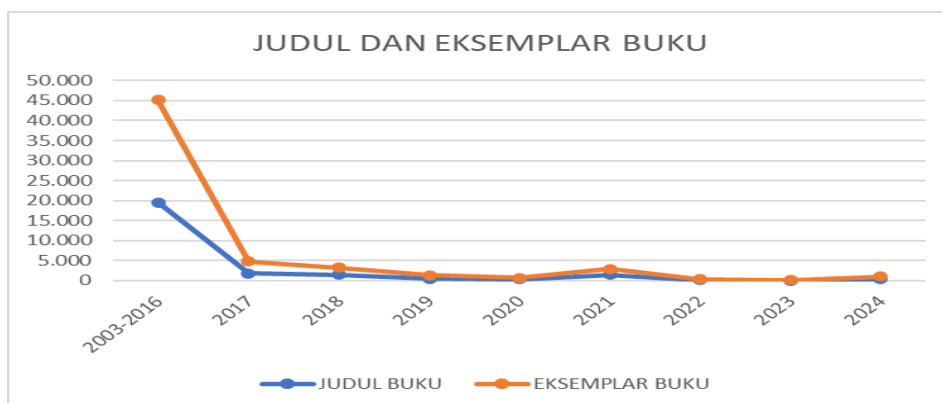
3.1.1.3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Telah terealisasi untuk pembelian 422 judul (1020 eksemplar) koleksi bahan pustaka layanan perpustakaan. Kegiatan ini bermanfaat untuk menambah koleksi bahan bacaan baik tercetak di Perpustakaan Umum Kota Tebing Tinggi. Sehingga jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang ada dari tahun 2003 s.d 2024 Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi adalah :

Tabel 3.1.23.2
JUMLAH KOLEKSI BAHAN PUSTAKA

TAHUN	JUDUL BUKU	EKSEMPLAR BUKU
2003-2016	19.568	45.137
2017	1.790	4.841
2018	1.436	3.244
2019	472	1.320
2020	331	662
2021	1.445	2.890
2022	182	364
2023	74	164
2024	422	1020
TOTAL	25.720	59.627

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



Gambar 3.2. Grafik Jumlah Buku

3.1.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2.1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Telah terealisasi untuk pelaksanaan sosialisasi budaya baca berupa Ngopi Litarasi di Stasiun Bandar Kajum dan di taman revolusi mental. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk mempromosikan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan guna tercapainya peningkatan minat baca masyarakat.

3.1.2.2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Kegiatan ini digunakan untuk Cetak Spanduk, Fotocopy, Nasi Bungkus, Snack, Honorarium Narasumber, Sewa Generator Set, dan Sewa Tenda Senayan pakai Plafon untuk pelaksanaan kegiatan literasi berbasis inklusi sosial. Kegiatan literasi berbasis inklusi sosial dilaksanakan di gedung perpustakaan dengan mengundang narasumber dari

3.2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

3.2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 34 (tiga puluh empat) ASN untuk kesejahteraan ASN. Kegiatan ini bermanfaat untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN untuk kesejahteraan ASN.

3.2.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran belanja alat tulis kantor, belanja cetak/penggandaan, dan lembur. Kegiatan ini bermanfaat untuk penyiapan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

3.2.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.2.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran asuransi 1 gedung dan 1 mobil dinas. Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya keamanan barang milik daerah yang sudah diasuransikan

3.2.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.2.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini digunakan untuk pembelian alat listrik dan elektronik. Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya penerangan pada kantor, rumah baca dan gedung arsip.

3.2.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini digunakan untuk belanja alat tulis kantor, untuk pembelian alat pembersih kantor, untuk pembelian air minum mineral pegawai kantor, snack rapat dan snack tamu.

Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya kenyamanan pegawai dan pengunjung serta kelancaran pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

3.2.4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini digunakan untuk belanja cetak blanko kartu anggota, spanduk dan baliho, map kantor, slip pengembalian buku, buku daftar anggota perpustakaan, buku pengunjung, formulir pendaftaran, dan untuk belanja fotocopy keperluan kantor.

Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya kenyamanan pegawai dan pengunjung serta kelancaran pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

3.2.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini digunakan untuk pembelian surat kabar, majalah dan tabloid. Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya keberagaman bahan bacaan pengunjung perpustakaan.

3.2.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya koordinasi dan konsultasi atas penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

3.2.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.2.5.1. Pengadaan Mebel

Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan kursi kerja staf 7 unit, kursi sofa 8 unit, meja 1/2 biro 2 unit dan pitras 40 meter.

3.2.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan AC Splik 1 PK 6 Unit, Mic wireless 3 Unit, Portable Soundystem 1 Unit, Laptop Acer 1 Unit, Scanner Portable 1 Unit dan Printer 1 Unit.

3.2.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran rekening telepon kantor dan rumah baca, rekening air rumah baca, rekening listrik kantor, rekening listrik rumah baca, rekening listrik gedung arsip, rekening internet dan tv kabel kantor, jasa internet rumah baca dan iuran tahunan website.

Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya kenyamanan pegawai dan pengunjung serta kelancaran pelayanan perpustakaan dan kearsipan

3.2.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran 6 orang jasa pelayanan keamanan, 7 orang jasa kebersihan, 3 orang petugas perpustakaan keliling dan 13 orang administrasi kearsipan.

Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya pembayaran jasa Non ASN demi terlaksananya kelancaran tugas pelayanan perpustakaan dan kearsipan

3.2.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran 1 unit pajak kendaraan dinas, untuk pembayaran BBM, jasa service dan penggantian suku cadang. Kegiatan

ini bermanfaat untuk terpenuhinya kelancaran mobilitas kepala dinas.

3.2.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran 6 unit pajak kendaraan dinas, untuk pembayaran BBM, jasa service dan penggantian suku cadang. Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya kelancaran mobilitas kepala sekretaris dan pelayanan perpustakaan keliling.

3.2.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran service komputer, laptop, printer, AC, mesin cetak kartu anggota, dan perangkat audio visual. Kegiatan ini bermanfaat untuk terpenuhinya kenyamanan pegawai dan pengunjung serta kelancaran pelayanan perpustakaan dan kearsipan

3.2.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dan Pembangunan pagar Rumah Baca Kelurahan Persiakan.

Permasalahan:

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi untuk urusan perpustakaan antara lain :

1. Kurangnya sarana prasarana pendukung layanan perpustakaan terutama untuk pelayanan perpustakaan digital.
2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah baik yang tercetak maupun ebook masih belum lengkap terutama di Rumah Baca dan Pelayanan keliling.

Solusi:

Solusi yang dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Bidang Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi adalah:

1. Dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, terus dilakukan pengembangan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan juga diupayakan bantuan dari Pusat, Provinsi dan CSR sehingga sarana dan prasarana yang ada sekarang dapat memenuhi standar gedung perpustakaan sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota.

2. Untuk memenuhi koleksi buku, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berusaha melaksanakan program penambahan koleksi buku namun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Selain itu juga diupayakan melalui bantuan dari Provinsi, Pusat dan Masyarakat.

❖ KEARSIPAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.1.24

Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Pengawasan Kearsipan	Angka	61,1	70,56	115,48%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Nilai pengawasan kearsipan hasil dari laporan evaluasi pengawasan kearsipan yang dinilai secara eksternal oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 sebesar 70,56 dengan kategori “B” (Baik). Nilai pengawasan kearsipan Tahun 2024 (70,56) jika dibandingkan dengan target kinerja (61,1) maka pencapaian kinerja sebesar 115,48%. Pada tahun 2023 nilai pengawasan kearsipan sebesar 61,05 dengan kategori “B” (Baik) dengan pencapaian kinerja sebesar 100,91%. Hal ini menunjukkan pencapaian capaian kinerja dari 2023 ke tahun 2024 yaitu sebesar 9,51 poin.

Tabel 3.1.25
Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal

No	Aspek/ Komponen	Nilai Aspek	Nilai Aspek
		2023	2024
TOTAL SKOR		61,05	70,56
KATEGORI		B	B

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

3.3. Program Pengelolaan Arsip

3.3.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

3.3.1.1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Kegiatan ini digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, makan dan minum rapat untuk pengelolaan arsip dinamis. Capaian kegiatan ini adalah tercapainya pengelolaan Arsip Dinamis Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip sebesar 100% yaitu 1500 Berkas Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Penyusutan.

Selain itu capaian kegiatan ini juga untuk pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan kepada 4 (empat) OPD yaitu Kecamatan Bajenis, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Padang Hilir, dan Kecamatan Padang Hulu.

3.3.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

3.3.2.1. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Kegiatan ini digunakan untuk pembelian ATK, Kertas, Cetak, Bahan Komputer, alat bahan kegiatan kantor lainnya, Capaian Kegiatan ini adalah telah tercapainya Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis yaitu sebanyak 50 arsip.

3.3.3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

3.3.3.1 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini digunakan untuk bimtek penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) kepada 32 OPD.

3.4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

3.4.1 Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun

Kegiatan ini digunakan untuk pembelian ATK, Cetak, kertas, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, Belanja Jasa Honorarium Narasumber, dan Penyelenggara Acara. Capaian kegiatan ini adalah telah tercapainya Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun sebanyak 343 Arsip.

Permasalahan:

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi untuk urusan kearsipan antara lain :

1. Masih kurangnya pelatihan/ bimbingan teknis yang diberikan kepada pengelola kearsipan baik yang ada di bidang arsip maupun yang ada di unit-unit kearsipan OPD.
2. Belum terlaksananya pengawasan kearsipan kepada seluruh OPD yang telah dilakukan pembinaan di Kota Tebing Tinggi
3. Belum terpenuhinya sarana prasarana Record Center dan Depo Arsip yang sesuai dengan peraturan.

Solusi yang dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Adanya jumlah anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pengarsipan.
2. Pemenuhan gedung arsip sesuai dengan standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan guna menambah jumlah arsiparis yang kompeten dan handal serta berdedikasi) seperti pelaksanaan pelatihan peningkatan kinerja tenaga kearsipan.

Dilaksanakannya e-arsip (SRIKANDI) untuk mempermudah proses pengarsipan.

❖ **KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Kegiatan:

1.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

1.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan:

2.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

2.2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1.26

Capaian Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Jumlah produksi ikan (Ton)	4.579,93	4.420,03	96,51
2	Jumlah produksi benih ikan (Ekor)	7.454.000	7.156.500	96,01
3	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	621,80	626,95	109,82

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2024 pencapaian realisasi fisik untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 100%, kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah pelaksanaan Forum gabungan OPD yang menghadirkan *stakeholder* terkait dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat melalui usulan-usulan kegiatan.

Manfaat dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan

b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor, bahan cetak dan penggandaan, serta terlaksananya rapat – rapat perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah ASN menerima gaji dan tunjangan atas kinerjanya sehingga berdampak pada kinerja SKPD.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan komponen instalasi listrik.

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah terjaganya kestabilan Gedung kantor pada bagian komponen instalasi listrik, sehingga ASN dapat bekerja dengan nyaman di dalam Gedung kantor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Gedung kantor berupa Belanja modal personal komputer (printer).

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah ASN dapat bekerja secara maksimal dan efektif mengikuti perkembangan berbasis teknologi IT.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor, benda-benda pos, alat/bahan perabot dan alat kebersihan kantor, dan belanja makan minum rapat.

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya alat tulis kantor penunjang pelaksanaan kedinasan, peralatan/perlengkapan kerja dan terselenggaranya rapat – rapat kedinasan.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang kinerja ASN.

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Capaian subkegiatan ini adalah terselenggaranya rapat – rapat kedinasan antar wilayah, serta konsultasi dan dapat menghadiri undangan dari berbagai lintas sektor.

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi antar lintas sector.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa biaya tagihan air, tagihan listrik selama 12 bulan.

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan kerja bagi ASN.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya jasa petugas Penyuluh dan BOP Penyuluh sebanyak 22 orang, Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebanyak 7 orang, jasa tenaga administrasi sebanyak 18 orang, jasa petugas kebersihan sebanyak 4 orang, jasa pengontrol pintu air sebanyak 5 orang, jasa petugas keamanan sebanyak 5 orang, jasa tenaga supir sebanyak 1 orang, Biaya Retribusi sampah dan APAR, serta Premi BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan bagi Non PNS selama 12 bulan.

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah menjaga kestabilan kinerja OPD

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Capaian subkegiatan ini adalah tersedianya BBM, terbayarnya pajak, bea, dan perizinan perpanjangan STNK kendaraan dinas (5 unit), dan terbayarnya iuran jaminan/asuransi kendaraan serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas.

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya pajak kendaraan dinas dan tersedianya BBM kendaraan sehingga dapat beroperasi.

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian subkegiatan ini adalah biaya service dan pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya (AC,Laptop, Komputer,printer)

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan kantor untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan.

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Pada tahun 2024 pencapaian realisasi fisik dan keuangan untuk Program Pengembangan Budidaya Perikanan adalah 100%, kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Sub Kegiatan:

- a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Capaian sub kegiatan ini adalah dalam mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan serta mendukung program nasional dalam rangka Peningkatan Konsumsi Ikan dilaksanakan penyaluran bantuan sarana prasarana budidaya ikan sebagai berikut : Kolam Terpal, Benih Ikan Lele dan Pakan Ikan kepada kelompok pembudidaya ikan sebanyak 10 kelompok pembudidaya.

Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi dan pendapatan pembudidaya ikan.

1.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan usaha masyarakat di sektor perikanan maka UPTD BBI telah memproduksi dan menyalurkan benih ikan air tawar berjumlah 1.449.400 ekor yang terdiri dari ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan gurame dan ikan patin.

Manfaat kegiatan ini terpenuhinya permintaan benih ikan dari masyarakat, dan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada tahun 2024 pencapaian realisasi fisik dan keuangan untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah 100%, kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

- 2.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi perikanan dengan melaksanakan pelatihan pengolahan ikan sederhana (Ikan Lele Asap) kepada 5 unit usaha. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan pengetahuan dan ketrampilan serta meningkatkan pendapatan para pelaku usaha pengolahan ikan.

- 2.2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produksi hasil pengolahan perikanan melalui penyaluran bantuan sarana prasarana pengolahan ikan sederhana yaitu sebagai berikut : Ember Sampan Plastik, Pisau Uk. Sedang, Telenan, Plastik Paking, Tong Air, Alat Pengasapan Ikan dan Cool Box kepada 1 kelompok pengolahan dan pemasaran.

Manfaat dari kegiatan ini pelaku usaha pengolahan ikan dapat memproduksi ikan olahan dengan kapasitas yang lebih besar dalam rangka memenuhi permintaan pasar.

❖ **PARIWISATA**

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pembangunan bidang pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan sumberdaya manusia, secara umum meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumberdaya manusia dengan memberi kesempatan, memperoleh,dan menyebarkan informasi Kepariwisataan untuk meningkatkan dan melestarikan nilai budaya bangsa.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang pariwisata.

Capaian kinerja urusan bidang pariwisata sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.27
Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
1	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	4,0 %	4,76%
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	26.947 orang	50.183 orang

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.
Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Capaian Kinerja ini adalah tersedianya booklet pariwisata merupakan media informasi destinasi wisata kota Tebing Tinggi dan tersedianya sinergitas lintas opd pendukung, lembaga kepariwisataan dan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

Capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan sharing peningkatan pariwisata di Kelurahan Bandar Sakti dan Bandar Utama.

❖ PERTANIAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pilihan Bidang Pertanian

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Kegiatan:

1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Kegiatan:

2.1. Pengembangan Prasarana Pertanian.

2.2. Pembangunan Prasarana Pertanian.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Kegiatan:
- 3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

- Kegiatan:
- 4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

- Kegiatan:
- 5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Penyuluhan Pertanian.

- Kegiatan:
- 6.1. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian.

Tabel 3.1.28

Capaian Indikator Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bidang Pertanian

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Produktivitas tanaman Padi (Kw/ha)	69	67,71	98,13
2	Produktivitas tanaman jagung (Kw/ha)	54	55,45	102,68
3	Produktivitas tanaman Ubi kayu (Kw/ha)	471	531,85	112,91
4	Produktivitas tanaman Cabe (Kw/ha)	52	66,26	127,42
5	Produktivitas tanaman Bawang Merah (Kw/ha)	53	67,98	128,26
6	Jumlah produksi tanaman Padi (Kw/ha)	31.780,02	31.399,57	98,8
7	Jumlah produksi tanaman jagung (Kw/ha)	297	1.575	530,30
8	Jumlah produksi tanaman Ubi kayu (Kw/ha)	97.968	142.598	145,55
9	Jumlah produksi tanaman Cabe (Kw/ha)	104	269,48	259,11
10	Jumlah produksi tanaman Bawang Merah (Kw/ha)	159	337,19	212,06
11	Jumlah produksi tanaman Sayur sayuran (Kw/ha)	4.200	7.484	178,19
12	Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Susu (liter)	36.000	36.000	100,00
13	Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Daging Sapi (Ton)	184	184.040	100,02
14	Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Daging Kambing/Domba (Ton)	96	68.136	70,97
15	Panjang Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	1,5	-	-

	yang dibangun/direhab (Km)			
16	Panjang Sarana dan Prasarana Irigasi yang dibangun/direhab (Km)	1	-	-
17	Jumlah rekomendasi Izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, peternakan dan deripat Turunannya	2	1	50%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Kegiatan :

1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub kegiatan:

- a. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi

Capaian dari sub kegiatan ini adalah untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat usaha tani dalam mendukung program ketahanan pangan dari tingkat kios pengencer ke tingkat usaha tani (kelompok tani) agar tersedia tepat waktu serta melakukan pengawasan dan pembinaan penyaluran pupuk dan pestisida, verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di kios pengencer bersama Tim Forkopimda dan OPD Teknis.

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah:

Terlaksananya pengawasan dari masyarakat atau kelompok tani terkait pengadaan, peredaran, dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Kelompok Tani dan masyarakat. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.

- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

Capaian Sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian di Laboratorium Kultur Jaringan dan di Kebun Bibit. Manfaat dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perbanyakan bibit tanaman unggul melalui teknik kultur jaringan dan terlaksananya perbanyakan bibit tanaman di Kebun Bibit.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Kegiatan:

1.2. Pengembangan Prasarana Pertanian.

Sub Kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan kelompok tani melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah tercapainya pelaksanaan kegiatan operasional Pekarangan Pangan Lestari (P2L) meliputi pelatihan budidaya sayuran kepada 8 kelompok tani penerima manfaat P2L, pendampingan oleh Penyuluh Pertanian kepada kelompok tani penerima terkait teknis pelaksanaan kegiatan P2L, pengawalan oleh tim kepada kelompok tani penerima manfaat terkait progres dan kendala yang dihadapi kelompok tani penerima, dan pelaporan kegiatan.

1.3. Pembangunan Prasarana Pertanian.

Sub Kegiatan:

a. Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.

Capaian kegiatan ini adalah *terlaksananya pelayanan yang baik pada Rumah Potong Hewan (RPH) dengan melaksanakan pengadaan kayu api, belanja modal peralatan RPH*

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah tercapainya PAD retribusi UPTD Rumah Potong Hewan dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang digunakan oleh pengguna jasa di RPH.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan:

1.4. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan dan vitamin hewan (Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis), terlaksananya pembinaan kesmavet tentang tata laksana pemotongan hewan kurban yang

sesuai prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dengan mendatangkan Badan Kenaziran Masjid di kota Tebing Tinggi, terlaksananya pembinaan tentang penyakit rabies dengan mengundang masyarakat dan perwakilan dari unsur kelurahan, dan Pengadaan Vaksinasi Rabies untuk pencegahan penyakit menular rabies.

Manfaat dari sub kegiatan ini Tersedianya sarana obat-obatan untuk pelayanan Kesehatan Hewan dan Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular ternak dan kesmavet yang sedang berkembang.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Kegiatan:

1.5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Capaian sub kegiatan ini adalah ketersediaan bahan baku berupa bibit tanaman dan tanaman obat-obatan keluarga bibit berupa tanaman TOGA kepada PKK Kelurahan dan dalam rangka upaya menekan laju inflasi terhadap ketersediaan komoditi cabai merah diberikan bantuan melalui pemberian bantuan berupa bibit tanaman cabai merah dan pupuk cair kepada kelompok tani khususnya kelompok tani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi seperti kelompok tani ubi kayu, dan aneka sayuran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan:

1.6. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

a. **Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk legalitas sayuran organik melalui Lesos (Lembaga sertifikat Organik Seloliman) Kabupaten Mojokerto berupa 1 sertifikat hasil resertifikasi perizinan pertanian organik sayuran. Dari target 2 sertifikat yang direncanakan, hanya tercapai 1 sertifikat, dikarenakan hanya 1 gapoktan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat pertanian organik.

Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai jual dan pendapatan petani sayuran organik.

6. Program Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan:

1.7. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian.

Sub Kegiatan:

a. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan Dan Desa**

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa melalui kegiatan progama dan posko,

Manfaat yang dicapai dengan realisasi sub kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas penyuluh, serta tersedianya penyusunan rencana program budang ketahanan pangan dan hortikultura yang mengacu kepada program strategis daerah yang tertuang didalam rencana program tahunan melalui penyusunan programa penyuluh pertanian yang sistematis dan bersinergi.

b. **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa**

Capaian sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan menciptakan produk unggulan daerah dari sektor hulu ke hilir (lele asap) yang memiliki nilai ekonomis kepada pembudidaya ikan melalui penyaluran bantuan peralatan pengolahan ikan sederhana melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yaitu sebagai berikut : Plastik Packing Ikan, Ember Bulat Sedang, Kayu Api, Mesin Water Pump, Ikan Lele kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Manfaat dari kegiatan ini menciptakan pembudidaya ikan berorientasi pelaku usaha olahan ikan yang memiliki nilai jual berorientasi pasar. Sedangkan untuk belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN tidak dapat

dibayarkan kepada petani sawit (masyarakat yang pekerjaannya berhubungan dengan perkebunan sawit atau derivat turunannya) karena adanya pengalihan anggaran DBH Sawit non infrastruktur ke kegiatan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana bagi Hasil Perkebunan Sawit.

❖ PERDAGANGAN

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.29

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	6	7
1.	Meningkatkannya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB	Angka	24	24
		Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	Persen	75%	71%
		Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100%	100%
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi
		Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	UMKM	160 UMKM	160 UMKM

		Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	Persen	100%	93%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Angka realisasi pada indikator kinerja Pertumbuhan PDRB diperoleh dari dari BPS Kota Tebing Tinggi dalam Angka 2024:

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi meraih penghargaan sebagai berikut:

1. Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Penyerahan Piutang Terbaik dalam Kolaborasi Pengurusan Piutang Daerah Tahun 2024 pada KPKNL Pematang Siantar

2. Tokoh Penggiat Koperasi se- Sumatera Utara Tahun 2024

Adapun inovasi yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi Sipedang (Sistem Informasi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Perdagangan) untuk UPTD Metrologi Legal
2. Kuliner Pasar Kreatif di Pasar Kreatif Kota Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
Sub kegiatan ini berperan dalam menyelesaikan tunggakan Pinjaman Dana Bergulir (PDB-UMKM) Kota Tebing Tinggi. Dari 12 target Pelaku Usaha yang menyelesaikan tunggakan terealisasi sebanyak 8 Pelaku Usaha sebesar Rp. 21.128.486. yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Pelaku UMKM untuk memperoleh

Sertifikasi Halal dengan target 10 Pelaku Usaha dan terealisasi sebanyak 100%.

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Sub kegiatan ini terdiri dari 1 kegiatan bazar yang terdiri dari: Bazar Semarak Ramadhan 1445 H

Kegiatan ini diikuti oleh 50 pelaku UMKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM agar dapat memasarkan produknya di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UMKM Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan

1. Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 30 Orang Pelaku UMKM

2. Pelatihan Membatik Angkatan I

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 30 Orang Pelaku UMKM

3. Pelatihan Membatik Angkatan II

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 30 Orang Pelaku UMKM

4. Pelatihan Peningkatan Skill Pelaku UMKM Milenial dalam Pemanfaatan Aplikasi

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 30 Orang Pelaku UMKM

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN.

2.1 Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

2.1.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Capaian dari kegiatan ini adalah Pemberdayaan Pengelolaan Pasar daerah yang terdiri dari 14 Pasar agar dapat melayani pedagang. Namun pasar dalam kondisi baik sebesar 10 Pasar.

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

3.1. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi

Perdagangan.

Capaian kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah laporan ketersediaan data dan informasi harga di tingkat pedagang setiap hari sebanyak 12 laporan, dan di input melalui aplikasi berbasis Web SiHarapanku

3.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pangan dan memastikan ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Operasi pasar dilakukan agar akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok dapat terjangkau dengan baik, jenis komoditas yang ditawarkan pada pelaksanaan Operasi Pasar berupa Beras Medium/Premium, Minyak Goreng Kemasan, Gula Kristal. Kegiatan ini menghasilkan 13 laporan Pelaksanaan Operasi Pasar.

3.2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Capaian kinerja dari kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios-kios pengecer yang nantinya akan disalurkan ke kelompok tani wilayahnya masing-masing sesuai dengan RDKK kelompok tani. Kegiatan ini menghasilkan 4 laporan per masing- masing Triwulannya.

4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

4.1 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

4.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;

Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk melayani Pedagang agar Alat UTTP di tera/tera ulang, dengan Jumlah UTTP yang tera/tera ulang sebanyak 1.307 alat.

4.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tera/tera ulang yang dilakukan terhadap 98 pelaku usaha.

5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI.

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

5.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berperan dalam pengamanan pasar produk dalam negeri terutama pelaku UMKM untuk mendorong penggunaan produk – produk dalam negeri, baik melalui penerapan berbagai macam regulasi teknis dan tata niaga dalam pengamanan pasar dalam negeri, sosialisasi produk dalam negeri maupun pameran - pameran yang bertujuan dalam pemulihan ekonomi melalui kegiatan APEKSI.

❖ PERINDUSTRIAN

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang ada pada urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi untuk Urusan Pilihan Industri pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3	31	02				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3	31	02	2	01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	02	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pengembangan perindustrian tidak terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis yaitu pengaruh perkembangan global, regional dan nasional. Untuk itu pembangunan industri diarahkan pada penguatan daya saing, pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring (*networking*) industri dalam format klaster yang sesuai baik pada kelompok industri prioritas masa depan, yaitu: industri agro, industri alat angkut, industri telematika, maupun penguatan basis industri manufaktur, serta industri kecil-menengah tertentu. Dalam rangka peningkatan daya saing,

maka pembangunan industri harus saling bersinergi antara nasional dengan daerah dan diarahkan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan *top-down* yaitu pembangunan industri yang direncanakan (*by design*) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Kedua, pendekatan *bottom-up* yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Sejalan dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, pengembangan industri akan lebih efektif jika diarahkan kepada kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi. Sehingga daerah akan berupaya melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi untuk mendukung pengembangan industri dan sesuai dengan kondisi potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Untuk menggerakkan roda Perindustrian di Kota Tebing Tinggi di tampung dalam satu Bidang Industri dengan 3 Seksi sebagai Penyelenggara Kegiatan Industri, dan bekerjasama dengan Dekranasda Kota Tebing Tinggi.

Tabel 3.1.30

Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Urusan Industri pada Tahun 2023 - 2026

No	Sasaran	Capaian Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry	Laju pertumbuhan industry pengolahan/manufacturing	0,5%	0,75 %	1,00 %	1,50 %	- 0,53 %	- 0,53 %	-	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Pada Tahun 2022 terdapat laju pertumbuhan industry pengolahan sebesar 1,23% dan pada Tahun 2023 terdapat penurunan dari Tahun 2022 yakni menjadi sebesar -0,53% berdasarkan data dari BPS Kota Tebing Tinggi. Dan pada Tahun 2024 per januari ini masih berdasarkan data dari Tahun 2023 yaitu sebesar - 0,53% dikarenakan belum release.

Secara data dasar di Buku Pendataan Industri Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi maka jumlah IKM ditetapkan sebanyak 339 IKM tetapi berdasarkan data riel yang diperoleh di lapangan sejumlah 342 IKM. Dan pada Tahun 2022 pendataan Industri di Kota

Tebing Tinggi tidak dilaksanakan disebabkan anggaran yang sangat terbatas sehingga datanya mengikuti data Tahun Anggaran 2021. Begitu juga pada Tahun 2023 maka datanya masih sama dengan data di Tahun 2022. Sedangkan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah IKM sehingga menjadi 2774 IKM.

Tabel 3.1.31
PERSENTASE JUMLAH IKM SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

No.	Nama Industri	Jumlah	%
1.	Industri Makanan	1820	65,61
2.	Industri Minuman	259	9,34
3.	Industri Tekstil	10	0,36
4.	Industri Pakaian Jadi	51	1,84
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	18	0,65
6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya	41	1,48
7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	1	0,04
8.	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	16	0,58
9.	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	50	1,80
10.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	36	1,30
11.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	161	5,80
12.	Industri Barang Galian bukan Logam	9	0,32
13.	Industri Logam Dasar	3	0,11
14.	Industri Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya	24	0,87
15.	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	5	0,18
16.	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdll	6	0,22
17.	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	3	0,11
18.	Industri Furniture	13	0,47
19.	Industri Pengolahan Lainnya	47	1,69
20.	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23	0,83
21.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3	0,11
22.	Pemulihan, Treatment, dan Pembuangan Limbah, dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	13	0,47
23.	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	55	1,98
24.	Perdagangan Eceran, bukan Mobil dan Motor	2	0,07
25.	Aktivitas Penerbitan	7	0,25
26.	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI	17	0,61
27.	Aktivitas Jasa Informasi	9	0,32
28.	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis	8	0,29
29.	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya	4	0,14
30.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa hak Opsi	2	0,07
31.	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	4	0,14
32.	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	54	1,95
	Jumlah IKM	2774	100,00

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program perencanaan dan Pembangunan Industri

1.1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pelatihan Tenun pada tanggal 9 s/d 13 September 2024 di Aula Hotel Malibou Kota Tebing Tinggi dengan pembayaran belanja ATK, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja makanan dan minuman pelatihan, honorarium pembaca doa, honorarium instruktur, belanja sewa gedung pelatihan, belanja penginapan instruktur, belanja uang transport instruktur, belanja uang transport peserta sebanyak 10 orang, SPPD dalam rangka rapat kerja Dekranasda dan rapat kerja teknis program Dekranasda, HUT Dekranasda, belanja baju batik Dekranasda, kegiatan Sosialisasi Perizinan dan SIINas pada tanggal 13 s/d 14 November 2024 di Aula Hotel Malibou Kota Tebing Tinggi dengan pembayaran transport peserta sebanyak 40 orang, sewa gedung, honorarium narasumber, belanja map kancing, belanja fotocopy, honorarium rohaniwan, belanja makan minum kegiatan.

1.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 27 Februari s/d 04 Maret 2024, dan tanggal 01 s/d 07 Oktober 2024 dengan pembayaran SPPD untuk 10 orang, belanja bahan cetak fotocopy, belanja kertas dan cover, belanja materai, belanja alat/bahan komputer, sewa stand pameran, dekorasi stand pameran, SPPD kegiatan bidang industry lainnya. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah dikenalnya produk lokal Kota Tebing Tinggi yang berkualitas, mempunyai daya jual, dan daya saing pada tingkat nasional.

❖ PERENCANAAN

BADAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Adapun capaian indikator kinerja Tahun 2024 sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.32
Capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4
1.	Predikat AKIP Bappeda	A	BB
2.	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Daerah dalam RPD yang mencapai target	80	78,94
3.	Persentase Pemanfaatan hasil itbang/inovasi daerah	100	100
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bappeda	91	93,75

Sumber : Bappeda

1. Indikator Kinerja: Predikat AKIP BAPPEDA
 - a. Indikator ini adalah untuk melihat hasil penilaian Inspektorat Kota Tebing Tinggi atas laporan kinerja BAPPEDA. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 Nomor 700.04/189/E/ITKO/2024 tanggal 15 Juli 2024, capaian untuk Predikat AKIP BAPPEDA adalah BB dengan nilai sebesar 75,95. Capaian kinerja ini dibawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu kategori A.
 - b. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki kedepannya dalam penguatan akuntabilitas kinerja adalah menindaklanjuti laporan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi
2. Indikator Kinerja : Persentase Indikator Kinerja Sasaran Daerah dalam RPD yang

mencapai target, Indikator ini untuk melihat pencapaian indikator sasaran daerah yang tercapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi dibandingkan dengan indikator sasaran daerah yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja sebesar 78,94%. Namun capaian ini dapat berubah setelah mendapat data dari badan/Lembaga/kementerian yang memberikan penilaian.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Adapun Program dan Kegiatan beserta Capaian program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah laporan capaian kinerja

1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah dokumen evaluasi kinerja

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN dan tambahan penghasilan

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian sub kegiatan ini adalah laporan keuangan dan aset perangkat daerah

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kebersihan kantor

1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor dan makanan dan minuman rutin

1.3.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan kantor

1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi dalam provinsi dan luar daerah provinsi

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Capaian sub kegiatan ini tersedianya kendaraan dinas operasional

1.4.2. Pengadaan Mebel

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya mebeleur

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa tenaga honorer kantor

1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya daya listrik, air dan internet kantor

1.5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor

1.5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas

1.6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian sub kegiatan ini adalah gedung dalam kondisi baik

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

2.1.1 Pelaksanaan konsultasi publik

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya konsultasi publik RKPD

2.1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya musrenbang RKPD

2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

Capaian sub kegiatan ini adalah ditetapkannya dokumen perencanaan daerah (RKPD).

2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

2.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan

2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia

3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.

3.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Capaian sub kegiatan ini adalah sinkronisasi dokumen renstra/renja perangkatdaerah dengan RPJMD/RKPD bidang pembangunan manusia

3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian

3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian

3.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian

Capaian sub kegiatan ini adalah sinkronisasi dokumen renstra/renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang perekonomian

3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur

3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur

3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Capaian sub kegiatan ini adalah sinkronisasi dokumen renstra/renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur

3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang kewilayahan

3.3.6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Capaian sub kegiatan ini adalah sinkronisasi dokumen renstra/renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang kewilayahan

❖ KEUANGAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.2 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Pada tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dan capaian realisasi nya adalah:

- 1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
- 2) Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah

Tabel 3.1.33
Capaian Kinerja 2024 BPKPD

N o	Indikator	Target	Realisasi
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 2023	WTP	WTP
2	Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah	97	99,5

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

Salah satu tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi adalah meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, yang mana indikator tujuannya adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Dalam hal ini hasil audit BPK pada tahun 2024 terhadap laporan keuangan daerah tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun langkah langkah yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

- Meningkatkan penyajian laporan keuangan secara bertanggungjawab, transparan, efektif, efisien serta berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- Melakukan pelaporan sesuai dengan tata cara dan tanggung jawab pelaporan sesuai dengan aturan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Kualitas SDM ASN yang melakukan penyusunan laporan keuangan daerah
- Tanggap dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud
- Meningkatnya kualitas proses maupun laporan hasil inventarisasi asset daerah

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures)
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern

Realisasi Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah sebesar 99,5 diperoleh dari Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pajak Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. Nilai diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dirata-ratakan.

Pada Bidang Pendapatan dan Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB terdapat Pajak Daerah yang dikelola oleh BPKPD dengan target dan realisasi pajak daerah sebagai berikut :

Realisasi Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah sebesar 99,5 diperoleh dari Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pajak Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. Nilai diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dirata-ratakan.

Pada Bidang Pendapatan dan Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB terdapat Pajak Daerah yang dikelola oleh BPKPD dengan target dan realisasi pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1.33.1
Capaian Pajak Daerah 2023 & 2024

Uraian	2023	2024
Target	Rp 41.335.740.000,00	Rp 40,970,740,000,00
Realisasi	Rp 41.473.085.271,00	Rp 38,630,280,318,00

Dalam upaya peningkatan pelayanan dan pencapaian target pendapatan daerah, Bidang PBB dan BPHTB pada tahun 2024 telah melaksanakan pemuktahiran data dan pendataan wajib PBB yang tujuannya agar wajib PBB dapat teridentifikasi dengan jelas.

SPPT yang diterbitkan sebanyak 53.386 dengan rincian :

Tabel 3.1.33.2
Realisasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan 2023 & 2024

Bidang PBB	2023	2024
SPPT yang diterbitkan	53.386 SPPT	55.163 SPPT
SPPT yang terbayarkan	28.304 SPPT	37.840 SPPT

Dan juga untuk BPHTB juga telah bekerja sama (PKS) dengan Badan pertanahan nasional nomor 394/100.1276/V/2020 nomor 100/3428/Pemer/2020 tanggal 14 mei 2020 tentang Pendaftaran Tanah, Penangananan permasalahan aset tanah, pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Perjanjian Kerjasama Sama (PKS) nomor 119/2548/BPKPAD/2020 nomor 3/SKB- 1276/VI/2020 tanggal 29 juni 2020 tentang pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan perdesan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
 - I. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan; Realisasi Anggaran 100%.
 - II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.

- III. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan barang milik daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor; Realisasi Anggaran 100%.
 - c. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan; Realisasi Anggaran 100%.
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Realisasi Anggaran 100%.
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
- V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan kendaraan dinas dan operasional atau lapangan; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Pengadaan mebel; Realisasi Anggaran 100%.
 - c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; Realisasi Anggaran 100%.
- VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; Realisasi Anggaran 100%.
- VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; Realisasi Anggaran 100%.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.
 - c. Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya ; Realisasi Anggaran 100%.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ;

Realisasi Anggaran 100%.

- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD ; Realisasi Anggaran 100%.dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD; Realisasi Anggaran 100%.
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD ; Realisasi Anggaran 100%.

2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD; Realisasi Anggaran 100%.
- c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- d. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Realisasi Anggaran 100%.
- e. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; Realisasi Anggaran 100%.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ; Realisasi Anggaran 100%.
- g. Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait; Realisasi Anggaran 100%.
- h. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan

Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Sub kegiatan; Realisasi Anggaran 100%.

- i. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota; Realisasi Anggaran 100%.

2.3 Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban; Realisasi Anggaran 100%.
- c. Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran; Realisasi Anggaran 100%.
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota; Realisasi Anggaran 100%.
- f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Capaian sub kegiatan ini adalah untuk belanja ATK dan cetak Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Sub kegiatan ini bermanfaat untuk tersedianya laporan realisasi APBD; Realisasi Anggaran 100%.
- g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- h. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- i. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota; Realisasi Anggaran 100%.

2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok

- dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; Realisasi Anggaran 100%.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah ; Realisasi Anggaran 100%.

- a. Penyusunan Standart Harga; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- d. Inventarisasi Barang Milik Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- f. Penilaian Barang Milik Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- h. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah ; Realisasi Anggaran 100%.
- i. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah/ Kota; Realisasi Anggaran 100%.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- c. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah ; Realisasi Anggaran 100%.
- d. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- e. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- f. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah; Realisasi Anggaran 100%.

❖ **KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Program dan Kegiatan BKPSDM

1. Program Pengembangan Kompetensi ASN
2. Program Mutasi dan Promosi ASN
3. Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
4. Program Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Realisasi Program BKPSDM Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.34
Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kota Tebing Tinggi
Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tujuan : Mewujudkan aparatur daerah yang profesional dan prima dalam pelayanan					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi aparatur daerah					
1.	Persentase tingkat pendidikan formal ASN Daerah jenjang S1, S2 dan S3	%	75	74,17	98,89
2.	Jumlah ASN Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	950	475	50,00
Ratarata Capaian Sasaran Strategis 1					74,45
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah					
3.	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	%	80	76,63	95,79
4.	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin ASN	%	25	20,00	80,00
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan administrasi kepegawaian	%	98	97,75	99,74
6.	Persentase tingkat akurasi data dan informasi kepegawaian	%	98	95	96,94
Ratarata Capaian Sasaran Strategis 2					93,12
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM					
7.	Nilai Evaluasi AKIP BKPSDM	Nilai	71,80 (BB)	71,95 (BB)	100,21
Ratarata Capaian Sasaran Strategis 3					100,21
RATA – RATA CAPAIAN IKU					89,26

Sumber: BKPSDM Kota Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Pemerintahan BKPSDM Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Realisasi Anggaran 100%.
- b) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Bealisasi Kinerja SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.

c. Adminstrasi Keuangan perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- b) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan; Realisasi Anggaran 100%.
- d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 100%.
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 100%.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusasn Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan; Realisasi Anggaran 100%.
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Realisasi Anggaran 100%.
- c) Pemeliharaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

2. Program Kepegawaian Daerah

a. Pengembangan Kompetensi ASN

- a) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; Realisasi Anggaran 50%.

b. Mutasi dan Promosi ASN

- a) Pengelolaan Mutasi ASN; Realisasi Anggaran 95,79%.
- b) Pengelolaan Promosi ASN; Realisasi Anggaran 95,79%.
- c) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; Realisasi Anggaran 99,74%.

c. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- a) Penyusunan Rencana kebutuhan, Jenis dan jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Realisasi Anggaran 95,79%.
- b) Koordinasi Pelaksanaan Adminstrasi Pemberhentian; Realisasi Anggaran

99,74%.

- c) Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian Realisasi Anggaran 99,74%.

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Realisasi Anggaran 80%.
- b) Pembinaan Disiplin ASN Realisasi Anggaran 80%.
- c) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Realisasi Anggaran 80%.

3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota

- a) Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan; Realisasi Anggaran 100%.

- b. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 100%.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- a) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ; Realisasi Anggaran 100%.

- b. Penerbitan Sertifikat produksi pangan Industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Realisasi Anggaran 100%.

- a) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Dan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga; Realisasi Anggaran 100%.

- c. Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga
- a) Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan; Realisasi Anggaran 100%.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota; Realisasi Anggaran 100%.
- b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 100%.
Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 100%.

❖ PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Adapun capaian indikator kinerja Tahun 2024 sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.35
Capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2024	Realisasi 2024	Keterangan	Sumber Data
1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Prevalensi Stunting	%	13		diperkirakan Tercapai	Dinkes (SK) Tahun 2023 = 10,4%
2 Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	2 Angka kesakitan	Persen	11,5	3,00	Tercapai	BPS : Indikator Kesejahteraan Rakyat kota Tebing Tinggi Tahun 2024
	3 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,8	74,29	Tercapai	BPS : Indikator Kesejahteraan Rakyat kota Tebing Tinggi Tahun 2024
	4 Rata-Rata Iam Sekolah	Tahun	10,3	10,87	Tidak Tercapai	BPS : IFM Kota Tebing Tinggi Tahun 2024
3 Meningkatkan Kompetensi ASN	5 Indeks Profesionalitas ASN	%	70	76,03	Tercapai	BKPSDM
4 Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangkaan hidup	6 Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial
5 Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor unggulan	7 Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	%	70,5		diperkirakan Tercapai	BPS
	8 Pengeluaran riil per kapita (Ribu/kapita)	Rupiah	13.746	13.900	Tercapai	BPS
6 Meningkatkan Investasi	9 Nilai Investasi	Milyar Rupiah	170	142	Tidak Tercapai	DPMPSTP
	10 Indeks Rasa Aman	Persen	73,05	74,60	Tercapai	Badan Kesbang
7 Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	11 Persentase cakupan Sanitasi yang Layak	Persen	87,10%	90,23%	Tercapai	Dinkes
	12 Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	Persen	72,60%	71,67%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR dan PDAM
8 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	13 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	poi	85%	94,05%	Tercapai	BPBD
	14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,77	60,25	Tercapai	Surat Sekjend Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan No. S.276/SETPPKL/PEHKT/OTH. 0.2/B/H2/20024 tanggal 6 Desember 2024
9 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	15 Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	Tercapai	Bag. Organisasi
	16 Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	w/TP	w/TP	Tercapai	BPKPD
	17 Indeks SPBE	Poin	2,7	3,79	Tercapai	Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda Tahun 2024
10 Pelayanan Publik yang Prima	18 Indeks Pelayanan publik	Predikat	Prima	Sangat Baik	Tidak Tercapai	Keputusan Menpan RB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lingkup Pemda Tahun 2024
	19 IKM	Poin	85	95,25	Tercapai	Bag. Organisasi

Sumber : BAPPEDA Kota Tebing Tinggi

- Indikator Kinerja : Persentase Pemanfaatan Hasil Litbang/Inovasi Daerah tercapai 100%, hasil inovasi dan teknologi yang ada di Kota Tebing Tinggi dimanfaatkan dalam pelayanan publik dalam pengelolaan pembangunan.
- Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bappeda tercapai dengan indeks 93,75 dari target yang ditetapkan sebesar 91.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

4.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

4.1.1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Capaian sub kegiatan ini adalah terkelolanya data kelitbangan dan peraturan

❖ SEKRETARIAT DAERAH

🚦 BAGIAN UMUM

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Bagian Umum Setdako Tebing Tinggi yang telah diagendakan seperti yang tertuang dalam APBD TA. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Koordiasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

j. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja Bagian Umum sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.36
Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Temuan Hasil Pengawasan Yang Diselesaikan	100%
2.	Persentase Tugas-Tugas Kedinasan Walikota dan Wakil Walikota Diselesaikan Tepat Waktu	100%

Sumber: Bagian Umum Setdako Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Capaian realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN Sekretariat Daerah dan insentif pajak daerah dan retribusi serta gaji, tunjangan.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah.

b. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Capaian Sub Kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Capaian Sub Kegiatan ini adalah tersedianya belanja operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang di asuransikan sebanyak 23 Unit Mobil dan 7 Gedung/ Rumah Dinas.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Capaian sub kegiatan tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan di Sekretariat Daerah.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan kebersihan kantor.

- Penyediaan bahan Logistik Kantor

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya ATK untuk kelancaran tugas dan kegiatan di Sekretariat Daerah.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan pengadaan.

- Fasilitas Kunjungan Tamu

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya penjamuan tamu-tamu, Pejabat Daerah, Pejabat Negara dan silaturahmi KDH dan WKDH.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian subkegiatan ini adalah lancarnya kegiatan untuk rapat dan koordinasi kedalam dan luar daerah.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional untuk PKK.

- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan kantor dan rumah dinas berupa Exhaust Fan sebanyak 1 unit, Kursi Pimpinan sebanyak 1 unit, Travo 400KVA sebanyak 1 unit, Laptop sebanyak 1 unit, Printer sebanyak 1 unit, Lemari Pakaian 3 pintu sebanyak 2 pintu, Lemari Pakaian 2 Pintu Jati sebanyak 2 Pintu, Mesin Cuci dan Pengering Sebanyak 1 unit, Lemari Es 2 Pintu sebanyak 2 unit, AC Split 2 PK sebanyak 2 unit, Meja Makan 6 kursi sebanyak 1 unit, Sofa 3 seat sebanyak 1 unit, Sofa kayu sebanyak 1 set, Gordyn sebanyak 37 set, kitchen set sebanyak 1 set, Bed cover king size sebanyak 2 set, Spring bed sebanyak 1 buah, Ambal Jumbo sebanyak 4 buah, Tempat Tidur Comfor Layer, Ortho Spring sebanyak 1 unit, Meja rias, tempat tidur 3 kaki, TV LG 65, Scanner Portable, Laptop Acer, dan Ulos Toba

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Capaian sub kegiatan ini adalah terjaga kebersihan kantor Sekretariat Pemko Tebing Tinggi oleh 90 Tenaga Kebersihan.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Capaian subkegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan genset sebanyak 4 unit, kendaraan dinas sebanyak 28 Unit, dan pembayaran pajak STNK sebanyak 27 unit dan BBM Kendaraan Dinas.

- **Pemeliharaan Mebel**

Capaian Subkegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan mebel sebanyak 300 unit inventaris kantor.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Capaian subkegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dirumah jabatan/dinas,

terpeliharanya peralatan di Sekretariat Daerah, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Capaian subkegiatan ini adalah terpeliharanya taman dan bangunan gedung Sekretariat Daerah, terpeliharanya taman dan bangunan Rumah Dinas.

i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Capaian sub kegiatan tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

j. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah**
Capaian sub kegiatan ini Terpenuhinya belanja dapur, perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi KDH.
- **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah**
Capaian sub kegiatan ini Terpenuhinya belanja dapur, perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi WKDH.

 BAGIAN ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi yang telah diagendakan seperti yang tertuang dalam APBD TA. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penataan Organisasi

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Bagian Organisasi sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.37
Indikator Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,26
2.	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78,7
3	Jumlah SKPD yang Nilai IKM-nya Kategori Sangat Baik Berdasarkan Pengukuran Kepuasan Masyarakat yang Dilakukan	83,39

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penataan Organisasi

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Capaian pada Sub Kegiatan di bagian pengelolaan kelembagaan yaitu tersedianya Produk Hukum diantaranya:

- Peraturan Wali Kota Kota Tebing Tinggi No. 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Peraturan Wali Kota tersebut merupakan perubahan kedua yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Wali Kota Kota Tebing Tinggi No. 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun alasan perubahan dilakukan yaitu penghapusan UPTD

laboratorium terpadu yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi sehingga peraturan Wali Kota tersebut harus diperbarui.

- Peraturan Wali Kota Kota Tebing Tinggi No. 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota No. 53 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Peraturan Wali Kota tersebut merupakan perubahan kedua yang mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Wali Kota Kota Tebing Tinggi No. 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota No. 53 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Adapun alasan perubahan dilakukan yaitu pada pasal 3 ayat 1, UPTD RSUD merupakan unit organisasi bersifat fungsional, diubah menjadi bersifat khusus. Kemudian pada pasal 9, pasal 12 ayat 4 dan pada bagan struktur organisasi RSUD kata sub koordinator dihapuskan dikarenakan mengikuti Peraturan Wali Kota No.12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.. Penerbitan Peraturan Walikota ini dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu untuk meninjau kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yang tadinya di dalam struktur organisasi masih ada sub koordinator di bawah Bidang, di dalam peraturan walikota yang baru sub koordinator telah dihapuskan. Pada Susunan organisasi yang baru juga telah ditambahkan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada langsung di bawah Kepala Perangkat Daerah.

Pada bagian Analisis Jabatan telah dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Jabatan dan Informasi Jabatan kedalam aplikasi SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan BKN. Adapun pelaksanaan ini dilaksanakan untuk memuat seluruh informasi Jabatan dan Peta Jabatan seluruh perangkat Daerah tercakup di dalam satu aplikasi kebutuhan. Kedepan nya output dari

penginputan SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan kemudian digunakan oleh BKPSDM untuk mendata Jumlah Kebutuhan Pegawai maupun ketersediaan Pegawai di suatu organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya bisa dirangkum kedalam pemenuhan pegawai baru yaitu CPNS dan PPPK.

2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Capaian pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana diantaranya:

1. Sosialisasi Pedoman Menpan Rb Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan PEKPPP yang terdiri atas kegiatan pemantauan, PEKPPP mandiri dan PEKPPP khusus serta bisa menjadi pelaksanaan penilaian kegiatan PEKPPP.
2. Sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Manfaat dari pelaksanaan sosialisasi ini diantaranya: a. memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik; dan b. menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.
3. Sosialisasi Permendagri No 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan di sosialisasikannya permendagri no 10 tahun 2024 tersebut diharapkan seluruh ASN baik di lingkungan kementerian dan Pemerintah Daerah memakai pakaian seragam yang sama baik dari warna baju, atribut, sepatu dan jilbab.

3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Capaian dari Sub kegiatan ini diantaranya:

- Tersusunnya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- Peraturan walikota tebing tinggi nomor 19 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2024. Pada tahun 2024 telah terbit peraturan walikota tebing tinggi nomor 19 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2024. Peraturan walikota ini dibuat untuk melaksanakan Permenpanrb nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk menajamkan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024. Penajaman ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing dengan tujuan mempercepat terwujudnya birokrasi digital, Mempercepat penyelesaian isu hulu dan hilir, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan nasional. Sebelum perubahan, kegiatan utama reformasi diarahkan pada delapan area perubahan. Setelah perubahan, sasaran dan kegiatan utama reformasi birokrasi telah ditetapkan secara tertulis dan bersifat mandatory. Selain itu terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan. Sebelumnya terdapat dua komponen dalam penilaian Reformasi Birokrasi yaitu komponen pengungkit dan hasil. Setelah adanya perubahan roadmap, terdapat dua komponen yaitu komponen RB General dan Komponen RB Tematik

4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Capaian dari Sub kegiatan ini diantaranya:

1. Peraturan Wali Kota nomor 21 tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota tersebut untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhaaan birokrasi serta mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan pengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan tidak lanjut. Survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi sikemas untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dengan Aplikasi ini

mempermudah pemerintah kota tebing tinggi dalam hal mengukur kepuasan pelayanan terhadap pengguna layanan yang dilayani di masing-masing unit pelayanan publik karena dapat langsung dilihat berapa nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dan dilakukan tindak lanjut terhadap unsur layanan yang masih rendah di buat dalam bentuk laporan dan laporan tersebut di kirim dan disampaikan ke biro organisasi provinsi dan ke kementerian PAN RB.

3. Laporan Forum Konsultasi Publik dan Tindak Lanjut. Forum konsultasi publik dilakukan guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. fkp diselenggarakan untuk mendapatkan keselarasan antara harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan, memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan, sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
4. Laporan Survei Pelayanan Publik TW I-TW IV. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini agar seluruh unit penyelenggara pelayanan publik tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kualitas pelayanan publik dengan cara memperbaharui standar pelayanan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan mempublikasikan secara elektronik dan non elektronik serta seluruh unit penyelenggara pelayanan publik agar memelihara seluruh atribut pelayanan publik dan melengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk pengguna layanan.
5. Survei kepuasan Masyarakat TW I-III Tahun 2024. Survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi sikemas untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan terhadap pengguna layanan. Dan dapat dilihat langsung berapa nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dan dilakukan tindak lanjut terhadap unsur layanan yang masih rendah di buat dalam bentuk laporan.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan kinerja tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2023, dan tersedianya dokumen laporan kinerja tahunan perangkat daerah tahun 2023. Adapun tujuan dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian kinerja setiap indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja di lingkungan pemerintah kota Tebing Tinggi dan sebagai dasar untuk mengetahui faktor keberhasilan, kegagalan dan penetapan solusi yang diperlukan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.1 Program dan Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Program Bagian Protokol Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran:

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung target kinerja yang dicapai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.38
Capaian Kinerja Bagian Protokol Kota Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase tugas-tugas kedinasan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diselesaikan tepat waktu.	100%	95%	95%

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan urusan Bagian Hukum capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran 95%.

1.2 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Realisasi Anggaran 732 Laporan

1.3 Fasilitasi Keprotokolan

- a. Jumlah ASN/Masyarakat Yang Mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Realisasi Anggaran 312 Laporan

1.4 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

- a. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan; Realisasi 108 Laporan

1.5 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

- a. Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan; Realisasi 312 laporan

 BAGIAN PEMERINTAHAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.1 Program dan Kegiatan Bagian Pemerintahan

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Realisasi Program Bagian Pemerintahan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Urusan Pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1.1 Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan :

A. Penataan Administrasi Pemerintahan

1.2 Kegiatan : Administrasi Kewilayahan

Sub Kegiatan:

A. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

B. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.

1.2 Kegiatan : Kerjasama dan Otonomi Daerah

Sub Kegiatan :

A. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

B. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.39

Indikator Sasaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	MENINGKATNYA PERKEMBANGAN KELURAHAN	JUMLAH KELURAHAN DENGAN KATEGORI CEPAT BERKEMBANG	81 (PERSEN)
2.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	JUMLAH KECAMATAN DENGAN KATEGORI BAIK	50 (PERSEN)
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	JUMLAH KELURAHAN DENGAN KATEGORI BAIK	50 (PERSEN)

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1.1 Sub Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

Penataan Administrasi Pemerintahan; Realisasi Anggaran 94%.

Capaian Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Penyusunan LKPJ, terlaksananya Kegiatan Saber Pungli, dan terfasilitasinya Kegiatan Kunjungan Kerja Dari Luar Daerah.

1.2 Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan; Realisasi Anggaran 88%.

Capaian Sub Kegiatan ini adalah tersedianya data Administrasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, tersedianya Data Rencana Kerja Pada Bagian Pemerintahan (Renja), terlaksananya Kegiatan Lomba Kecamatan dan Kelurahan, dan terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelurahan.

1.3 Sub Kegiatan : Kerjasama Dan Otonomi Daerah

Fasilitasi Kerjasama Daerah; Realisasi Anggaran 92%

Capaian Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat Kerja Sama Daerah, terlaksananya kegiatan Penyusunan LPPD, terlaksananya Kegiatan Penyusunan SPM, dan terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kerja Sama Daerah.

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sebagai acuan pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya. Secara umum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah memberikan kontribusi positif pada pencapaian kinerja organisasinya.

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung target kinerja yang dicapai pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Sub Kegiatan:

- 1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- 1.2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 1.3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2. Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan:

- 2.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- 2.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- 2.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Tabel 3.1.40

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengelolaan PDAM Tirta Bulian	Nilai Kinerja Keuangan	Angka	0,61
			Nilai Kinerja Pelayanan	Angka	0,50
			Nilai Kinerja Operasional	Angka	1,28
			Nilai Kinerja Sumber Daya Manusia	Angka	0,47
		Terlaksananya kebijakan	Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	Laporan	30

		daerah di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Dokumen	1
			Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	Dokumen	2
			Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik	Dokumen	2
2	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya kebijakan daerah di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	Dokumen	12
			Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD	Dokumen	12

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan urusan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Presentase pengadaan barang/jasa yang diusulkan OPD terlaksana

secara akuntabel dan transparan; Realisasi 67 Dokumen

- B. Dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang/jasa Realisasi 67 Dokumen
- C. Dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik Realisasi 67 Dokumen
- D. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa Realisasi 18 Orang

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.41

Indikator Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Tebing Tinggi

Tabel 3.1.41.1

Capaian Kinerja Keluaran

No	Indikator Kinerja Utama	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
1	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	91.3%
2	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial	100 %	92,76%
3	Persentase Peningkatan Bina Mental Spiritual	100 %	95.65%

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Capaian realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
 - i. Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spiritual.

Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja alat tulis kantor, belanja makan dan minum pelaksanaan rapat, Belanja Natura dan Pakan Natura, Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, Honorarium Rohaniawan, Jasa juri, Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan, Belanja sewa Peralatan Studio Audio, Belanja sewa Peralatan Umum, , belanja lembur pegawai dan belanja perjalanan dinas. sebanyak 105 Guru Ba'da Maghrib dan 12 Guru Sekolah Minggu,. Kegiatan ini bermanfaat untuk pembinaan Mental Spiritual di Kota Tebing Tinggi. Kegiatan ini Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual di Kota Tebing tinggi sehingga meningkatkan Kepuasan Masyarakat akan pelayanan Sekretariat Daerah Kota khususnya bagian Kesejahteraan Rakyat.

- ii. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja alat tulis kantor, belanja makan dan minum pelaksanaan rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio, Belanja Sewa Peralatan Umum, belanja perjalanan dinas dan lain sebagainya. Kegiatan ini bermanfaat agar terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Masyarakat antara lain Upacara Hari Jadi Kota tebing Tinggi dan Upacara Hari peristiwa berdarah 13 Desember di kota tebing tinggi. Kegiatan tersebut akan berperan dalam mewujudkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang baik good governance sehingga meningkatkan kepuasan masyakat terhadap Sekretariat daerah kota Tebing Tinggi.

- iii. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.

Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja alat tulis kantor, belanja makan dan minum pelaksanaan rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio, Belanja Sewa Peralatan Umum, Belanja Hibah, Belanja perjalanan dinas dan lain sebagainya. Kegiatan ini bermanfaat agar terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial antara lain Festival Nasyid baik Tingkat

Kota, Provinsi maupun Nasional di kota tebing tinggi. Serta Pemberian Hibah kepada Badan dan lembaga nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, serta Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa/i berprestasi yang berasal dari kota tebing tinggi Kegiatan tersebut akan berperan dalam mewujudkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang baik good governance, meningkatkan minat Mahasiswa untuk pendidikan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Sekretariat daerah kota Tebing Tinggi.

 BAGIAN HUKUM

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 terjadi pergeseran dan Perubahan Anggaran sehingga ada refocusing. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah 4 Nomor Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.42
Capaian Indikator Sasaran Sesuai Target Perjanjian Kinerja Bagian Hukum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terpenuhi Asas Pembentukan Hukum yang	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Pembentukan Hukum	100%	100%	100%

	Baik	Yang Baik			

Sumber: Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah memenuhi target yang direncanakan.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Target Sasaran dan Indikator Kinerja Bagian Hukum Tahun 2024 didukung oleh Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pada kegiatan ini telah terlaksana :

Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium 3 orang Narasumber, Honorarium 1 orang Moderator, Honorarium 1 orang MC, Honorarium 1 orang Rohaniawan, Honorarium 1 orang Pemimpin Lagu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa Peralatan Audio

Dan Tahun 2024 telah dilaksanakan 2 kali Sosialisasi tentang:

1. optimalisassi layanan pembebasan biaya perkara (PRODEO) dan Launching Aplikasi E-Cut (E-Court, Unite, Transformation) di Lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
2. Peran kejaksaan dalam mendukung pembangunan daerah
Kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan informasi peraturan perundang-undangan kepada ASN/Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

2. Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan : Fasilitasi dan Kordinasi Hukum

Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pada kegiatan ini telah terlaksana :

"Belanja cetak, belanja alat kegiatan kantor lainnya, belanja makan minum rapat, belanja honorarium sebanyak 14 orang, belanja lembur pegawai sebanyak 9

orang, belanja perjalanan dinas biasa.

Dan manfaat dari kegiatan ini adalah ;

- Telah menerbitkan 5 Peraturan Daerah
- Telah menerbitkan 36 Peraturan Wali Kota
- Telah menerbitkan 629 Keputusan Wali Kota

Kegiatan ini bermanfaat untuk membahas seluruh produk hukum daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota maupun Keputusan Wali Kota sehingga rancangan produk hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.

2. Fasilitas Bantuan Hukum

Pada kegiatan ini telah terlaksana :

Belanja kertas, belanja cetak, belanja materai, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas biasa, honorarium tenaga ahli jaksa pengacara negara Pemko tebing tinggi sebanyak 4 orang, belanja registrasi/keanggotaan (biaya penanganan perkara), Belanja tenaga ahli (advokad) sebanyak 2 orang.

Dan manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan bantuan dan fasilitas hukum menyangkut Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang membutuhkan pendampingan dalam sebuah proses hukum yang sedang berjalan.

3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Pada kegiatan ini telah terlaksana :

'Belanja cetak, belanja perjalanan dinas biasa

Peraturan Daerah : 5

Peraturan Wali Kota : 36

Keputusan Wali Kota : 629

Kegiatan ini bermanfaat untuk menyebarluaskan produk hukum daerah yang berlaku di Lingkungan Kota Tebing Tinggi, baik kepada seluruh aparatur sipil negara sebagai pelaksana pemerintahan dan juga kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami dan lebih menyadari produk hukum daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan masyarakat.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.1 Program dan Kegiatan Bagian Administrasi

1. Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

Realisasi Program Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai fungsi:

- A. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan
- B. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan
- C. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan
- D. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.43
Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada	40%

	semester I	
2.	Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada semester I	40%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Tebing Tinggi

Tahun 2024 realisasi dan capaian Indikator kinerja Bagian Administrasi Pembangunan sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.44
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bagian Administrasi
Pembangunan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada semester I	40%	71,88%	179,7%
2.	Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada semester I	40%	53,13%	132,82%

Indikator Kinerja jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada semester I, terealisasi 23 SKPD yang realisasi keuangan $\geq 40\%$ dari 32 SKPD di Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sementara untuk jumlah SKPD dengan realisasi fisik $\geq 50\%$ pada semester I, terealisasi 17 SKPD yang realisasi fisik $\geq 50\%$ dari 32 SKPD di Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Kota Tebing Tinggi, capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1.1 Program perekonomian dan pembangunan

A. Persentase SKPD yang menargetkan realisasi keuangan pada DPA-SKPD

>=50% pada semester; Realisasi Anggaran 121,09%.

1.2 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pembangunan

- A.** Persentase jumlah skpd yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester I; Realisasi Anggaran 75%.

1.3 Fasilitasi penyusunan program pembangunan

- A.** Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah; Realisasi Anggaran 100%.

1.4 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

- A.** Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan; Realisasi Anggaran 100%.
- B.** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

1.5 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

- A.** Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; Realisasi Anggaran 100%.

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.45
Capaian Indikator sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Bagian pengadaan
Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase pengadaan barang/jasa yang diusulkan OPD terlaksana secara akuntabel	100 %	100%	100 %

	dan transparan.			

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dari target yang direncanakan sebesar 100% (seratus persen) dan telah terealisasi sebesar 100% (seratus persen), sehingga pada tahun 2024 ini target tersebut telah tercapai.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Target Sasaran dan Indikator Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 didukung oleh Program Kegiatan sebagai berikut:

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

➤ Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada kegiatan ini telah terlaksana : belanja pegawai pokja dan pejabat pengadaan sebanyak 14 (empat belas) orang, belanja barang pakai habis, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga administrasi tenaga kontrak sebanyak 2 (dua) orang, belanja jaminan kesehatan tenaga kontrak, belanja jaminan kecelakaan tenaga kontrak, dan belanja perjalanan dinas biasa. Kegiatan ini bermanfaat memperlancar proses pembangunan di kota Tebing Tinggi.

➤ Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pada kegiatan ini telah terlaksana : belanja barang pakai habis, belanja jasa honorarium LPSE sebanyak 11 (sebelas) orang, belanja jasa tenaga administrasi tenaga kontrak sebanyak 2 (dua) orang, belanja bulanan biaya internet LPSE, belanja jaminan kesehatan tenaga kontrak, belanja jaminan kecelakaan tenaga kontrak, belanja sewa peralatan jaringan, dan belanja perjalanan dinas.

Kegiatan ini bermanfaat terlaksananya LPSE di lingkungan pemerintah kota Tebing Tinggi.

- Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pada kegiatan ini terlaksananya : belanja barang pakai habis, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium kegiatan sosialisasi, belanja jasa tenaga administrasi tenaga kontrak sebanyak 1 (satu) orang, belanja jaminan kesehatan tenaga kontrak, belanja jaminan kecelakaan tenaga kontrak, belanja sewa peralatan umum, belanja biaya bimtek/diklat PNS, dan belanja perjalanan dinas biasa.
- Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia.

❖ SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;

Realisasi Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Capaian Kinerja Program Sekretariat DPRD Tahun 2024, sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.46

Indikator Urusan Bidang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tebing Tinggi

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
1	Menciptakan pelayanan yang maksimal terhadap pimpinan dan anggota DPRD melalui SDM yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	87%

	berkualitas			

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Realisasi Anggaran 0%.

1.7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 97%.

1.8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 18%.

1.9 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; Realisasi Anggaran 0%.

1.10 Administrasi Umum Perangkat Daerah

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Realisasi Anggaran 98%.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Realisasi Anggaran 70%.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Realisasi Anggaran 0%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 99%.

1.11 Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

A. Pengadaan Mebel; Realisasi Anggaran 99%.

B. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Realisasi Anggaran 99%.

1.12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 91%.

B. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 92%.

1.13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Realisasi Anggaran 83%.

B. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Realisasi Anggaran 74%.

C. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ; Realisasi Anggaran 98%.

1.14 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

D. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; Realisasi Anggaran 90%.

E. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; Realisasi Anggaran 99%.

6. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

6.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Realisasi Anggaran 100%.

c. Penyusunan Tata Tertib DPRD; Realisasi Anggaran 0%.

6.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran

c. Pembahasan KUA dan PPAS; Realisasi Anggaran 100%.

d. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Realisasi Anggaran 100%.

e. Pembahasan APBD; Realisasi Anggaran 100%.

f. Pembahasan APBD Perubahan; Realisasi Anggaran 100%.

g. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD; Realisasi Anggaran 100%.

6.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

b. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum; Realisasi Anggaran 95%.

c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Realisasi Anggaran 97%.

d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian; Realisasi Anggaran 93%.

e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Realisasi Anggaran 0%.

f. Pengawasan Penggunaan Anggaran; Realisasi Anggaran 0%.

- g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; Realisasi Anggaran 100%.

6.4 Peningkatan Kapasitas DPRD

- b. Pendalaman Tugas DPRD; Realisasi Anggaran 65%.
- c. Publikasi dan Dokumentasi Dewan; Realisasi Anggaran 78%.
- d. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Realisasi Anggaran 71%.
- e. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; Realisasi Anggaran 84%.
- f. Penyusunan Program Kerja DPRD; Realisasi Anggaran 0%.

6.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- b. Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD; Realisasi Anggaran 100%.

6.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- A. Penyusunan Kode Etik DPRD; Realisasi Anggaran 0%.

6.7 Fasilitasi Tugas DPRD

- A. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Realisasi Anggaran 98%.

6.8 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- A. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; Realisasi Anggaran 100%.

❖ INSPEKTORAT KOTA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Adapun program dan kegiatan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan unsur pengawasan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal adalah :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Reviu Laporan Kinerja
- d. Reviu Laporan Keuangan
- e. Pengawasan Desa
- f. Kerjasama Pengawasan Internal
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu adalah :

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

3.2 Pendampingan dan AsistensiPendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Pendampingan dan Asistensi adalah:

- a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Adapun untuk melihat capaian kinerja bidang pengawasan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.47

Capaian Kinerja Bidang Pengawasan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Temuan Eksternal dan Internal yang Ditindaklanjuti dengan Status Selesai	95%	96,10%	101,16%
		Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	100%	100%	100%
		Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya integritas dan penyelenggaraan pendampingan daerah	Level Maturitas SPIP	Level 4	Level 4	100%
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Sumber: Inspektorat Kota Tebing Tinggi

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2024 melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

a. Koordinator dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam 1 Tahun, dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7.171.700,- dan terealisasi sebesar Rp 7.048.000,- dengan persentase realisasi 98,28%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun, dengan capaian 0% pada Tahun 2024. Sub Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9.513.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- dengan persentase realisasi 0%. Hal ini disebabkan karena kurang memperhatikan dalam menetapkan ketepatan jadwal untuk pelaksanaan kegiatan.

1. 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan gaji dan tunjangan ASN dengan target tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 tahun dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5.942.347.762,- dan terealisasi sebesar Rp 5.830.724.669,-

dengan persentase realisasi 98,12%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Pambulan Gaji PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS.

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dalam 1 tahun dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.996.600,- dengan persentase realisasi 31,99%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4, 4 Unit, dan Belanja Premi Asuransi Kantor.

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi para pegawai Inspektorat Kota Tebing Tinggi dengan target tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dalam 1 Tahun dengan capaian 46,90% pada Tahun 2024 hal ini dikarenakan tidak terealisasinya pengadaan pakaian batik yang dis desain batik belum selesai. Sub Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 72.133.000,- dan terealisasi sebesar Rp 58.830.000,- dengan persentase realisasi 81,56% dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Pakaian Dinas PDH untuk 51 pegawai Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target tersedianya biaya Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai dalam 1 tahun untuk 46 Pegawai dengan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.099.122.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.017.808.932,- dengan persentase realisasi 92,60%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Diklat/ Bimtek ASN sebanyak 46 orang, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja tiket pesawat, serta uang hariannya.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

a. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12.119.700,- dan terealisasi sebesar Rp 10.755.700,- dengan persentase realisasi 88,75%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.

b. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28.785.200,- dan terealisasi sebesar Rp 24.657.400,- dengan persentase realisasi 85,66%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor.

c. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan logistik kantor dengan target tersedianya bahan logistik kantor dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 131.017.500,- dan terealisasi sebesar Rp 87.181.600,- dengan persentase realisasi 66,54%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis kantor

d. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang cetak dan penggandaan dengan target tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 69.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp 68.243.000,- dengan persentase realisasi 97,83%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Backdrop Panggung 50 meter, Cetak Map 2000 Buah, cetak Piagam 10 Buah, Cetak Spanduk 22 Buah, Foto Copy 15000 Lembar, Jilid Spiral Plastik 500 set, Rool Up Banner Display 5 Buah.

e. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target tersedianya rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 627.804.000,- dan terealisasi sebesar Rp 624.972.965,- dengan persentase realisasi 99,55%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : belanja perjalanan dinas biasa.

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

a. **Pengadaan Mebel**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan mebel dengan target tersedianya mebel dalam 1 tahun dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 51.881.300,- dan terealisasi sebesar Rp 50.100.000,- dengan persentase realisasi 96,57%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Pembayaran Belanja Modal Lemari Buku/File 3 Pintu 1 Unit, Kursi Kerja Staf 10 Unit, Meja 1/2 biro 3 unit.

b. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan peralatan dan mesin lainnya dengan target tersedianya peralatan dan mesin lainnya dalam 1 tahun dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 258.101.800,- dan terealisasi sebesar Rp 176.065.000,- dengan persentase realisasi 68,22%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Pembayaran Belanja Modal Meteran Laser ukuran 100 M sebanyak 6 Unit, Pembayaran Belanja Modal Peralatan Kantor 1 Unit (AC Split 1 PK (pokytron) sebanyak 1 Unit, Lemari Es 1 Pintu (Maspion) 1 Unit), Televisi Led (Samsung) 1 Unit, Apar 1 Unit, Kamera Digital 1 Unit, Tripod 1 Unit, Laptop Acer 6 Unit, Scanner Portable 1 Unit, Proyektor 1 Unit.

c. **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 308.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp 288.000.000,- dengan persentase realisasi 93,50%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

a. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa surat menyurat dengan target tersedianya jasa surat menyurat dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.000.000,- dengan persentase realisasi 33,61%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Pembayaran belanja pembelian materai keperluan administrasi.

b. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 95.808.000,- dan terealisasi sebesar Rp 89.125.095,- dengan persentase realisasi 93,02%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Pembayaran air, listrik, telepon, internet, dan surat kabar.

c. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa pelayanan umum kantor dengan target tersedianya pelayanan umum kantor dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100.094.760,- dan terealisasi sebesar Rp 98.976.360,- dengan persentase realisasi 98,88%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Pembayaran gaji tenaga administrasi 3 orang, tenaga keamanan kantor 1 orang, Tenaga Kebersihan Kantor 1 orang, iuran kesehatan 5 orang, dan jaminan kesehatan, jaminan kematian bagi non ASN 5 orang.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 86.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 61.879.241,- dengan persentase realisasi 71,45%, dengan rincian pelaksanaan yaitu: Biaya pemeliharaan dan BBM kendaraan bermotor Pejabat Eselon II 1 unit, Biaya pemeliharaan dan BBM kendaraan bermotor Operasional Roda 4 (2 unit).

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam 12 bulan dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 44.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.045.000,- dengan persentase realisasi 43,28%, dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 Tahun dengan capaian 100% pada Tahun 2024. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 197.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 196.639.385,- dengan persentase realisasi 99,72%, dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi TA 2024.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Adapun Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal adalah :

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

1. Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%
3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
4. Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 130.225.000,- dengan persentase realisasi 86,82% dengan rincian pelaksanaan yaitu : Biaya Jasa Audit (Biaya Pengawasan Tim Reviu LKPJ pada seluruh SKPD , Biaya Pengawasan Tim Audit Kinerja untuk 4 Tim).

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%
- 2) Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%

- 3) Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
- 4) Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 582.725.00,- dengan persentase realisasi 97,12% dengan rincian pelaksanaan yaitu : Biaya Jasa Audit (Biaya Pengawasan Tim Audit/Pemeriksaan Keuangan dan Audit Ketaatan dalam setahun).

c. **Reviu Laporan Kinerja**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%
- 2) Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%
- 3) Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
- 4) Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 106.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.340.000,- dengan persentase realisasi 93,72% dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Jasa Audit berupa biaya pengawasan tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan reviu.

d. **Reviu Laporan Keuangan**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

1. Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%
3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
4. Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 298.725.000,- dengan persentase realisasi 99,58% dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Audit berupa biaya pengawasan Tim Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Reviu, Evaluasi dan Monitoring, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

e. Pengawasan Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

1. Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%
3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
4. Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah jumlah laporan hasil pengawasan desa mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 47.125.000,- dengan persentase realisasi 78,54% dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Audit berupa biaya pengawasan Tim Pemeriksaan Administrasi Dana Kelurahan se-Kota Tebing Tinggi (35 Kelurahan) yang dilaksanakan oleh 4 tim.

f. Kerjasama Pengawasan Internal

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya Integritas dan Penyelenggaraan Pendampingan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Level maturitas SPIP pada Level 3 di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2024 pada Level 3;
- 2) Level Kapabilitas APIP dengan target Level 3 pada tahun 2024 dan terealisasi pada level 3 di tahun 2024.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 171.276.000,- dan terealisasi sebesar Rp 78.734.200,- dengan persentase realisasi 45,97% dengan rincian pelaksanaan yaitu : Pembayaran belanja honorarium narasumber sosialisasi Aplikasi E-Audit, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

1. Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%

3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
4. Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 129.979.000,- dan terealisasi sebesar Rp 106.098.500,- dengan persentase realisasi 81,63% dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Audit berupa biaya pengawasan Tim Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Reviu, Evaluasi dan Monitoring, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2. 2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%
- 2) Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%
- 3) Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
- 4) Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra

Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 194.139.500,- dan terealisasi sebesar Rp 144.977.600,- dengan persentase realisasi 74,68% dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Honorarium Tim Pelaksana

Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 100%
- 2) Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%
- 3) Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
- 4) Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 438.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 437.599.500,- dengan persentase realisasi 99,91% dengan rincian pelaksanaan yaitu : Belanja Jasa Audit (Biaya Pengawasan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Evaluasi, dan Monitoring dalam satu tahun).

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya Integritas dan Penyelenggaraan Pendampingan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Level maturitas SPIP pada Level 4 di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2024 pada Level 4;
- 2) Level Kapabilitas APIP dengan target Nilai 3,38 pada tahun 2024 dan terealisasi dengan Nilai 3,38 di tahun 2024.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22.517.900,- dan terealisasi sebesar Rp 2.050.000,- dengan persentase realisasi 9,10% dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (nasi kotak, snack)

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya Integritas dan Penyelenggaraan Pendampingan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Level maturitas SPIP pada Level 4 di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2024 pada Level 4;
- 2) Level Kapabilitas APIP dengan target Nilai 3,38 pada tahun 2024 dan terealisasi dengan Nilai 3,38 di tahun 2024.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 69.436.000,- dan terealisasi sebesar Rp 62.220.500,- dengan persentase realisasi 89,61% dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja perjalanan dinas biasa

3.2 Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

1. Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%

3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
4. Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 207.268.600,- dan terealisasi sebesar Rp 171.445.300,- dengan persentase realisasi 82,72%, dengan rincian pelaksanaan yaitu Belanja perjalanan dinas biasa, belanja makan dan minum rapat.

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya Integritas dan Penyelenggaraan Pendampingan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Level maturitas SPIP pada Level 4 di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2024 pada Level 4;
- 2) Level Kapabilitas APIP dengan target Nilai 3,38 pada tahun 2024 dan terealisasi dengan Nilai 3,38 di tahun 2024.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 87.546.000,- dan terealisasi sebesar Rp 72.263.230,- dengan persentase realisasi 82,54% dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja pengawasan dalam rangka kegiatan monitoring untuk tim pengawasan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Persentase temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai dengan target 95% di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2023 dengan capaian 101,16%

- 2) Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material dengan target 100% di tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%
- 3) Persentase penyelesaian kasus pengaduan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.
- 4) Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi pada tahun 2024 dengan capaian 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 85.350.600,- dan terealisasi sebesar Rp 36.689.100,- dengan persentase realisasi 42,99%, dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja makan dan minum rapat, Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas biasa.

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD dan sasaran meningkatnya Integritas dan Penyelenggaraan Pendampingan, dengan target indikator sasaran:

- 1) Level maturitas SPIP pada Level 4 di tahun 2024, dan terealisasi pada tahun 2024 pada Level 4;
- 2) Level Kapabilitas APIP dengan target Nilai 3,38 pada tahun 2024 dan terealisasi dengan Nilai 3,38 di tahun 2024.

Indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai dengan target Indikator pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Sub Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 87.985.100,- dan terealisasi sebesar Rp 33.779.840,- dengan persentase realisasi 38,39%, dengan rincian pelaksanaan yaitu: Belanja Perjalanan Dinas/Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Pengawasan.

❖ KECAMATAN

KECAMATAN BAJENIS

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Program dan Kegiatan Kecamatan Bajenis

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum

Realisasi Program Kecamatan Bajenis Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kecamatan Bajenis adalah sebesar 7.450.376.204 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta tiga ratus ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat rupiah) dan dan Perubahan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2024 Kecamatan Bajenis adalah sebesar Rp. 7.357.773.783 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) atau mengalami refocusing sebesar 1,24 % dan dari PAPBD Tahun 2024 tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 7.214.552.227 (tujuh milyar dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 98,05%.

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Bajenis Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 3.1.48
Capaian Kinerja Kecamatan Bajenis Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	92	92

Sumber: Kecamatan Bajenis

Realisasi tersebut di atas merupakan hasil Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Bajenis Tahun 2024 yang diperoleh dari Hasil Pengisian Kuisioner Suvei Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi SIKEMAS.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan urusan kecamatan, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- A.** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD%; Realisasi Anggaran 100%.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- A.** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- A.** Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- A.** Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- B.** Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- C.** Penyediaan bahan logistik kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- D.** Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Realisasi Anggaran 100%.
- E.** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- A.** Pengadaan Meubel; Realisasi Anggaran 100%.
- B.** Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- A.** Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 100%.

- B. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 100%.
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak ; Realisasi Anggaran 100%.Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.
 - C. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
 - A. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Realisasi Anggaran 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - A. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.
 - B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.
- 3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**
 - A. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Realisasi Anggaran 100%.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum

- 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - A. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; Realisasi Anggaran 100%.

KECAMATAN PADANG HILIR

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Hilir

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Program Kecamatan Padang Hilir Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kecamatan Padang Hilir adalah sebesar Rp. 7.387.867.812 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan Perubahan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2024 Kecamatan Padang Hilir adalah sebesar Rp. 7.027.908.696 (tujuh milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau mengalami refocusing sebesar 4,87% dan dari PAPBD Tahun 2024 tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 6.843.665.037 (enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97,38%.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Kecamatan Padang Hilir Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.49
Capaian Kinerja Kecamatan Padang Hilir Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	95.75	95.75

Sumber: Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Realisasi tersebut di atas merupakan hasil Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Padang Hilir Tahun 2024 yang diperoleh dari Hasil Pengisian Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi SIKEMAS.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan urusan kecamatan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

B. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.

2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

B. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

B. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; Realisasi Anggaran 100%.

2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

C. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Realisasi Anggaran 100%.

D. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Realisasi Anggaran 100%.

E. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Realisasi Anggaran 100%.

F. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 100%.

B. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 100%.

2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Realisasi Anggaran 100%.

B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

A. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

B. Evaluasi Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

C. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

D. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

A. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Realisasi Anggaran 100%.

KECAMATAN PADANG HULU

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Hulu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Program Kecamatan Padang Hulu Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Pagu anggaran Kecamatan Padang Hulu untuk APBD 2024 sebesar Rp. 7.601.634.945,- dan pagu PAPBD 2024 sebesar Rp. 7.566.253.045,- Dari

anggaran PAPBD tersebut, sampai dengan akhir tahun 2024, adapun realisasi seluruh program dan kegiatan Kecamatan Padang Hulu sebesar Rp. 7,399.969.914,- atau sebesar 97,80%.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Kecamatan Padang Hulu Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.50
Capaian Kinerja Kecamatan Padang Hulu Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00	99,75	114,66%
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100
		Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	100%	100%	100
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100

Sumber: Kecamatan Padang Hulu

Untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian kinerja Kecamatan Padang Hulu Tahun 2024 sebesar 114,66% (sangat tinggi) yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang diisi secara manual dalam aplikasi SIKEMAS oleh 288 orang.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan urusan kecamatan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
 - 1.1** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - A. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
 - 1.2** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - A. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.
 - 1.3** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - A. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
 - 1.4** Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - A. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Realisasi Anggaran 100%.
 - B. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Realisasi Anggaran 100%.
 - C. Penyediaan bahan logistik kantor; Realisasi Anggaran 100%.
 - D. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Realisasi Anggaran 100%.
 - E. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.
 - 1.5** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - A. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 100%.
 - B. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 100%.
 - 1.6** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Realisasi Anggaran 100%.
 - B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.
 - C. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Realisasi Anggaran 100%.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - 2.1** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - A. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Realisasi Anggaran 100%.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- A.** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.
- B.** Evaluasi Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.
- C.** Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.
- D.** Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- A.** Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; Realisasi Anggaran 100%.

KECAMATAN RAMBUTAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Rambutan

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Realisasi Program Kecamatan Rambutan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Pagu anggaran Kecamatan Rambutan untuk APBD 2024 sebesar Rp. 8.213.822.154,- sampai dengan akhir tahun 2024, adapun realisasi seluruh program dan kegiatan Kecamatan Rambutan sebesar Rp. 8,037,987,920.00 atau sebesar 97.86%.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Kecamatan Rambutan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.51**Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00	99,75	114,66
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100
		Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	100%	100%	100
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100

Sumber: Kecamatan Rambutan

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan urusan kecamatan, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

A. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; Realisasi Anggaran 100%.

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Realisasi Anggaran 100%.

B. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Realisasi Anggaran 100%.

C. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Realisasi Anggaran

100%.

- D.** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- A.** Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- A.** Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 100%.

- B.** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 100%.

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- A.** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Realisasi Anggaran 100%.

- B.** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- A.** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Realisasi Anggaran 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- A.** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

- B.** Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

- C.** Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- A.** Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Realisasi Anggaran 100%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- A.** Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan; Realisasi Anggaran 100%.
- B.** Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; Realisasi Anggaran 100%.

KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Tebing Tinggi Kota

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Program Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang diperjanjikan dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Pagu anggaran Kecamatan Tebing Tinggi Kota untuk APBD 2024 sebesar Rp.8.058.097.884,- dan pagu PAPBD 2024 sebesar Rp. 7.423.318.204,,-. Dari anggaran PAPBD tersebut, sampai dengan akhir tahun 2024, adapun realisasi seluruh program dan kegiatan Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebesar Rp. 7,304,103,294,- atau sebesar 98,39%.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.52

Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)

1	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00	97,25	111,78%
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100
		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100

Sumber: Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 sebesar 111,78% (sangat tinggi) yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang diisi secara manual dalam aplikasi SIKEMAS oleh 747 orang.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Sesuai dengan urusan kecamatan, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Realisasi Anggaran 100%.

2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

A. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; Realisasi Anggaran 100%.

2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Realisasi Anggaran 100%.

B. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Realisasi Anggaran 100%.

C. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Realisasi Anggaran

100%.

- D.** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Realisasi Anggaran 100%.

2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- A.** Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- A.** Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik; Realisasi Anggaran 100%.

- B.** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Realisasi Anggaran 100%.

2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- A.** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Realisasi Anggaran 100%.

- B.** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; Realisasi Anggaran 100%.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- A.** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Realisasi Anggaran 100%.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- A.** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

- B.** Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

- C.** Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Realisasi Anggaran 100%.

4.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- A.** Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Realisasi Anggaran 100%.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- A. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan; Realisasi Anggaran 100%.
- B. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; Realisasi Anggaran 100%.

❖ KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja program sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.53

Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya Pemahaman dan Nilai-nilai Kebangsaan dan Demokrasi di Masyarakat	Persentase penurunan UnjuRasa	12%	7,14%	59,5 %
		Persentase konflik sara	0%	0%	100%
		Persentase LSM aktif	22%	12,16 %	55,27 %
		Persentase partisipasi pemilih	70%	80%	114%

Dalam Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pemahaman dan Nilai-nilai Kebangsaan dan Demokrasi di Masyarakat, dengan Indikator Kinerja:

1. Persentase penurunan Unjuk Rasa ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 12% dan terealisasi sebanyak 7,14 % dengan pencapaian kinerja 59,5 %.
2. Indikator Kinerja Persentase konflik sara ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebesar 0% dan terealisasi sebanyak 0% dengan pencapaian kinerja 100%.
3. Indikator kinerja Persentase LSM aktif pada tahun 2024 ditargetkan 22 % telah

realisasi 12,16 % sehingga capaian kinerja 55,27 %.

4. Kemudian Indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih pada tahun 2024 ditargetkan 70 % realisasi 80 % sehingga capaian kinerja 114% ini berdasarkan Pemilu Legislatif dan Presiden tanggal 14 Februari 2024.

2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

Urusan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilaksanakan melalui program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan melakukan Belanja ATK, cetak penggandaan dan makan minum dalam penyusunan 8 laporan.
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Belanja gaji dan tunjangan ASN 20 orang
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, untuk Belanja lampu
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor terdiri dari : gayung 3 buah, kain pel 3 buah, karbol 6 bungkus, keset kaki sabut 3 buah, lap kain 1 lusin, pembersih kaca 3 botol, pembersih lantai 6 bungkus, pewangi ruangan 3 buah, sapu plastik 3 unit, tong sampah 3 buah, brus kamar mandi 3 buah, bulu ayam 3 buah.
 - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, untuk Belanja ATK . Belanja makanan dan minuman rapat kantor selama 12 bulan
 - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, untuk Belanja cetak ganda selama 12 bulan
 - 1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, untuk Belanja surat kabar selama 12 bulan

- 1.3.6. Fasilitas Kunjungan Tamu, untuk Belanja makan dan minum tamu selama 11 bulan
- 1.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi beserta akomodasi nya selama 12 bulan
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk pengadaan router 1 unit, akses poin 5 unit, kabel utp 1 roll
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, untuk Belanja jasa listrik dan air untuk kantor selama 12 bulan
- 1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, untuk Belanja jasa pengadministrasian kantor, jasa petugas kebersihan kantor, jasa kantor keamanan, jasa kebersihan dan premi BPJS kesehatan dan jaminan kematian bagi non ASN di kantor (8 org) selama 12 bulan
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, untuk Belanja BBM service kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 3 unit selama 12 bulan
- 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk servis laptop 5 unit AC 10 unit
- 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, untuk belanja asuransi dan rehab gedung kantor.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- 2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, untuk membayar Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebanyak 26 orang
- 2.1.2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, untuk Pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara 1 kali dan pengadaan bendera merah putih.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 3.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, untuk hibah kepada partai politik 1 tahun sebanyak 10 Partai Politik, Hibah kepada KPU dan Hibah kepada Bawaslu 40%
 - 3.1.2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, untuk Dialog partai politik 4 kali
 - 3.1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, untuk honorarium tim verifikasi bantuan partai politik sebanyak 12 orang

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 4.1.1. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, untuk dialog antar ormas
 - 4.1.2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, untuk tim Pengawasan Ormas melibatkan unsur TNI dan Polri

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, untuk biaya sosialisasi Penyalaguna Narkoba 4 kali

5.1.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, untuk Biaya rapat dan honor FKUB selama 12 bulan sebanyak 17 orang, dan dialog FKUB

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

6.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

6.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk rapat dan honorarium Tim terpadu penangan konflik sosial dan Forkopimda sebanyak 24 orang

6.1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk rapat dan honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebanyak 13 orang

6.1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk rapat dan honorarium FKDM sebanyak 24 orang

- 6.1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk makan minum monitoring demo/unjuk rasa

3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dituangkan dalam tabel berikut ini:

3.2.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 URUSAN PENDIDIKAN										
DINAS PENDIDIKAN										
1.1		Dinas Pendidikan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggarakannya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana Penyusunan Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja OPD					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	40,06%		
				Koordinasi dan SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	97,78%		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	95,65		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	96,64		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6 Laporan	6 Laporan	69,96		

					IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	75,02		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN+THL OPD	12 Bulan	1 Tahun			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	96,32		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	2 dokumen	2 dokumen	0%	Keterbatasan/ padatnya waktu dan kegiatan	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	83,59		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Tahun	72,72		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	80,18		
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	42,42		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Tahun	86,39		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	97,03		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Admistrasi Pengamanan Barang Milik Daerah pada OPD	1 dokumen	1 dokumen			
				Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	79,75		

				Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Tahun	92,76		
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	79,98		
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	59,78		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50,36		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	93,8		
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	52,56		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian OPD					
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 unit	3 unit	0	Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	0	Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	0	Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 dokumen	0	Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerUU-an	87 Orang	1 Tahun	0	Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87 Orang	1 Tahun	100		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum OPD					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	1 Paket	1 Tahun	58,79		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	68,66		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65,72		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	70,32		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	82,66		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanganyang Disediakan	1 dokumen	1 Tahun	65,04		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Tahun	52,71		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Tahun	99,96		
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD	1 dokumen	1 Tahun	94,75		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Barang Milik Daerah OPD					
				Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel	1 Tahun	1 Tahun	86,52		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1 Tahun	87,09		

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 Tahun	78,44		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 Tahun	98,79		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Tahun	72,61		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Tahun	79,82		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Tahun	86,76		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Tahun	83,05		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	1 Tahun	73,59		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Tahun	98,15		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Penduduk Usia 7 sd 12 Tahun Yang Bersekolah					
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	1 Tahun	99,66		

				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Tahun	98,01		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	23 Unit	1 Tahun	97,78		
				Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	7 Ruang	1 Tahun	99,60		
				Rehabilitasi Seding/Berat Ruang UKS	Jumlah Ruang UKS yang Direhabilitasi Seding/Berat	1 Ruang	1 Tahun	99,25		
				Rehabilitasi Seding/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Perpustakaan Sekolah	4 Ruang	1 Tahun	99,51		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	76	1 Tahun	99,45		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan NonAkademik	30 peserta didik	1 Tahun	46,44		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 peserta didik	1 Tahun	67,53		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	87 sekolah	1 Tahun	64,77		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	103 satuan pendidikan	1 Tahun			
				Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	152 orang	1 Tahun	82,67		
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah	1 Orang	1 Tahun	97,88		

					Dasar yang Telah Dibangun					
				Pembinaan Penggunaan TIK untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5 Orang	1 Tahun	52,25		
				Koordinasi, perencanaan, supervise dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	1 Tahun	0	Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Dokumen	1 Tahun	69,86		
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	5 Paket	1 Tahun	97,71		
				Rehabilitasi sedang/berta sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Ruang sarana dan prasarana yang Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	1 Tahun	98,15		
				Bimbingan teknis, pelatihan dan /atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah teknis pelatihan peningkatan kapasitas bidang pendidikan	5 Orang	1 Tahun	67,18		
				Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	76 Satuan Pendidikan	1 Tahun	36,07		
				Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	1 Tahun	97,09		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)						
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (DAK)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Tahun			
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Tahun	98,85		
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Tahun	99,50		

				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Tahun	99,04		
				Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang Telah Dibangun	15 unit	1 Tahun	98,29		
				Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1 Tahun	99,24		
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yg Tersedia	0 Paket	1 Tahun	12,45		
				Perlengkapan belajaer peserta didik	Jumlah Perlengkapan belajar yang tersedia	30 Paket	1 Tahun	98,69		
				Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	1 Tahun	2,06		
				Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan NonAkademik	10 Peserta Didik	1 Tahun	38,29		
				Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	1 Tahun	35,30		
				Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27 Satuan Pendidikan	1 Tahun	43,43		
				Pengelolaan dana BOS SMP	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	10 Satuan Pendidikan	1 Tahun			
				Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	1 Tahun	45,42		
				Pembinaan penggunaan TIK untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5 Orang	1 Tahun	18,16		

				Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	1 Tahun			
				Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	1 Tahun	50,77		
				Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan	1 Tahun	31,87		
				Pengadaan perlengkapan peserta didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah yg Tersedia	30 Paket	1 Tahun	95,67		
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1 Tahun	99,57		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Tahun	98,52		
				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	1 Tahun	97,58		
				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	5 Paket	1 Tahun	52,62		
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	9 Paket	1 Tahun	97,91		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan alat praktik dan peraga yang Tersedia	7 Paket	1 Tahun	97,14		
				Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2820 Peserta Didik	1 Tahun			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1 Tahun	76,68		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan	100 Satuan Pendidikan	1 Tahun	44,90		

				Pembinaan Kelembagaan dan M					
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	87 Satuan Pendidikan	1 Tahun	99,69	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	1 Tahun	55,77	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	1 Tahun	82,37	
				Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Tahun	57,16	
				Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/pkl untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1 Tahun	58,00	
				Pengadaan perlengkapan peserta didik	Jumlah perlengkapan peserta didik sekolah	200 Paket	1 Tahun	94,87	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan					
				Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta	1 Tahun	58,25	
				Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan nonformal	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	1 Tahun	0	Data peserta belum diperoleh Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan
				Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	1 Tahun	0	Data belum diperoleh karena Keterbatasan/ padatnya waktu dan kegiatan

				Pengelolaan dana BOP Sekolah nonformal	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	1 Tahun	0	Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Pembinaan penggunaan TIK untuk pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang	1 Tahun	0	Data belum diperoleh karena Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/pkl untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	1 Tahun	0	Data belum diperoleh karena Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	7 Peserta Didik	1 Tahun	0	Keterbatasan / padatnya waktu dan kegiatan	
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40 Dokumen	1 Tahun			
				Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Terselesaikannya Urusan Dokumen Perizinan	40 Dokumen	1 Tahun			
1.2 URUSAN KESEHATAN										
DINAS KESEHATAN										
1.2		DINAS KESEHATAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Bealitasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	100%		

				Administrasi Keuangan perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%	Tidak ada masalah	
				Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak ada masalah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistic kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	0	0	Tidak terlaksana	
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya biaya rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kesehatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kesehatan	12 bulan1	12 bulan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah		

				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah		
				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah		
				Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
				Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota						
				Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Terpenuhinya sarana dan prasarana Puskesmas yang sesuai standart Kementerian Kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100%	Tidak ada masalah	
				Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah sakit sesuai standart Kementerian Kesehatan	2 paket	2 paket	100%	Tidak ada masalah	
				Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Terkalibrasinya semua alat kesehatan di 9 Puskesmas	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%	Tidak ada masalah	
				Pengadaan Obat , Bahan Medis Habis Pakai, vaksin makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Tersedianya obat, Bahan Medis Habis Pakai dan vaksin di 9 Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	100%	Tidak ada masalah	
				Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Terdistribusikannya obat,vaksin dan BMHP ke puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan layanan kesehatan Untuk UKM Dan UKT Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota						

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan ibu hamil	100%	91%	91%	Tidak ada Masalah	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	99,5%	99,5%	Tidak ada Masalah	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	100%	99,5%	99,55%	Tidak ada Masalah	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100%	84,44%	84,44%	Tidak ada Masalah	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	86 %	86 %		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	31%	31%	a. Tidak semua masyarakat mau dilakukan skrining PTM b. Beberapa orang yang diperiksa tidak membawa KTP sehingga tidak dapat dimasukkan ke aplikasi ASIK Kurang optimalnya petugas puskesmas dalam penginputan data kedalam aplikasi ASIK	Meningkatkan pelayanan petugas kesehatan di Posbindu b. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	77 %	67%	Tidak ada masalah	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	19,45%	21,28%	Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk memeriksakan kesehatannya	Memberikan sosialisasi Mengingatkan petugas Puskesmas

									secara rutin Pencatatan dan pelaporan masih kurang optimal	untuk melakukan pencatatan dan melaporkannya ke dinas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	65,67%	65%	Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk memeriksa kesehatannya secara rutin Pencatatan dan pelaporan masih kurang optimal	Meningkatkan pelayanan puskesmas untuk pelayanan penderita DM mau yang beresiko
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	100%	67%	67%	Tidak ada masalah	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Terlaks deteksi dini HIV sesuai standar	100%	86%	86%	Tidak ada masalah	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita stunting mendapat perawatan	100%	100%	100%	Tidak ada masalah	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kelurahan yang melaksanakan Program STBM	35 kelurahan3	35 Kelurahan1	100%	Tidak ada masalah	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMKJ)	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan kesehatan sesuai standar	100%	109%	109%	Tidak ada masalah	
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Tersedianya P3K disetiap upacara upacara dan hari besar Terlaksananya pelayanan kesehatan sunatan masal	1 Tahun	1 Tahun	100%	Tidak ada masalah	
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pemberantasan penyakit menular dan tidak menular DBD, TBC, Hepatitis, Diare dan Tifoid, Isipa/Pneumonia,	1 Tahun 1	Tahun	100%	Tidak ada masalah	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya pembayaran Premi BPJS Untuk masyarakat miskin dan Terpenuhinya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada masalah	

					pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan operasional di Puskesmas selama 12 bulan					
				Penyelenggaraan kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kota sehat di Kota Tebing Tinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	35 kelurahan melaksanakan kota	
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	Terlaksananya kewaspadaan dini dan respon wabah	1 Tahun	Tahun	100%		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
				Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan	Tersedianya profil kesehatan Kota Tebing Tinggi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya sistem informasi Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	100%		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Meningkatnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
				Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
				Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan sumberdaya Manusia kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
				Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
				Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Dsumber Daya						

				Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi sumber daya kesehatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
				Program Sediaan farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman						
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Tahun	1 Tahun	100%	Tidak ada masalah	
				Peneydiaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak anjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengelolaan data perizinan dan tindak anjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Tahun	1 Tahun	100%	Tidak ada masalah	
				Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Dan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi						
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Pangan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi P-IRT	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Tidak ada masalah	

				Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Dan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga						
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkata Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya promosi kesehatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	100%	Tidak ada masalah	
				Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	Terlaksananya promosi kesehatn dan gerakan hidup bersih dan sehat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	Tidak ada masalah	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota						
				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya bimtek dan supervisi pengembangan dan upaya UKBM	1 Tahun	1 Tahun	100%	Tidak ada masalah	
1.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										

1.3		Dinas PUPR		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	100 %	Tidak ada	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	Tidak ada	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	55 orang	55 orang	100%	Tidak ada	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengaman barang milik daerah SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100 %	Tidak ada	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Batik untuk PNS dan Honorer	0	0	100%	Tidak ada	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	15 unit	15 unit	100 %	Tidak ada	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara	3 unit	3 unit	100 %	Tidak ada	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air						
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	200 M	200 M	100%	Tidak ada	
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi	2,5 KM	2,5 KM	100%	Tidak ada	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						

				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perkotaan	80 liter/detik	80 liter/detik	100%	Tidak ada	
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan SR yang terlayani	1400 SR	1400 SR	100%	Tidak ada	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Tangki Septik Individual yang dibangun	470 Unit	470 Unit	100%	Tidak ada	
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala permukiman	SPALD yang dipelihara	5 M3	5 M3	100%	Tidak ada	
				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	50 RT	50 RT	100%	Tidak ada	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Unit SPALD yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100%	Tidak ada	
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tanki septik sesuai dengan standar	2 RT	2 RT	100%	Tidak ada	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Tidak ada	
				Program Pembangunan dan Pengembangan Sistem Drainase						
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan						

				Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	400 meter	400 meter	100%	Tidak ada	
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dilakukan Rehabilitasi	1000 meter	1000 meter	100%	Tidak ada	
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	400 meter	400 meter	100%	Tidak ada	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah tenaga pembersih saluran dan sungai yang dibayarkan gaji	37 orang	37 orang	100%	Tidak ada	
				Program Penataan Bangunan Gedung						
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten/kota yang dipelihara, dirawat, dan diperiksa secara berkala	12 unit	12 unit	100%	Tidak ada	
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	3 unit	3 unit	100%	Tidak ada	
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya						
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						
				Monitoring Penataan /Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan	12 dokumen	12 dokumen	100%	Tidak ada	

				Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan					
				Program Penyelenggaraan Jalan						
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota						
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data/Informasi terkait kondisi Jalan/Jembatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tidak ada	
				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehabilitasi	1 KM	1 KM	100%	Tidak ada	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	9 KM	9 KM	100%	Tidak ada	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	2 KM	2 KM	100%	Tidak ada	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan	2 unit	2 unit	100%	Tidak ada	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi						
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	10 lembaga	10 lembaga	100%	Tidak ada	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota						
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan Perda atau Perkada RTRW Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tidak ada	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti sosialisasi	4 orang	4 orang	100%	Tidak ada	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang						

				Daerah Kabupaten/Kota						
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	Tidak ada	
1.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN										
1.4		Dinas Perkimtah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
				Perencanaan,Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34 Laporan	34 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	32 orang	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	18 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada

					Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
				Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah						
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 paket	0 paket	0%	Belum ada petunjuk teknis karena design batik belum selesai	Segera menyelesaikan design
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Peyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangab Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeihara	52 Unit	52 Unit	100%	Tidak ada	Tidak ada
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau						

				Relokasi Program Kabupaten/Kota						
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak ada	Tidak ada
				PROGRAM KAWASAAN PERMUKIMAN						
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						
				Penyusunan/Review/Lealisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terrview/Terlealisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha						
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	24 Unit Rumah	96%	Tidak memiliki kemampuan swadaya	Tidak ada
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman dengan	16 Unit Rumah	15 Unit Rumah	93,75%	Tidak memiliki kemampuan swadaya	Tidak ada

					Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus						
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
				Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5 Lokasi	5 Lokasi	100%	Tidak ada	Tidak ada
				Verifikasi Dan Penyerahan Psu Perumahan Dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima Psu Perumahan Yang Terverifikasi Dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tidak ada	Tidak ada
1.5 URUSAN KENETETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.5 .1		Satpol PP	Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang Melayani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya Administrasi umum perangkat daerah					
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	

				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	Tidak ada Permasalahan	
			Mewujudkan Peningkatan Investasi Daerah	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
				Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten / Kota					
				Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Terselenggaranya Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	100 kegiatan	100 kegiatan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terselenggaranya Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	85 kegiatan	85 kegiatan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Terselenggaranya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5 kegiatan	0 kegiatan	0%	Recofussing Anggaran	Dianggarkan kembali di tahun anggaran baru

				Penegakan peraturan daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / Walikota	Terlaksananya Penegakan peraturan daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / Walikota					
				Sosialisasi Pengegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Terselenggaranya Sosialisasi Pengegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota	Terselenggaranya Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota	Terselenggaranya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	Tidak ada Permasalahan	
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN										
1.5. 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	Pelaksanaan anggaran sesuai kebutuhan gaji dan TPP Tahun 2024	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	100%	Sub kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah					

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	anggaran tidak mencukupi kebutuhan untuk setahun	Pagu Perubahan anggaran tidak mencukupi untuk penambahan anggaran di sub kegiatan ini
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	anggaran tidak mencukupi kebutuhan untuk setahun	Pagu Perubahan anggaran tidak mencukupi untuk penambahan anggaran di sub kegiatan ini
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Anggaran alat tulis kantor tidak mencukupi kebutuhan setahun	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	anggaran hanya cukup untuk 1trivulan	Pagu Perubahan anggaran tidak mencukupi untuk penambahan anggaran di sub kegiatan ini
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	kekurangan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis	Penambahan anggaran di Tahun 2024
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					
				Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Kurangnya pagu anggaran yang ditetapkan untuk Pembelian Mebel	Penambahan anggaran untuk pembelian mebeler yang dibutuhkan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Kurangnya pagu anggaran yang ditetapkan untuk Pembelian Alat-Alat tersebut	Penambahan anggaran untuk pembelian alat-alat yang dibutuhkan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%	SILPA akibat kelebihan anggaran untuk	Jumlah anggaran termasuk

									pembayaran air dan listrik	antisipasi kenaikan tarif Listrik dan air
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%	SILPA biaya BPJS Ketenagakerjaan	Perlu penambahan jumlah personil dan penambahan anggaran
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	100%	Kekurangan biaya pemeliharaan dan bbm kendaraan operasional roda 6	Penambahan anggaran di Anggaran Tahun 2024
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENGANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	100%		
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota					
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	12 laporan	12 laporan	100%	Sub kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, pemadaman dan pengendalian	12 laporan	12 laporan	100%	Sub kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan

					kebakaran dalam daerah kabupaten/kota					
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Masih banyak gedung pemerintah yang belum / kurang sarana proteksi kebakarannya	Diharapkan SKPD mengikuti Rekomendasi Walikota sesuai surat edaran nomor 360/6312/DPKP tanggal 31 Agustus 2021 tentang Proteksi Kebakaran Gedung di Lingkungan Pemko T. Tinggi
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan					
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100 orang	100 orang	100%	kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung redkar beserta pelatihannya	menambah anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung redkar beserta pelatihannya di tahun 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1.5		BPBD		Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana		150 orang	176 orang	176 orang	tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
.3				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	94,84%	94,84%	tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	81,67%	81,67%	tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	98,22%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19 orang	19 orang		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 persen	72,96%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3 dokumen	3 dokumen		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	92,13%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 paket	1 paket		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		30 orang	30 orang		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	96,82%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 paket	1 paket		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 paket	1 paket		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 paket	1 paket		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 laporan		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	91,70%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28	2800,00%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	87,52%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	12 laporan		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	12 laporan		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	94,30%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 unit	3 unit		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20 unit	20 unit		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 unit	1 unit		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Program Penanggulangan Bencana		100 persen	95,01%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100 persen	99,76%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		800 orang	800 orang		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100 persen	91,84%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		150 orang	150 orang		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		15 orang	15 orang		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Meningkatnya responsibilitas penanganan darurat bencana		85%	96.16 %		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai

				Program Penanggulangan Bencana		100 persen	95,78%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100 persen	96,17%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1 kegiatan	1 kegiatan		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 persen	95,53%		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		1 kegiatan	1 kegiatan		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		1 kegiatan	1 kegiatan		tidak ada rekomendasi DPRD	Sesuai
1.6 URUSAN SOSIAL										
DINAS SOSIAL										
1.6	Urusan Sosial			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		30 laporan	30 laporan	100 %	tidak ada masalah	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	5 dokumen	100 %	tidak ada masalah	-

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		24 org	24 org	100 %	tidak ada masalah	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4 dokumen	4 dokumen	100 %	tidak ada masalah	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		92 paket	92 paket	100 %	Kegiatan tidak terlaksana karena belum ada penetapan batik Kota Tebing Tinggi	Melakukan monev anggaran untuk menggeser anggaran yang tidak bisa di laksanakan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 paket	4 paket	100 %	tidak ada masalah	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8 paket	8 paket	100 %	tidak ada masalah	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4 paket	4 paket	100 %	tidak ada masalah	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 lap	4 lap	100 %	tidak ada masalah	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				Pengadaan Mebel		30 paket	30 paket	100 %	tidak ada masalah	-

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7 unit	8 unit	100 %	tidak ada masalah	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 lap	5644 lap	100 %	tidak ada masalah	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 lap	12 lap	100 %	tidak ada masalah	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 lap	12 lap	100 %	tidak ada masalah	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6 unit	6 unit	100 %	tidak ada masalah	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 unit	2 unit	100 %	tidak ada masalah	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		80 unit	56 unit	100 %	tidak ada masalah	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan						

				Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 org	5 org	100%	tidak ada masalah	-
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		10 kk	10 kk	100%	tidak ada masalah	-
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1 lembaga	0	100%	Kepengurusan Karang Taruna belum terbentuk	Melakukan koordinasi kepada pihak terkait
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				100%		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				100%		
				Penyediaan Permakanan		30 org	66 org	100%	tidak ada masalah	-
				Penyediaan Sandang		18 org		100%	Kegiatan tidak terlaksana karena bedasarkan kebutukan PMKS terlantar	Akan dilakukan stok untuk penyediaan sandang
				Penyediaan Alat Bantu		18 org	20 org	100%	tidak ada masalah	-

				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		30 org	20 org	67%	tidak ada masalah	-
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
				Pemberian Layanan Kedaruratan		12 org	25 org	100%	tidak ada masalah	-
				Penyediaan Permakanan		105 org	120 org	100%	tidak ada masalah	-
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		15000 kk	15000 kk	100%	tidak ada masalah	-
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		9600 kk	12000 kk	100%	tidak ada masalah	-
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		2800 kk	12435 kk	100%	tidak ada masalah	-
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
				Penyediaan Makanan		500 jiwa	7241 jiwa	100%	tidak ada masalah	-
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan						

				Bencana Kabupaten/Kota						
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		36 org	108 org	100%	tidak ada masalah	-
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		261 makam	261 makam	100%	tidak ada masalah	-
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		12 lap	12 lap	100%	tidak ada masalah	-

3.2.2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1 URUSAN TENAGA KERJA										
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN										
1	Bidang Tenagakerja			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi	324 org/bulan	289 org/bulan	100%		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya baju batik Kota Tebing Tinggi	1 Paket	1 Paket	-	Waktu pengadaan yang tidak cukup	Akan dianggarkan kembali pada P. APBD TA 2025
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat komponen listrik	1 paket	1 paket	100%		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, alat dan bahan kebersihan kantor, dan makanan minuman rapat	2 paket	2 paket	100%		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	100%		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Tersedianya biaya perjalanan dinas	100 laporan	100 laporan	100%		

				dan Konsultasi SKPD	dalam dan luar daerah					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya tagihan air, listrik, internet dan telepon kantor	60 laporan	60 laporan	100%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji, biaya BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan untuk jasa pelayanan umum di kantor	60 laporan	60 laporan	100%		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kepala dinas	1 unit	1 unit	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	2 unit	2 unit	100%		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ perawatan peralatan kantor	32 unit	32 unit	100%		

				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja						
				Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan tenaga instruktur	20 orang	20 orang	100%		
				Program Hubungan Industrial						
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, dan penetapan UMK serta penyuluhan guidance dan counseling pada pekerja	12 bulan	12 bulan	100%		

				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LKS Biparti dan LKS Tripartit antara pengusaha dan pekerja yang berselisih	3 lembaga	3 lembaga	100%		
2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 Dokumen	100%	Tidak ada masalah	
				Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Bealisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	27 Laporan	27 Laporan	100%	Tidak ada masalah	
				Administrasi Keuangan perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	100%	Tidak ada masalah	
				Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4 laporan	4 Laporan	100%	Tidak ada masalah	

					Keuangan Akhir Tahun Skpd					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	4 paket	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4 paket	4 Paket	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	Tidak ada masalah	
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	75 Laporan	75 laporan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	36 Laporan	36 laporan	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %	Tidak ada masalah	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100%	Tidak ada masalah	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15 unit	15 unit	100%	Tidak ada masalah	
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (Pug) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (Pprg) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	100%	Tidak ada masalah	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	Tidak ada masalah	
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						

				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 dokumen	100%	Tidak ada Masalah	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Advokasi Dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	100%	Tidak ada Masalah	
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	15 Layanan	100%	Tidak ada Masalah	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat	45 orang	45 orang	100%	Tidak ada Masalah	

				Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	peningkatan kapasitas					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	Tidak ada Masalah	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Sdm Yang Memperoleh Advokasi Dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/ Kegiatan Pencegahan Kta	292 orang	292 orang	100%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan	62 orang	62 orang	100%	Tidak ada masalah	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan	Jumlah Sdm Penyedia Layanan Yang Terlatih Dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan Dan	123 orang	123 orang	100%	Tidak ada masalah	

				penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Penanganan Ampk					
2.3 URUSAN PANGAN										
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										
2.3				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	14	14	100	Tidak Ada
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	16	100	Tidak Ada
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok,	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Distribusi Pangan	Laporan	Dokumen	12	12	100

				Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis	Pokok dan Pangan Lainnya					
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	Dokumen	Dokumen	1	1	100
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan pangan Pemerintah Kab/Kota	ton	0,5	0	0	Masih dalam proses penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
				SUB KEGIATAN:						
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1	1	100%	Tidak Ada
				Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumebr Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal	laporan	1	1	100%	Tidak Ada
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
				KEGIATAN: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						

				SUB KEGIATAN:						
				Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di mutakhirkan	nilai	78	83	106,41%	Tidak Ada
2.4 URUSAN PERTANAHAN										
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN										
				NIHIL						
2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP										
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		Penujangan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		2	2			
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10	10			
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		5	5			
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5	5			
				Administrasi keuangan perangkat daerah		30	30			
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		60	60			
				Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		24	24			
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan		4	4			

				Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD						
				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		12	12			
				Pengaman balak mirih daerah SKPD		12	12			
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah		12	12			
				Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah		1	1			
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		62	62			
				Adminitansi umum perangkat daerah		1	1			
				Penyediaan komponen instalasi Listrik/peneranga n bangunan kantor		12	12			
				Penyediaan bahan logistik kantor		12	12			
				Penyediaan barang cetaka dan pengadaan		12	12			
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	12			
				Pengadaan barang milik daerah penunjang		1	1			

				urusan pemerintahan daerah						
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2	2			
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		2	2			
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Unit	1			
				Penyediaan jasa surat menyurat		12	12			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik		12	12			
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12	12			
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Bulan	100			
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan		12	12			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		12	12			

				Perencanaan lingkungan hidup		15	15			
				Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)		15	15			
				Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota		15	15			
				Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		8	8			
				Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota		8	8			
				Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut		5	5			
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		2	2			
				Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota		1	1			

				Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota		192,9	192,9			
				Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		192,9	192,9			
				Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		10	10			
				Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		10	10			
				Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintahan provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan		1	1			
				Penyelenggara kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/kota		1	1			
				Pembuatan dan pelaksanaan KLHS		1	1			
				Penyelenggara KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup		1	1			

				Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)		2	2			
				Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		6	6			
				Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH		3	3			
				Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		3	3			
				Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan		2	2			

				lingkungan hidup untuk Masyarakat						
				Penyelenggara Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/kota		3	3			
				Pendamping gerakan peduli lingkungan hidup		3	3			
				Penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat		3	3			
				Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat daerah kabupaten/kota		3	3			
				Penilaian kinerja Masyarakat/lemb agamasyarakat/d unia usaha/dunia Pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		3	3			
				Pengelolaan persampahan		Pengurangan 28% dan penanganan 71%	Pengurangan 28% dan penanganan 71%			
				Pengelolaan sampah		Pengurangan 28% dan penanganan 71%	Pengurangan 28% dan penanganan 71%			
				Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,		12	12			

				pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampai di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota						
2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersediannya gaji dan tunjangan bagi ASN	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Administrasi Umum perangkat Daerah						
				Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah						
				Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	Tidak ada masalah	

				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan mesin skpd	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada masalah	
				Program Pendaftaran Penduduk						
				Pelayanan pendaftaran penduduk						
				Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	Tidak ada masalah	
				Penerbitan Dokumen atas hasil pelopran peristiwa kependudukan	Tersedianya dokumen kependudukan bagi masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	Tidak ada masalah	

				Program Pencatatan Sipil						
				Pelayanan Pencatatan Sipil						
				Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	Tidak ada masalah	
				Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
				Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Terpeliharanya peralatan SIAK	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	Tidak ada masalah	
				Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	Tidak ada masalah	
2.7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
				Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35 Laporan	35 Laporan	100%	Tidak ada masalah	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						

				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	499 lembaga	499 lembaga	100%	Tidak ada masalah	
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	129 unit	129 unit	100%	Tidak ada masalah	
2.8 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
				Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Institusi Yang Mengimplementasikan Materi Kependudukan	2	2	100	Tidak ada	Tidak ada
				Kegiatan :						
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah OPD Yang Memanfaatkan Data KB Sebagai Salah Satu Dasar	6	5	83,3	Tidak ada	Tidak ada

				Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Dalam Perencanaan Pembangunan					
				Sub Kegiatan :						
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4	10	250	Tidak ada	Tidak ada
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12	100	Tidak ada	Tidak ada
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	68	71,31	104,86	Tidak ada	Tidak ada
					Persentase Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,4	7,64	149,21	Tidak ada	Tidak ada
					Persentase Peserta KB Aktif MKJP	28	24,86	88,78	Tidak ada	Tidak ada
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	Persentase Masyarakat Yang Terpapar Program Bangga Kencana	82	82	100	Tidak ada	Tidak ada
				Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi Yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	4	100	Tidak ada	Tidak ada
				Promosi dan KIE program KKBPK	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE	3	3	100	Tidak ada	Tidak ada

				melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang	Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang					
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya	10	10	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	13	13	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pengendalian program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2	2	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Penyuluh KB Yang Berkinerja Baik	100	100	100	Tidak ada	Tidak ada
				Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	214	214	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) Yang Siap Melayani KB	30	30	100	Tidak ada	Tidak ada

				Daerah Kabupaten/ Kota						
				Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	120	120	100	Tidak ada	Tidak ada
				Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200	1388	115,66	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	5	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30	30	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Persentase Stekholder / Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja Yang Berperan Aktif Dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana	80	80	100	Tidak ada	Tidak ada

				Kesertaan ber KB						
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	20	20	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	20	35	175	Tidak ada	Tidak ada
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelompok Catur Bina Yang Aktif	80	78	97,5	Tidak ada	Tidak ada
					Median Usia Kawin Pertama	24	24	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok Catur Bina Yang Mendapatkan Pembinaan	80	78	97,5	Tidak ada	Tidak ada
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Yang Tersedia	25	32	128	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan biaya operasional bagi	Jumlah Kader Pengelola dan	360	360	100	Tidak ada	Tidak ada

				pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang Mendapat Biaya Operasional Kegiatan					
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	4	4	100	Tidak ada	Tidak ada
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	60	96	160	Tidak ada	Tidak ada
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan	4	5	125	Tidak ada	Tidak ada

				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Mendapat Biaya Operasional Kegiatan	25	19	76	Tidak ada	Tidak ada
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4	2	50	Tidak ada	Tidak ada
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4	4	100	Tidak ada	Tidak ada
				Pendampingan Keluarga Berisiko	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	2988	2131	71,31	Tidak ada	Tidak ada

				Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					
2.9 URUSAN PERHUBUNGAN										
DINAS PERHUBUNGAN										
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	100 %	100 %		
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan-laporan rutin perencanaan, pencapaian kinerja dan keuangan (Belanja Barang Alat/Bahan Cetak Kantor)	24 Laporan	24 Laporan	100%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang/bulan	38 orang/bulan	100 %		

				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah						
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya perlengkapan Jukir Berupa ID Card agar tercapainya laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Rertibusi	1 Laporan	1 laporan	100%		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya jasa pendukung pelayanan umum Kantor					
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100 %		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Gedung kantor yang terdiri dari komputer PC, Laptop dan Printer Scanner.	2 paket	2 paket	100 %		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor terdiri dari peralatan kebersihan, bahan pembersih kantor, alat tulis kantor, materai, makanan dan minum rapat dan nataru, retribusi pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat	1 paket	1 paket	100%		

					pemadam kebakaran dan retribusi sampah.					
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terdiri dari (Map, blanko disposisi surat, blanko tilang, kertas F4 dan cetak karcis retribusi).	1 paket	1 paket	100 %		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	12 dokumen	12 dokumen	100 %		
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. (Belanja Perjalanan Dinas)	12 Laporan	12 Laporan	100 %		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa pendukung pelayanan administrasi kantor					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 Laporan	12 Laporan	100%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor terdiri dari honorarium/upah bpjs Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi petugas keamanan kantor, tenaga pengendali lalu lintas, operator computer, tenaga administrasi kantor, pengemudi	12 Laporan	12 Laporan	100%		

					dan pramugara bus trans tebing tinggi dan sopir kepala dinas					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan.	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	7 Unit	7 Unit	100%		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terdiri dari service perbaikan AC split, perbaikan sedang cctv, service komputer dan service printer	35 Unit	35 Unit	100%		
2				PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	penyediaan prasarana pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkelanjutan dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %		

				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang terpelihara dengan baik dan peningkatan keamanan dan pencegahan resiko kecelakaan lalu lintas					
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan berupa Plank Peringatan Sebidang dan Plank Tarif Parkir	22 Unit	22 Unit	100%		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan berupa Traffic Ligh, Warning Light dan CCTV Persimpangan Jalan	13 Unit	13 Unit	100%		
				Pengolaan Terminal Penumpang Tipe C						
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Masterplan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan bermotor yang layak beroperasi					
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya registasi kendaraan wajib uji kendaraan bermotor	6000 Unit	6000 unit	100 %		

				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	6000 dokumen	6000 dokumen	100 %		
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 unit	11 unit	100 %		
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Jalan	Kecepatan rata – rata kendaraan di jalan yang menjadi kewenangan kota					
				Pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/ kota	12 Laporan	12 Laporan	100 %		
				Sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota	5 dokumen	5 dokumen	100%		
				Penataan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Berupa kegiatan Forum LLAJ	5 Laporan	5 Laporan	100%		

				Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						
2.10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Laporan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100 %				
					Laporan Publikasi Informasi Daerah Melalui Media Komunikasi Publik	100 %				
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Dokumen Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4 Dokumen				
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	Rp125.256.40 0,00	99,19%	--	--
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	Rp588.579.10 0,00	98,79%	--	--
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	Rp1.025.660.0 00,00	99,98%	--	--
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Masyarakat,Media Dan Komunitas Dalam Mendiseminasikan Informasi Program Atau Kebijakan	4 Dokumen	Rp542.142.02 6,00	99,83%	--	--
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tertingkatnya Pengelolaan Infrastruktur Dan	100 %				

					Aplikasi Informatika					
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Dokumen E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen				
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp2.856.887.700,00	98,77%	--	--
2.11 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	85%	100%	Tidak Ada	-	-	
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	20 Unit	Tidak Ada	-	-	
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Unit	20 Unit	Tidak Ada	-	-	
				Program Pendidikan Dan	85%	100%	Tidak Ada	-	-	

				Latihan Perkoperasian						
				Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	Tidak Ada	-	-	
				Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan PerkoperasianSer ta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	30 Orang	30 Orang	Tidak Ada	-	-	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	80%	92%	Tidak Ada	-	-	
				Pemberdayaan Usaha MikroYang Dilakukan Melalui	80%	92%	Tidak Ada	-	-	
				Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	12 Unit	8 Unit	Kurangnya kesadaran debitur Untuk melunasi hutangnya	Melakuka n peninjaua n dan pemantau an ke Debitur	-	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan	10 Unit	10 Unit	Tidak Ada	-	-	

				Pengembangan Usaha Mikro						
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	50 Orang	Tidak Ada	-	-	
				Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Umkm Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UMKM Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	120 Orang	120 Orang	Tidak Ada	-	-	
2.12 URUSAN PENANAMAN MODAL										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,63	3,99	109%	Tidak ada Permasalahan	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelesaian laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	Tidak dilaksanakan karena keterlambatan waktu dan anggaran di hapuskan pada PAPBD	
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	36 Laporan	36 Laporan	100%	Tidak ada Permasalahan	

				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	50%	50%	50%	Tidak ada petunjuk untuk pengadaan batik kota Tebing Tinggi	
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	45 Paket	0 Paket	0%	Tidak ada petunjuk untuk pengadaan batik kota Tebing Tinggi	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45 Orang	45 Orang	100%	Tidak ada permasalahan	
				Administrasi Umum Perangkat daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya kondisi penerangan bangunan kantor yang baik dalam mendukung proses kegiatan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK, alat dan bahan pembersih dan makan minum kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan Barang cetakan	Terpenuhinya kebutuhan barang	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	

				dan penggandaan	cetakan dan penggandaan					
				Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan dan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	61%	61%	Adanya Perpindahan kantor ke gedung Balai Kartini Conveticion Centre sehingga akan menyesuaikan kembali kebutuhan kantor	
				Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan Mebel kantor yang baik dan memadai	100%	0%	0%	Adanya Perpindahan kantor ke gedung Balai Kartini Conveticion Centre sehingga akan menyesuaikan kembali kebutuhan kantor	
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang baik dan memadai	100%	71%	71%	Adanya Perpindahan kantor ke gedung Balai Kartini Conveticion Centre sehingga akan menyesuaikan kembali kebutuhan kantor	

				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggaranya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang baik dan memadai	100%	71%	71%	Adanya Perpindahan kantor ke gedung Balai Kartini Convetion Centre sehingga akan menyesuaikan kembali kebutuhan kantor	
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggaranya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebel	1 tahun	1 tahun	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi	100M	10M	1%		
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	0	0%	Tidak ada permasalahan	Tetap mengutamakan kegiatan prioritas
				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Terselenggaranya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	1Dokumen	0	0%	Tidak ada permasalahan	Tetap mengutamakan kegiatan prioritas

				Penanaman Modal	Penanaman Modal					
				Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	100 M	10 M	1%		
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Terselenggaranya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya strategi promosi penanaman modal	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,63	3,99	109%		
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Modal Satu Pintu Dibidang PenanamanModal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Modal Satu Pintu Dibidang PenanamanModal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	1 tahun	1 tahun	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Terpenuhinya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1 tahun	1 tahun	100%	Tidak ada Permasalahan	

				Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik					
				Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Terpenuhinya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1 tahun	1 tahun	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	100%	Tidak ada permasalahan	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi	100 M	10M	1%		
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan	
				Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	100%	Tidak ada permasalahan	
				Pengawasan Penanaman Modal	Terpenuhinya Pengawasan Penanaman Modal	12 Kegiatan usaha	12 Kegiatan usaha	100%	Tidak ada permasalahan	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,63	3,99	109%		

				Penanaman Modal						
				Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
				Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terpenuhinya Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA										
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		1 kgt	1 kgt	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		100 org	100 org	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggara		1 Dok	1 Dok	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL

				an Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		100 orang	100 org	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		1 Kgt	1 Kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1 Kgt	1 Kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1 laporan	1 laporan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		1 Kgt	1 Kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pembinaan dan Pengembangan olahraga Prestasi tingkat daerah Provinsi		1 Kgt	1 Kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pembinaan dan Pengembangan atlet Berprestasi Kabupaten/kota		10 orang	25 orang.	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi olahraga		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Peningkatan kerja sama Organisasi keolahragaan Kabupaten/kota		2 Dok	2 Dok	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL

				dengan Lembaga terkait						
				Pembinaan dan Pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/kota		1 Kgt	1 Kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Koordinasi, sinkronisasi Dan pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana olahraga Kabupaten/kota		1 unit	1 unit	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Kgt	1 Kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		32 orang	49 orang	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		12 Bln	12 Bulan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17 Dokumen	25 Dokumen	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan	25 Laporan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bln	12 Bulan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		29 Org	29 Orang	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 kegiatan	-	0%	Tidak Ada Permasalahan	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	-	0%	Tidak Terlaksana	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bln	12 Bulan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	1 Paket	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	1 Paket	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	1 Paket	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL

				Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya		20 Unit	20 Unit	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi		12 laporan	12 laporan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	12 Laporan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 unit	3 unit	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		68 unit	68 unit	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
2.14 URUSAN STATISTIK										
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
				PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	7 Dokumen				
				Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Yang Dihimpun	7 Dokumen				

				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral Yang Dihimpun	7 Dokumen	Rp95.371.920,00	99,79%	--	--
2.15 URUSAN PERSANDIAN										
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100 %				
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TERSELENGGARANYA DOKUMEN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Dokumen				
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	1 Dokumen	Rp8.106.000,00	100%		
2.16 URUSAN KEBUDAYAAN										
DINAA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
				Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan					
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Mengikuti Pembinaan SDM dan Lembaga Adat			30,64		
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindun	2 dokumen	2 dokumen	0	Kegiatan Gebyar Seni (PRSU) tidak dilakuka dikarenakan	

					gan, Pengembangan dan Pemanfaatan				adanya kegiatan Pilkada 2024 Serentak	
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, danPranata Kebudayaan	2 dokumen	2 dokumen	100%		
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemajuan Tradisi Budaya	2 dokumen	2 dokumen	61,42		
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	1 Tahun			
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Adat			36,90		
				Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat					

				Pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1 Tahun			
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang	1 Tahun			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	50 Unit	1 Tahun			
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional						
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1 Tahun			
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan SDM Bidang Kesenian Yang Berstandar dan Berkualitas					
					Jumlah					

				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	350 Orang	1 Tahun	78,52		
				Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Melakukan Pembinaan Sejarah Lokal					
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Orang Yang Memahami Lahirnya Suatu Peristiwa Sejarah					
				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang DapatDiakses Masyarakat	1 dokumen	1 Tahun	63,68		
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	7 Objek	1 Tahun	0 Objek	Belum dilakukan dikarenakan belum adanya TIM ahli Cagar Budaya yang ada di Kota Tebing Tinggi	
				Program Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Museum					
				Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman	5 Orang	1 Tahun			

				SDM Permuseuman	yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya					
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	10 unit	1 Tahun			
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	150 unit	1 Tahun			
				Revitalisasi sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	1 Tahun			
2.17 URUSAN PERPUSTAKAAN										
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH										
1	URUSAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN	131.000	132.900	101,45%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	1	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	JUMLAH LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK YANG DIKEMBANGKAN	5	5	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	

					DENGAN MANAJEMEN LAYANAN TIK					
				PENGEMBANGA N PERPUSTAKAA N DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KO TA	JUMLAH PERPUSTAKAAN YANG DIKEMBANGKAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DI WILAYAH KABUPATEN / KOTA SESUAI KEWENANGANN YA	2	2	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N BAHAN PUSTAKA	JUMLAH BAHAN PERPUSTAKAAN YANG DILAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N UNTUK MEWUJUDKAN KEBERAGAMAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN	19	19	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KO TA	JUMLAH KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN KOTA	3	3	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN	JUMLAH LOKUS PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN	1	1	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	

				KHUSUS SERTA MASYARAKAT						
				PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	JUMLAH LOKUS PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	2	2	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	92	94	101,09%	Tidak Ada Permasalahan	
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4	4	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4	4	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BULAN TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12	12	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	34	34	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN	1	1	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	

					KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD					
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BULAN TERLAKSANANY A ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12	12	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2	2	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE TERLAKSANANY A ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100	100	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN NYA	JUMLAAH PAKET PENGADAAN PAKAIAN DINAS	1	1	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BULAN TERLAKSANANY A ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12	12	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENER ANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERA NGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	4	4	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	4	4	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4	4	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	

					YANG DISEDIAKAN					
				PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	4	4	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYELENGGA RAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGAR AAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12	12	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PAKET PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGADAAN MEBEL	JUMLAH PAKET PENGADAAN MEBEL	1	1	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	6	6	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12	12	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA	12	12	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	

					AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN					
				PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	12	12	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12	12	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN , BIAYA PEMELIHARAAN , DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	1	1	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN , BIAYA PEMELIHARAAN , PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	7	7	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	7	7	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	

				PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIR EHABILITASI	2	3	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
2.18 URUSAN KEARSIPAN										
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH										
2.	URUSAN KEARSIPAN	Dinas Perpusta kaan dan Arsip Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP	66	66	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KO TA	PERSENTASE ARSIP DINAMIS YANG TELAH DIBUATKAN DAFTAR ARSIP	100	100	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	JUMLAH NASKAH DINAS YANG DILAKUKAN PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN	1.500	1.500	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KO TA	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOT A	4	4	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KO TA	JUMLAH ARSIP STATIS YANG DIKELOLA	50	50	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	JUMLAH ARSIP STATIS YANG DILAKUKAN AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS	50	50	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	

				PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KO TA	JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKN MELALUI JIKN	20	20	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PEMBERDAYAA N KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	JUMLAH LAPORAN HASIL PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1	1	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATA N ARSIP	PERSENTASE URUSAN YANG TELAH DILAKUKAN PEMUSNAHAN ARSIPNYA	7	7	100,00%	Tidak Ada Permasalahan	
				PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	JUMLAH ARSIP YANG DIMUSNAHKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOT A YANG MEMILIKI RETENSI DIBAWAH 10 TAHUN	200	343	171,50%	Tidak Ada Permasalahan	
				PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	JUMLAH ARSIP YANG DILAKUKAN PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI	200	343	171,50%	Tidak Ada Permasalahan	

					BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN					

3.2.3 URUSAN PILIHAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										
				PROGRAM: PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
				SUB KEGIATAN:						
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	tidak ada masalah	-
				KEGIATAN: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						

				SUB KEGIATAN:						
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	1 unit	1 unit	100	tidak ada masalah	
				PROGRAM: PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
				KEGIATAN: Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						-
				Sub Kegiatan:						-
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala	5 Unit Usaha	5 Unit	100%	Tidak ada masalah	

					Usaha dan resiko					
				KEGIATAN: Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota						
				Sub Kegiatan:						
				Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100 %	Tidak ada masalah	
3.2 URUSAN PARIWISATA										
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA										
				Program Pemasaran Pariwisata		1 laporan	1 laporan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		1 Kgt	1 Kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media		1 Dok	1 Dok	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL

				Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Tingkat Dasar		20 Org	20 Orang	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		20 Org	20 Orang	100%	Tidak Ada Permasalahan	NIHIL
3.3 URUSAN PERTANIAN										
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										
				PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
				KEGIATAN: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						
				SUB KEGIATAN:						
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	2 laporan	2 laporan	100	Tidak ada masalah	

				Teknologi dan Spesifik Lokasi	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 laporan	2 laporan	100	Tidak ada masalah	
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	100	tidak ada masalah	
				PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
				KEGIATAN: Pengembangan Prasarana Pertanian						
				SUB KEGIATAN:						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Tidak ada masalah	
				KEGIATAN: Pembangunan Prasarana Pertanian						
				SUB KEGIATAN:						
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	1 unit	100	Tidak ada masalah	
				KEGIATAN: Penjaminan Kesehatan Hewan,						

				Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				SUB KEGIATAN:						
				Pemberantasan Penyakit Hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	1 laporan	1 laporan	100	tidak ada masalah	
				PROGRAM: PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN						
				KEGIATAN: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana pertanian Kabupaten/Kota						
				SUB KEGIATAN:						
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang	50 Ha	50 Ha	100	tidak ada masalah	
				PROGRAM: PERIZINAN USAHA PERTANIAN						
				KEGIATAN: Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				SUB KEGIATAN:						
				Penilaian Kelayakan dan Pemberian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian	2 Dokumen	1 Dokumen	50	tidak ada	

				Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	pertimbangan teknis izin usaha pertanian					
				PROGRAM: PENYULUHAN PERTANIAN						
				KEGIATAN: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
				SUB KEGIATAN:						
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1 unit	1 unit	100	tidak ada	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1 unit	1 unit	31,32	Tidak tercapai kinerja sebesar 100% dikarenakan pengalihan anggaran DBH Sawit ke kegiatan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana bagi Hasil Perkebunan Sawit	Menyesuaikan ketentuan berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana bagi Hasil Perkebunan Sawit
3.4 URUSAN PERDAGANGAN										
DINAS PERDAGANGAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
	PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	100%	Tidak Ada	-	-	
				Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	-	-	

				Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						
				Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	-	-	
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	13 Laporan	Tidak Ada	-	-	
				Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada	-	-	
				Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada	-	-	
				Program St andardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100%	101%	Tidak Ada	-	-	
				Pelaksanaan	100%	101%	Tidak Ada	-	-	

				Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan						
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1.400 Unit	1.307 Unit	Tidak Ada	-	-	
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	90 Orang	98 Orang	Tidak Ada	-	-	
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	50%	Tidak Ada	-	-	
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Laporan	1 Laporan	PRSU tidak dilaksanakan	-	-	
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	PRSU tidak dilaksanakan	-	-	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	75%	71%	Tidak Ada	-	-	
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	14 Pasar	10 Pasar	Tidak Ada	-	-	

				Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya						
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	14 Pasar	10 Pasar	Tidak Ada	-	-	
2.	PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	83%	Tidak Ada	-	-	
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada	-	-	
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan	Tidak Ada	-	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ada	-	-	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	Tidak Ada	-	-	
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada	-	-	

				Kuangan Akhir Tahun SKPD						
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada	-	-	
				Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	21 Laporan	21 Laporan	Tidak Ada	-	-	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	0 Paket	Tidak ada Perwa penetapan motif Batik Tebing Tinggi	-	-	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0 Paket	Tidak ada Perwa penetapan motif Batik Tebing Tinggi	-	-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	Tidak Ada	-	-	

				Penyelenggara an Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	107 Laporan	Tidak Ada	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	Tidak Ada	-	-	
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	7 Unit	7 Unit	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerint ahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	2 Unit	Tidak Ada	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada	-	-	

				Jabatan						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2 Unit	1 Unit	Tidak Ada	-	-	
				Pemeliharaan Mebel	5 Unit	5 Unit	Tidak Ada	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	40 Unit	40 Unit	Tidak Ada	-	-	
3.5 URUSAN PERINDUSTRIAN										
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN										
1.	Bidang Perindustrian			Program perencanaan dan Pembangunan Industri						
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a						
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kepada Industri Kecil Menengah	1 dokumen	1 dokumen	100%		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya pembinaan kemasan produk industri kecil dan promosi produk industri kecil melalui	1 dokumen	1 dokumen	100%		

					Dekranasda Kota Tebing Tinggi					

3.2.4 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMAS ALAN	UPAYA MENGA TASI PERMAS ALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1 PERENCANAAN										
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	100%			

					<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 lap	3 lap			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	3 lap			
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	23 orang			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Peresentase tersedianya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100%	-			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	-			
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Peresentase tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah</i>	100%	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket			
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan					
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan			
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya barang milik daerah</i>	100%	100%			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau operasional yang disediakan	2 unit	2 unit			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket			
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah</i>	100 %	100 %			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 lap	1 lap			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap			
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i>	100 %	100 %			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas					

				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit			
				Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Persentase tingkat keselarasan pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan menengah - Persentase Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%			
				<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan</i>	100%	100%			
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 BA	3 BA			
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	2 BA			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dok	3 dok			
				<i>Analisis Data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan</i>	<i>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan</i>	100 %	100 %			
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	1 dok	1 dok			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	150 orang	150 orang			

				<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</i>	100 %	100 %			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 lap	2 lap			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase dokumen Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu - Persentase dokumen bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu Persentase dokumen bidang Infrastruktur dan Wilayah tepat waktu	100% 100% 100%	100% 100% 100%			
				<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersedia</i>	100%	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dok	2 dok			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan			
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/renja bidang pembangunan manusia	3 laporan	3 laporan			

				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang tersedia	100%	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	2 dok	2 dok			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan			
				Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersedia	100 %	100 %			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	4 dok			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 laporan	4 laporan			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan	4	4			

				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	laporan	laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	6 laporan	6 laporan			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	4 dok			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 lap	4 lap			
4.2 KEUANGAN										
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH										
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah tahun penyediaan dana penunjang urusan pemerintahan kota	12 bulan	12 bulan	100 %	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dihasilkan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0	0	Belum ada petunjuk teknis karena desain batik belum selesai	Menunggu petunjuk teknis
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku	-	-	-	Tidak Ada Masalah	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pengadaan Barang Milik Daerah						

				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Bulan Pengadaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	12 Angka	12 Angka	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Bulan Pengdadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan untuk Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Adanya OPD yg menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi lebih lanjut terkait penyusunan laporan keuangan

				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	32 Dokumen	32 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32 Dokumen	32 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	32 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	32 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Dokumen Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD yang Menyampaikan Laporan Posisi Kas Per Bulan	32 OPD	32 OPD	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen Anggaran Kas OPD	32 Dokumen	32 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	

				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer lainnya /Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai/ Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melakukan Rekonsiliasi	32 OPD	32 OPD	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Sub kegiatan	Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Laporan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah LKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah OPD yang Melakukan Rekonsiliasi	32 OPD	32 OPD	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %		

				Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan Pemerintah Daerah				Tidak Ada Masalah	
				Koordiansi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten /Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Laporan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Bulan Penyediaan dana Darurat dan Mendesak	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak Ada Masalah	
3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Aset Daerah SKPD yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Adanya OPD yg menyampaikan laporan aset tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi lebih lanjut terkait penyusunan laporan aset
				Pengelolaan Barang Milik						

				Daerah						
				Penyusunan Standart Harga	Dokumen Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Juml;ah OPD yang melakukan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	32 OPD	32 OPD	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah/ Kota	Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Tidak Ada Masalah	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi pajak daerah	100 %	100 %	100 %	-	-
				Pengelolaan Pendapatan Daerah						
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				100 %	Tidak Ada Masalah	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Jumlah SPPT yang Dibagikan	50500 SPPT	50500 SPPT	100 %	Tidak Ada Masalah	

				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Jumlah WP dan Presentase Jumlah Transaksi Pembayaran Online	100 Persen	100 Persen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Presentase Jumlah Transaksi Pembayaran Online	100 Persen	100 Persen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	100 Persen	100 Persen	100 %	Tidak Ada Masalah	
				Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Realisasi PBB dan BPHTB	100 Persen	100 Persen	100 %	Tidak Ada Masalah	
4.3 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
			Penyusunan laporan capaian realisasi kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	40 Laporan	40 Laporan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Pengelolaan gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS BKPSDM Kota Tebing Tinggi	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Pengelolaan penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Terciptanya kondisi penerangan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan	

			bangunan gedung kantor	Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang baik dalam mendukung proses kegiatan kantor				han berarti yang dihadapi	
			Pengelolaan ATK dan makan minum rapat	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan tersedianya makanan dan minuman rapat dilingkungan BKD	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
			Pengelolaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
			Pengelolaan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Pengelolaan jasa telepon, fasilitas internet, air & listrik kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, fasilitas internet, air & listrik	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
			Pengelolaan gaji dan asuransi BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan tenaga kontrak	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji Tenaga Kontrak dan jasa pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Pengelolaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kondisi kendaraan dinas /operasional dalam keadaan baik dan layak pakai	3 Unit	3 Unit	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
			Pengelolaan pemeliharaan peralatan kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi peralatan kantor dalam keadaan baik dan layak pakai	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti	

									yang dihadapi	
			Pengelolaan pemeliharaan bangunan gedung kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi bangunan gedung kantor dalam keadaan baik dan layak pakai	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
				Program Kepegawaian Daerah						
				Pengembangan Kompetensi ASN						
			Melakukan kerjasama dengan lembaga penyelenggara Diklat dan Bimbingan Teknis PNS	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik diklat teknis/ fungsional maupun diklat struktural	950 Orang	475 Orang	50,00%	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	-
				Mutasi dan Promosi ASN						
			Penerapan dan pengembangan assesment kepegawaian secara berkelanjutan.	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	80%	76,63%	95,79%	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	-
			Penerapan dan pengembangan assesment kepegawaian secara berkelanjutan.	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	80%	76,63%	95,79%	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	
			Pemutakhiran sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan administrasi kepegawaian	98%	97,75%	99,74%	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	-
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
			Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi dengan melakukan analisis jabatan	Penyusunan Rencana kebutuhan, Jenis dan jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	80%	76,63%	95,79%	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	-

			dan analisis beban kerja yang tepat							
			Pemutakhiran sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan administrasi kepegawaian	98%	97,75%	99,74%	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	-
			Pemutakhiran sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan administrasi kepegawaian	98%	97,75%	99,74%	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	-
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
			Pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN yang berprestasi	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	25%	20%	80%	Tidak ada masalah yang dihadapi	
			Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran hukum dan disiplin	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	25%	20%	80%	Tidak ada masalah yang dihadapi	-
			Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran hukum dan disiplin	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	25%	20%	80%	Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi	-
4.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang/inovasi yang berjalan	100%	100%			
				<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Persentase dokumen litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian yang tersedia</i>	100%	100%			

				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 laporan	1 laporan			

3.2.5 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1 SEKRETARIAT DAERAH										
5.1.1 Bagian Administrasi Umum										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya urusan penunjang pemerintahan daerah kota					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselesaikannya temuan hasil pengawasan	100%	100%	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	102 Orang/bulan	99 Orang/bulan	97,05%	Tidak ada permasalahan	–
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan	–

					koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD					
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100%	Tidak ada permasala han	—
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	—	—	Tahun 2024 tidak dilaksanak an	—
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	100%	Tidak ada permasala han	—
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak ada permasala han	—
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pertanggung barang milik negara	100%	100%	100%	Tidak ada permasala han	—
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	Tidak ada permasala han	—
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak ada permasala han	—
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak ada permasala han	—
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Tidak ada permasala han	—

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah	100%	100%	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 Unit	30 Unit	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa urusan penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	Tidak ada permasalahan	–
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan	–

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan	—
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Tidak ada permasalahan	—
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 unit	29 unit	100%	Tidak ada permasalahan	—
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	20 unit	100%	Tidak ada permasalahan	—
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	75 unit	75 unit	100%	Tidak ada permasalahan	—
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 unit	7 unit	100%	Tidak ada permasalahan	—
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	100 %	100%	Tidak ada permasalahan	—
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Tidak ada permasalahan	—
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya belanja dapur, perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi Wkdh	12 Paket	—	—	Tahun 2024 tidak dilaksanakan	—

5.1.2 Bagian Organisasi

				Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan, Analisis Jabatan, Pelayanan Publik, Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100	100	100%	Tidak Ada	Tidak Ada
				Kegiatan: Penataan Organisasi	Terlaksananya kegiatan penataan organisasi untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat Terlaksananya kegiatan penataan organisasi meningkatkan efektivitas pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD Terlaksananya kegiatan penataan organisasi untuk peningkatan nilai akuntabilitas dan kinerja Instansi	100	100	100%	Tidak Ada	Tidak Ada
				Sub Kegiatan: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Tidak Ada	Tidak Ada
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada
				Sub Kegiatan:	Jumlah Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	100%	Tidak Ada	Tidak Ada

				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					
				Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	Tidak Ada	Tidak Ada
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak Ada	Tidak Ada
5.1.3 Bagian Pemerintahan										
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					Tidak Ada Permasalahan	
				Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan				Tidak Ada Permasalahan	
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	94%		Tidak Ada Permasalahan	
				Administrasi Kewilayahan					Tidak Ada Permasalahan	

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Buku Adminisrasi Kecamatan dan Kelurahan, Terlaksananya Kegiatan Administasi Kewilayahan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan, Kelurahan dan OPD	100%	88%		Tidak Ada Permasala han	
				Kerjasama dan otomi Daerah					Tidak Ada Permasala han	
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Upacara Hari Otonomi Derah, tersedianya LPPD dan Laporan Evaluasi Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	100%	92%		Tidak Ada Permasala han	
				Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100%	93%		Tidak Ada Permasala han	

				Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.	100%	65%		Tidak Ada Permasalahan	
5.1.4 Bagian Kesejahteraan Rakyat										
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat					
				Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spiritual.		100%	100%	95,65%	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		100%	92,76%	91,30%	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.		100%	95.65%	92,76%	-	-
5.1.5 Bagian Hukum										
1	Urusan Sekretariat Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Terlaksana Dengan Baik	100%	100%	100	Tidak Ada Permasalahan	-	1
			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilaksanakan	2 Keg	2 Keg	100	Tidak Ada Permasalahan	-	
			Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN/Masyarakat Yang Mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	360 orang	360 orang	100	Tidak Ada Permasalahan	-	

			Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100	Tidak Ada Permasalah an	-	
			Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Telah Diharmonisasi	100%	100%	100	Tidak Ada Permasalah an	-	
			Sub Kegiatan: 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	1. Persentase Produk Hukum Daerah Yang Telah Diharmonisasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan 2. Persentase Fasilitasi Permasalahan Hukum 3. Persentase Produk Hukum Daerah Yang Didokumentasikan	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100 100 100	Tidak Ada Permasalah an Tidak Ada Permasalah an Tidak Ada Permasalah an	- - -	
5.1.6 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia										
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program: Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam mendorong perekonomian daerah	100 %	100 %	100	Tidak Ada Permasala han	-
				Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	55 Laporan	96 Laporan	174,54	Tidak Ada Permasala han	-
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	24Dokumen	24Dokumen	100	Tidak Ada Permasala han	-

				Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengelolaan BUMD dan BLUD					
				Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	30 Laporan	71 Laporan	236,67	Tidak Ada Permasalahan	-
				Sub Kegiatan : Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada Permasalahan	-
				Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	16Dokumen	16Dokumen	100	Tidak Ada Permasalahan	-
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian,, pangan, perikanan perdagangan, Perindustrian, KUKM, penanaman mda dan tenaga kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada Permasalahan	-
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, Statistic	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada Permasalahan	-
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	12Dokumen	12Dokumen	100	Tidak Ada Permasalahan	-
5.1.7 Bagian Administrasi Pembangunan										
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase SKPD yang menargetkan realisasi keuangan pada DPA-SKPD	80 Persen	96,87 Persen	121,09%	Tidak ada permasalahan	

					>=50% pada semester I					
				Pelaksanaan kebijakan perekonomian Pembangunan	Persentase jumlah skpd yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester I	25 Persen	18,75 Persen	75%	Target tidak tercapai	Bagian Adm Pembangunan secara berkala pada bulan melakukan monitoring terhadap cap realisasi SKPD, baik keuangan maupun fisik rapat disamp agar SKPD mempercepat pelaksanaan kegiatan.
				Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Tidak ada permasalahan	
				Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Tidak ada permasalahan	
				Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Tidak ada permasalahan	
5.1.8 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa										
1				Perekonomian dan Pembangunan		65 doku men	67 doku men	100 %		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase pengadaan barang/jasa yang diusulkan OPD terlaksana secara	65 doku men	67 doku men	100 %	Kurang nya pejabat fungsional PBJ	Penambah an pejabat fungsional PBJ

					akuntabel dan transparan.					
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang/jasa	65 doku men	67 doku men	100 %	Masih adanya personil LPSE yang bersifat Adhoc	Pengajuan formasi CPNS untuk personil LPSE
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	65 doku men	67 doku men	100 %	Masih kurangnya pelaksanaan diklat SDM di PBJ	Pelaksanaan diklat di PBJ
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	18 orang	18 orang	100 %		
5.1.8 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan										
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	95 %	195	Tidak Ada Permasalahan	-
				Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	350 Laporan	732 Laporan	209	Tidak Ada Permasalahan	-
				Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	150 Laporan	312 Laporan	208	Tidak Ada Permasalahan	-
				Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	50 Laporan	108 Laporan	216	Tidak Ada Permasalahan	-
				Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	150 laporan	312 Laporan	208	Tidak Ada Permasalahan	-
5.2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN						

				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran di refokusing	kegiatan tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan Tunjangan ASN	1,975,156,000	1,924,035,615	97	Tidak ada permasalahan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	40,000,000	7,443,400	18	Tidak ada permasalahan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas batik ASN dan THL	22,000,000	-	0	belum ada petunjuk pengadaan pakaian dinas yang sesuai dengan anggaran yang ada	menunggu petunjuk dari atasan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,986,400	6,847,400	98	Tidak ada permasalahan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	61,205,600	42,688,000	70	Tidak ada permasalahan	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	19,950,000	-	0	Tidak ada permasalahan	
				Penyelenggaraan Rapat	Jumlah laporan			99	Tidak ada	

				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	603,760,000	601,629,689		permasalahan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah						
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	255,152,200	254,492,500	99	Tidak ada permasalahan	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan Barang milik Daerah yang Diselenggarakan sebanyak	272,035,500	271,886,200	99	Tidak ada permasalahan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	23,808,000	21,688,114	91	Tidak ada permasalahan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	985,997,648	912,952,190	92	Tidak ada permasalahan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	87,000,000	72,141,144	83	Tidak ada permasalahan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61,190,000	45,245,000	74	Tidak ada permasalahan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	916,400,000	896,464,100	98	Tidak ada permasalahan	
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	10,767,369,000	9,740,444,176	90	Tidak ada permasalahan	
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	826,716,500	821,872,500	99	Tidak ada permasalahan	

				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	39,780,000	39,780,000	100	Tidak ada permasalahan	
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	-	-	0	Kegiatan tidak dilaksanakan sehingga anggaran digeser ke kegiatan yang lebih prioritas	akan disusun program kerja DPRD yang lebih efektif
				Pembahasan Kebijakan Anggaran						
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	20,000,000	20,000,000	100	Tidak ada permasalahan	
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	20,000,000	20,000,000	100	Tidak ada permasalahan	
				Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	22,500,000	22,500,000	100	Tidak ada permasalahan	
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	22,500,000	22,500,000	100	Tidak ada permasalahan	
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	22,500,000	22,500,000	100		
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1,767,776,900	1,689,926,643	95		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2,148,609,000	2,093,983,942	97		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan	2,008,313,600	1,871,556,930	93		

					Pemerintahan Bidang Perekonomian					
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	0	Kegiatan tidak dilaksanakan sehingga anggaran digeser ke kegiatan yang lebih prioritas	akan disusun program kerja DPRD yang lebih efektif
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	0	Kegiatan tidak dilaksanakan sehingga anggaran digeser ke kegiatan yang lebih prioritas	akan disusun program kerja DPRD yang lebih efektif
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	22,500,000	22,500,000	100		
				Peningkatan Kapasitas DPRD						
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	901,956,000	585,539,730	65		
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	438,599,824	341,810,102	78		
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	108,000,000	76,500,000	71		
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	399,812,472	336,666,492	84		
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	-	-	0	Kegiatan tidak dilaksanakan sehingga anggaran digeser ke kegiatan yang lebih prioritas	akan disusun program kerja DPRD yang lebih efektif
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						

				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	9,525,000	9,525,000	100		
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	-	-	0	Kegiatan tidak dilaksanakan sehingga anggaran digeser ke kegiatan yang lebih prioritas	akan disusun program kerja DPRD yang lebih efektif
				Fasilitasi Tugas DPRD						
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	264,277,000	258,774,100	98		
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	9,525,000	9,525,000	100		
						25,141,376,644	23,053,892,967	91.70	Silpa Paling besar adalah dari unsur gaji DPRD, karena ada tunjangan yang tidak bisa dibayarkan seperti tunjangan Pimpinan dan AKD karena belum disahkan	memfasilitasi dan mengaokomodir penyusunan dan pengesahan unsur Pimpinan DPRD dan AKD sesuai aturan yang berlaku

3.2.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. INSPEKTORAT KOTA										
6.		Inspektorat		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan internal yang ditindaklanjuti	97%	97%	100%		
				Kegiatan :						
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang dilaksanakan	32 Obrik	32 Obrik	100%		
				Sub Kegiatan :						
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja	10 Laporan	10 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	

				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan	20 Laporan	20 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu atas laporan kinerja	32 Laporan	32 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu atas laporan keuangan	40 Laporan	40 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	5 Laporan	5 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan Kerjasama Pengawasan Internal dalam rangka implementasi SPIP	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Kegiatan :						
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dihasilkan	41 Laporan	41 Laporan	100%		
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan kegiatan Sidang TPTGR	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan	40 Laporan	40 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan	

					dengan tujuan tertentu				berjalan dengan baik	
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pembinaan internal yang dilaksanakan	97 %	100%	103,09%		
				Kegiatan :						
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan	2 Laporan	2 Laporan	100%		
				Sub Kegiatan :						
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Kegiatan :						
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	32 SKPD	32 SKPD	100%		
				Sub Kegiatan :						
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan	

					dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				berjalan dengan baik	
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	

3.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN

NO .	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.1 KECAMATAN RAMBUTAN										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15 laporan	15 laporan	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 laporan	12 laporan	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	100%		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tahun penyediaan pengamanan barang milik daerah SKPD	1 tahun	1 tahun	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang dihasilkan	5 laporan	5 laporan	100%		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada

				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	2	2	100%		
				Pengadaan Meubel	Jumlah pengadaan mebel	1	1	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	5 jasa	5 jasa	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa Komunikasi,	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua	Tidak ada

					Sumber Daya Air dan Listrik				kegiatan berjalan dengan baik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan	1 unit	1 unit	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	100%	0%	0%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%		

					yang ada di kecamatan					
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0 Laporan	0%	Tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Penambahan Anggaran
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100%	100%	100%		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	280 Keluarga	280 Keluarga	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada

					Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
7.2 KECAMATAN PADANG HILIR										
	Urusan Administrasi Pemerintahan		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	91,67%	91,67%	Terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada juknis yang mengatur	Pembatalan kegiatan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang/bulan	38 orang/bulan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Dihasilkan	1 laporan	1 laporan	100%		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dihasilkan	1 laporan	0 laporan	0%	Tidak ada juknis yang mengatur proses pengadaan seragam pakaian batik	Kegiatan dibatalkan

				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	56 paket	0 paket	0%	Tidak ada juknis yang mengatur proses pengadaan seragam pakaian batik	Kegiatan dibatalkan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100%		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	100%		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	3 paket	3 paket	100%	Tidak ada permasalahan semua	Tidak ada

					Mesin Lainnya yang Disediakan				kegiatan berjalan dengan baik	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100%	100%	100%		

				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 laporan	1 laporan	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21 lembaga kemasyarakatan	21 lembaga kemasyarakatan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	1 laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 unit	51 unit	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 laporan	1 laporan	100%		
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	280 Keluarga	280 Keluarga	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada

					dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
7.3 KECAMATAN PADANG HULU										
	Urusan Administrasi Pemerintahan		Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	100%	100		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 laporan	12 laporan	100		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	34 orang	34 orang	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang dihasilkan	1 laporan	1 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 dokumen	8 dokumen	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	1 laporan	1 laporan	100		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1 paket	0 paket	0	Kegiatan pengadaan pakaian dinas batik tidak dapat dilaksanakan karena belum ada Perwa yang mengatur	Tidak ada
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat	4 laporan	4 laporan	100		

					<i>daerah yang dihasilkan</i>					
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 paket	5 paket	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	15 laporan	15 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	1 paket	1 paket	100		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	15 unit	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	2 jasa	2 jasa	100		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	96 laporan	96 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>2 laporan</i>	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	42 unit	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
7.4 KECAMATAN BAJENIS										
	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah		Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	100%	100%		
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya kegiatan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100%</i>		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100%</i>		

					<i>Keuangan Perangkat Daerah</i>					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	65 Orang	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksannnya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	umlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Laporan	8 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1 Bulan</i>	<i>1 Bulan</i>	<i>100%</i>		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket	96 Paket	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Pakte	32 Pakte	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	180 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	84 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	52 Unit	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	100%	100%	100%		
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	Tidak ada permasalahan semua	Tidak ada

				Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang di Kecamatan				kegiatan berjalan dengan baik	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100%	100%	100%		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Pokmas	7 Pokmas	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	7 Pokmas	7 Pokmas	100%	Tidak ada permasalahan semua	Tidak ada

					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				kegiatan berjalan dengan baik	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%		
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
7.5 KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA										
	Urusan Administrasi Pemerintahan		Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	100%	100		
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	100		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	34 orang	34 orang	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang dihasilkan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 dokumen	8 dokumen	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	100		

				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1 paket	0 paket	0	Kegiatan pengadaan pakaian dinas batik tidak dapat dilaksanakan karena belum ada Perwa yang mengatur	Tidak ada
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang dihasilkan	4 laporan	4 laporan	100		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 paket	5 paket	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	15 laporan	15 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 paket	1 paket	100		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	15 unit	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan	Tidak ada

									berjalan dengan baik	
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	<i>2 jasa</i>	<i>2 jasa</i>	<i>100</i>		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	96 laporan	96 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>100</i>	<i>Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik</i>	<i>Tidak ada</i>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	42 unit	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	100%	100%	100		
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>100</i>	<i>Tidak ada permasalahan semua</i>	<i>Tidak ada</i>

				<i>Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>				kegiatan berjalan dengan baik	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	21 laporan	21 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100%	100%	100		
				<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>3 laporan</i>	<i>3 laporan</i>	<i>100</i>	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	21 lembaga kemasyarakatan	21 lembaga kemasyarakatan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	7 unit	6 unit	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada

				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	12 laporan	12 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	500 keluarga	1000 keluarga	200	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	100%	100%	100		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2 laporan	2 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua kegiatan berjalan dengan baik	Tidak ada
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	12 laporan	12 laporan	100	Tidak ada permasalahan semua	Tidak ada

					Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat				kegiatan berjalan dengan baik	

3.2.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGI/ SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1.	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Menciptakan kondisi wilayah yang tentram dan kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Yang Terlaksana	90%	90%	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tidak ada Permasalahan	

	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	11 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	13 unit	13 unit	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	

					Pemerintahan Daerah					
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penurunan Laporan Atas Isu Radikalisme Dan Terorisme Di Masyarakat	100%	100%	100%		
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Bulan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	2 kali	2 kali	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Upacara	13kali	0	0	karena covid 19 upacara gabungan	

				Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Gabungan Dan Upacara Nasional				tidak dilaksanakan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAIPOLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKANMELALUI PENDIDIKAN POLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYAPOLITIK	Persentase Alokasi Dana Dari Partai Politik Untuk Pendidikan Politik	60 %	60 %	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	12 Bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik Yang Menerima Dana Hibah Pemerintah	10 Parpol	10 parpai politik	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	2 kali	1kali	50%	Rasionalisasi	

				Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah						
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik Yang Diverifikasi	10 Parpol	10 parpai politik	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	21%	32 %	152 %	Masa aktif kepengurusan ormas telah berakhir	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Dan Peningkatan Peran Aktif Ormas, Okp Dan Lsm	1 kali	1 kali	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Dialog Antara Ormas, Okp, Dan Lsm Dengan Pemerintah Daerah	1 kali	1kali	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Dialog Antara Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama Dengan Pemerintah	1 kali	1kali	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Persentase Penurunan Laporan Isu Ketahanan,	100 %	100 %	100 %	Tidak ada Permasalahan	

				EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ekonomi, Sosial Dan Budaya					
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Bulan Fasilitasi Forum / Diskusi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	12 bulan	12 bulan	100 %	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Gerakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn)	4 kali	1kali	25%	Rasionalisasi	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Di Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Deteksi Dini Konflik	8%	8%	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Bulan Fasilitasi Forum / Rapat Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Jumlah Bulan Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial Di Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	

				Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat, Monitoring, Dan Pelaporan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm) Di Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	
	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unjuk Rasa / Demo Di Daerah Yang Berjalan Kondusif	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak ada Permasalahan	

3.3 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang strategis yang meliputi aspek sosial, ekonomi, kesehatan, Pendidikan, lingkungan hidup, serta aspek lainnya, Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis. Selain kebijakan strategis yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga melakukan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan strategis dimaksud dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali kota, Keputusan Wali kota, Instruksi Wali Kota, maupun Surat Edaran Wali Kota. Secara rinci berbagai kebijakan strategis tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Kebijakan Strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan Nomor 364.1/085/DPKP/2022 Tanggal 02 Februari 2022	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 364.1/085/DPKP/2022 Tanggal 02 Februari 2022	Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan
2	Program Perlindungan Bencana	1. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor:100.3.3.3/1674 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kota Tebing Tinggi 2. Surat Pernyataan Bencana Walikota Tebing Tinggi Nomor:362/7635/BPBD-TT/2024	Melakukan evakuasi, penyediaan tempat penampungan/pengungsian dan penyediaan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi korban banjir yang terdampak 14 kelurahan di 5 kecamatan dengan korban sebanyak 7.212 Jiwa, serta mengadakan posko bencana selama 7 hari.
3	Rekomendasi UMK Tebing Tinggi Tahun 2025 13 Desember 2024 500.15/9404/Naker-Ind		Penetapan Upah Minimum Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota Tebing Tinggi Sebesar Rp.3.006.203,05. Dengan rekomendasi UMK ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kesejahteraan pekerja dan mengurangi sengketa antara pekerja dan pemberi kerja.
4	Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kota Tebing Tinggi	Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/697 Tahun 2024 Tanggal 04 April 2024	Sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas Posyandu

5	1. Melakukan upaya yang bersifat antisipatif, persuasive dan promotive dalam upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan 2. Pencapaian Swasembada pangan khususnya untuk komoditi tanaman padi dan jagung serta dalam rangka mendukung pengendalian inflasi sector pertanian melalui komoditi bawang merah, cabai merah dan sayuran 3. Melakukan pengawasan pupuk dan pestisida mulai dari pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan 4. Pembinaan Kelembagaan Petani	1. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/134 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pangan Kota Tebing Tinggi 2. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 520/1370 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Tanam Komoditi Tanaman padi sawah dan Jagung Periode Oktober 2024-Desember 2024, serta Komoditi Bawang Merah, cabai Merah dan Sayuran Periode Januari –Desember 2024 3. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/88 Tahun 2024 Tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Tebing Tinggi 4. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/743 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Kota Tebing Tinggi	1. Menjamin ketersediaan pangan yang cukup, tercapainya distribusi pangan yang lancar, adil dan merata, serta stabilitas harga pangan 2. Tertibnya pengaturan pola tanam di lapangan untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas hasil pertanian. 3. Pengawasan penggunaan, pengadaan, peredaran dan penyimpanan pupuk serta pestisida 4. Pembinaan Kelompok Tani
6	1. Pedoman manajemen Talenta PNS dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 2. Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi	1. Perwa No. 64 Tahun 2021 2. Perwa No 63 Tahun 2021	1. Tujuan yang dimaksud adalah : a. Menemukan dan menyiapkan PNS untuk menduduki jabatan setingkat lebih tinggi b. Mewujudkan perencanaan suksesi yang obyektif dan akuntabel sehingga dapat mengoptimalkan capaian visi dan misi organisasi c. Membangun iklim kompetensi yang positif diantara PNS untuk memberikan prestasi terbaik bagi pemerintah; dan d. Mengelola sumber daya manusia secara terukur dan terencana untuk menjamin obyektivitas, kualitas dan transparansi pengangkatan dalam jabatan PNS agar sesuai dengan kualitas, kompetensi dan kinerja yang dimiliki 2. Tujuan yang dimaksud dalam rangka memenuhi rekomendasi KPK dan permintaan penilaian sistem merit (KASN) Untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar dan disiplin dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
7	Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/172 Tahun 2024	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
8	Pembentukan Tim Kerja Sama Pelaksanaan Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas Pada Hari Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2024 di Kota Tebing Tinggi.	Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 551/2055 Tahun 2024	a. Melakukan pengendalian terhadap pengoperasian sarana transportasi umum selama Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2024; b. Melakukan pemantauan di pintu –pintu

			masuk wilayah Kota Tebing Tinggi terhadap pengguna transportasi (baik angkutan umum maupun angkutan pribadi) yang melakukan Perjalanan pada Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2024
9	1. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi 2. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 20 Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi 3. Peraturan Daerah Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Pedoman SKPD dalam penyusunan Renja SKPD dan landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan Rancangan APBD Pedoman SKPD dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD dan landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD dan pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
10	1. 4 Januari 2024 No 1 Tahun 2024 Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. 18 September 2024 No 3 Tahun 2024 Perda PAPBD 2024 3. 27 Desember 2024 No 5 Tahun 2024 Perda APBD 2025 4. 29 Agustus 2024 No 22 Tahun 2024 Perwa tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 5. 18 September 2024 No 24 Tahun 2024 Perwa Penjabaran PAPBD 2024 6. 23 Desember 2024 No 33 Tahun 2024 Perwa Perhitungan Nilai Sewa Reklame 7. 27 Desember 2024 No 36 Tahun 2024 Perwa Penjabaran APBD 2025		Dasar Hukum Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dasar Hukum melaksanakan sub kegiatan Tahun 2024 Dasar Hukum melaksanakan sub kegiatan Tahun 2025 Sebagai Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2025 Dasar Hukum melaksanakan sub kegiatan Tahun 2024 Dasar Hukum perhitungan pajak reklame Dasar Hukum melaksanakan sub kegiatan Tahun 2025

11	1. Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2022	Sebagai panduan dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah
	2. Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2022	Sebagai pedoman dalam penentuan dan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
	3. Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat Kota Tebing Tinggi	Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 700/2070 Tahun 2022	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Intern Inspektorat Kota Tebing Tinggi
	4. Pedoman Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 700/2069 Tahun 2022	Sebagai acuan bagi para Auditor/PPUPD di Lingkungan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan Reviu HPS
	5. Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2022	Sebagai pedoman dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi
	6. Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kota Tebing Tinggi	Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 700/2060 Tahun 2022	Sebagai acuan APIP daerah dalam melaksanakan audit kinerja agar APIP daerah memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi dalam rangka audit yang efektif dan efisien
	7. Perlindungan Pelapor Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2023	Sebagai sarana untuk melindungi pelapor dalam hal pengaduan masyarakat
	8. Pedoman Pengelolaan Pengaduan	Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2023	Sebagai sarana untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

TABEL 3.3.2

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Meminta kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengambil langkah-langkah yang tepa dan nyata terhadap hasil seminar peninjauan kembali hari jadi Kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang lalu. Hal ini penting kami sampaikan karena hingga saat ini belum ada keputusan DPRD Kota Tebing Tinggi untuk menetapkan hasil seminar dimaksud karena disamping untuk memberikan kepastian hukum (Perda) terhadap hari jadi Kota Tebing Tinggi juga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan besar bagi Juriyat keturunan pendiri Kota Tebing Tinggi karena sampai saat ini hasil seminar yang dimaksud belum bisa menetapkan hari jadi Kota Tebing Tinggi yang sesungguhnya	1. Bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi pada Bulan Januari s.d Juni Tahun 2021 melaksanakan penelitian tentang Peninjauan Kembali Hari Jadi Kota Tebing Tinggi; a. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diseminarkan dengan mengangkat tema "Meninjau Kembali Hari Jadi Kota Tebing Tinggi" pada tanggal 29 Juni 2021 di Gedung Balai Kartini Kota Tebing Tinggi yang dihadiri diantaranya para Peneliti Hari Jadi, Forkopimda, Tokoh Adat, Kepala SPKD, Akademisi, Media dan Masyarakat. Dan dalam seminar tersebut point penting yang disampaikan adalah memastikan bahwa tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk mencari kepastian tanggal berdirinya Kota Tebing Tinggi; 2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi beserta para peneliti membuat beberapa kesimpulan dan Rekomendasi alternatif untuk Hari Jadi Kota Tebing Tinggi yakni: a. Tahun 1630 sebagai awal berdirinya Kerajaan Padang (meskipun belum diperoleh tanggal dan bulan yang pasti); atau	Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi telah menyusun Ranperda Hari Jadi Kota Tebing Tinggi beserta Naskah Akademiknya dan telah disampaikan kepada Wali Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2022 namun belum ada tindaklanjutnya sampai saat ini.

		b.Epitaf yang tertera pada nisan Almarhumah Khadijah binti Muhammad Abid, istri Haji Said Husain yakni tanggal 9 Muharram 1223 H atau tanggal 6 Maret 1808 M. 3. Selanjutnya terkait Tokoh Pendiri Kota Tebing Tinggi belum ada dilakukan penelitian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi;	
2	Dinas Kesehatan agar membuat regulasi yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh BPJS Kesehatan dan diharapkan membuka akses dari seluruh puskesmas dapat merujuk pasien ke Rumah Sakit dr. Kumpulan Pane	Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah melaksanakan Program UHC dari BPJS, yang mana melayani Pengaktifan/penerbitan sekaligus penambahan peserta b bagi masyarakat sedang menjalani rawatan namun tidak memiliki kartu kepesertaan namun telah memiliki kartu keluarga sebagai penduduk kota Tebing Tinggi dan puskesmas sudah dapat melakukan rujukan pasien ke RSKP namun diberlakukan zonasi karena untuk pemerataan pasien di seluruh Rumah sakit di Kota Tebing Tinggi, harapan kedepannya seluruh masyarakat kota tebing tinggi yang menggunakan kepesertaan BPJS kesehatan berdasarkan APBD Kota Tebing Tinggi dirujuk ke RSKP	
3	Ketersediaan Infrastruktur Jalan dan Drainase merupakan harapan seluruh Lapisan masyarakat. Ketersediaan Infrastruktur Jalan dan Drainase yang selama ini telah dilakukan oleh OPD terkait tetap diharapkan untuk terus melakukan peningkatan dan ketersediaan diseluruh kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi	Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan/rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur Jalan dan Drainase pada Tahun Anggaran 2024	Infrastruktur Jalan dan Drainase yang semakin baik
4	Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD menilai banyak OPD yang tidak mampu melaksanakan	Melakukan perancangan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari	Tujuannya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal

	keseluruhan program dan kegiatan yang telah di susun sehingga banyak anggaran yang tidak terpakai dan mengakibatkan kegiatan dimaksud tidak memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota khususnya para Pimpinan OPD jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	pencapaian realisasi anggaran yang meningkat dari Tahun 2023 sebesar 91,58 % menjadi 95,07 % di tahun 2024. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan baik serta memberikan dampak yang optimal kepada masyarakat.	
5	1. Minimnya kehadiran Kepala OPD pada rangkaian Rapat paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD menilai banyak OPD yang tidak mampu melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga banyak anggaran yang tidak terpakai dan mengakibatkan kegiatan dimaksud tidak memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota khususnya para pimpinan OPD di jajaran pemerintah Kota Tebing Tinggi	1. Akan menjadi perhatian untuk tetap peningkatan kehadiran dalam rapat-rapat paripurna DPRD 2. Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi telah mencapai target sesuai dengan target yang ditetapkan dalam IKU OPD dan berdasarkan review Inspektorat untuk nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapat nilai 78,5 (kategori Tinggi)	1. Memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku 2. Program Kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terukur dan akuntabel
6	Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD menilai banyak OPD yang tidak mampu melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang telah di susun sehingga banyak anggaran yang tidak terpakai dan mengakibatkan kegiatan dimaksud tidak memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu kondisi ini menjadi perhatian serius bagi	Kedepannya agar lebih memaksimalkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan	

	Pemerintah Kota khususnya para Pimpinan OPD di jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi.		
7	1. Adanya pembiaran menyangkut pasar kreatif dan pasar induk yang sudah cukup lama tidak berfungsi 2. Banyaknya anggaran APBD yang Dikururkan akan tetapi Outcome/ Manfaatnya tidak terlihat oleh DPRD Kota Tebing Tinggi 3. Diduga adanya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas juru kutip dari Dinas Perdagangan tanpa adanya simbol/logo dari	a. Pasar kreatif telah difungsikan sebagai tempat berjualan para UMKM Kota Tebing Tinggi. b. Pasar Induk segera akan difungsikan kedepannya. Dapat kami sampaikan bahwa Pasar Induk sebenarnya telah berfungsi namun para pedagang menarik kembali dagangannya karena sepi pembeli oleh karena saat itu jalan masih rusak, namun saat ini telah dieprbaiki dan kami terus menerus menghimbau para pedagang dan UMKM untuk berdagang di Pasar Induk dan harapan kami DPRD terhormat dapat mendukung dan mengajak masyarakat untuk mau berdagang di Pasar Induk bersama-sama dengan kami. Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 7.734.672.633, namun alokasi anggaran yang besar diperuntukkan untuk urusan wajib sebagai berikut: 1. Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp. 3.315.291.608 2. Gaji Honorer dan BPJS sebesar Rp. 1.913.950.920 Biaya Air, Listrik, dan Internet sebesar Rp. 64.217.108 Petugas juru kutip telah dilengkapi dengan atribut ID Card pada saat mengutip retribusi	Pasar Induk berfungsi dengan baik, namun pedagang tidak mau dipindahkan (direlokasi) ke Pasar Induk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan kegiatan pelatihan yang terdapat dalam Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan berupa: 1. Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UMKM 2. Pelatihan Membatik Angkatan I 3. Pelatihan Membatik Angkatan II 4. Pelatihan Peningkatan Skill Pelaku UMKM Milenial dalam Pemanfaatan Aplikasi Petugas juru kutip telah dilengkapi dengan atribut ID Card pada saat mengutip retribusi.

	Dinas terkait, dan tidak ditemukan struk/tanda terima antara pedagang dengan juru kutip		
8	Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD menilai banyak OPD yang tidak mampu melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang telah di susun sehingga banyak anggaran yang tidak terpakai dan mengakibatkan kegiatan dimaksud tidak memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota khususnya para Pimpinan OPD di jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	Kedepannya agar lebih memaksimalkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan	
9	Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD menilai banyak OPD yang tidak mampu melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga banyak anggaran yang tidak terpakai dan mengakibatkan output kegiatan tidak tercapai kepada masyarakat, sehingga diharapkan kedepan seluruh OPD mampu melaksanakan program dan kegiatan yang telah diajukan.	Di tahun 2023, Kecamatan Padang Hulu melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp. 7.729.461.415,- dan pagu PAPBD sebesar Rp. 7.758.998.600,-. Anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.607.298.616,- atau sebesar 98,04%. Sedangkan di tahun 2024 mengalami peningkatan dimana Kecamatan Padang Hulu melaksanakan sebanyak 4 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 7.601.634.945,- dan pagu PAPBD 2024 sebesar Rp. 7.566.253.045,-. Adapun realisasi seluruh program dan kegiatan Kecamatan Padang Hulu sebesar Rp. 7.399.969.914,- atau sebesar 97,80%.	Dari uraian tindaklanjut tersebut, bahwasannya Kecamatan Padang Hulu tidak mengalami masalah/kendala dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024. Seluruh anggaran dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat beikut capaian kinerja Kecamatan Padang Hulu dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari 98,04% menjadi 97,80%.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pemberian tugas pembantuan pada prinsipnya merupakan tugas untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak menerima Dana Tugas Pembantuan baik yang bersumber dari dana APBN maupun dana APBD Provinsi.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai media untuk menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Kota selama tahun 2024, termasuk capaian kinerjanya kepada seluruh Stakeholders pembangunan Kota.

Secara garis besar yang diuraikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD ini adalah menjelaskan arah kebijakan pemerintahan umum daerah, pengelolaan keuangan secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 ini tak luput dari kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat berharap, kiranya melalui pembahasan internal Dewan yang terhormat dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan kepada DPRD Kota Tebing Tinggi untuk dapat dijadikan bahan evaluasi oleh segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, dan bahan informasi pembangunan Kota Tebing Tinggi, semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita semua.